

**HAJI POLITIK : PERLAWANAN PARA HUJAJ ZAMAN  
PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E)

**Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (MHU)**

Oleh :

**Fitrah**

1901056017

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : **FITRAH**  
NIM : **1901056017**  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul :

**"HAJI POLITIK: PERLAWANAN PARA HUJAJ ZAMAN PENDUDUKAN  
JEPANG (1942-1945)"**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 07 Nopember 2023

**Pembimbing**

**Dr. H. Abdul Sattar M.Ag**  
**NIP.1973081419988031001**

## HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI  
Skripsi dengan Judul :  
**HAJI POLITIK : PERLAWANAN PARA HUJAJ ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG  
(1942-1945)**

Disusun Oleh:  
**Fitrah**  
**1901056017**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

**Hj. Widayat Mintarsih, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 196909012005012001

Sekretaris/Penguji II

**Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag**  
NIP. 197308141998031001

Penguji III

**Drs. H. Ahmad Anas, M. Ag**  
NIP. 196605131993031002

Penguji IV

**H. Abdul Rozag, M.S.I**  
NIP. 198010222009011009

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

**Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag**  
NIP. 197308141998031001

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pada  
Tanggal 20 Desember 2023



**Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag**

NIP. 197204102001121003

## HALAMAN PERNYATAAN

### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrah

NIM : 1901056017

Jurusan : Manajemen Haji dan Umroh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar ke sarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 7 November 2023

Penulis



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan karunianya kepada penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Haji Politik: Perlawanan Para Hujaj Zaman Pendudukan Jepang ( 1942-1945)”** ini dari awal hingga selesai. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para shahabat.

Karya tulis skripsi ini diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata (S-1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada pihak- pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun itu. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinannya.
3. Dr. H. Abdul Satar, M. Ag selaku ketua prodi Manajemen Haji dan Umrah juga selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos. I, M.S.I selaku sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Emak dan Pua yang selalu mendukung, mendoakan penulis dalam segala hal. Berkat doa-doa baik kalian, penulis bisa sampai pada titik ini. Juga terimakasih untuk dukungan dananya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

7. Nenek inwai dan Nenek atarona yang juga selalu mendukung segala hal baik yang penulis lakukan, doa kalian menyertai segala hal baik yang sudah penulis lewati.
8. Aftitah, Ainun Mujidah, Mudmainah. Adik-adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan juga memberikan harapan hingga penulis menjadi semangat dalam menuntaskan tugas akhir.
9. Segenap keluarga yang telah memberikan doa dan juga dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
10. Rona Ferira, Rafiyati, Dian Safitri, Nurhasanah, Listia Salma Prastiwi, Nurhidayati, sahabat seperjuangan yang selalu mensupport dan memotivasi agar penulis tetap bertahan dalam situasi dan kondisi apapun itu.
11. Teman-teman Lpm Missi terlebih khusus teman-teman pengurus angkatan 2019 : Elly Masfufah, Chofifah, Laela, Mukhlis, Arif, Habibie, Fika, Nisa, Ihsanul, Thoharudin yang telah memberikan support, doa dan juga yang paling penting menjadi wadah dan tempat bagi penulis belajar banyak hal.
12. Elly Masfufah, terimakasih banyak telah menjadi guru ngaji penulis, harapan dan doa baik selalu menyertaimu dalam hal apapun.
13. Teman-teman MHU angkatan 2019, terlebih khusus teman-teman kelas A. Bersama kalian penulis melewati kuliah, dari 2019 hingga sampai semua lulus dengan waktunya masing-masing
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata ( KKN) yang telah mendukung maupun mendoakan penulis
15. Lagu-lagu Tulus yang telah membersamai mood penulis dalam menulis penelitian ini
16. Dan semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terimakasih.

Penulis menyadari meskipun banyak yang membantu, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun kepenulisannya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan karya tulis ini mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik serta saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna memperbaiki penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua

Semarang, 07 November 2023

Penulis

Fitrah

1901056017

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukur yang mendalam atas selesainya penelitian ini, peneliti persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan penelitian ini dengan mungkin banyak tantangan maupun rintangannya, banyak keluh dan nangisnya, pun banyak syukurnya. Semoga kedepannya hal-hal baik selalu membersamai langkahmu.
2. Ema dan Pua yang telah memberikan dukungan, doa, dana, dan juga nasehat-nasehat yang baik dan bijak. Saya sudah sampai dititik ini semua berkat kerja keras dan juga doa kalian, semoga kalian selalu dilimpahi hal-hal baik.
3. Nenek dan Kakek, berkat doa dan juga dukungan kalian saya bisa sampai pada tahap ini. Segala didikan dan juga nasehat kalian membersamai saya dalam segala pilihan yang saya buat.
4. Adik-adik ku tercinta, saya mempersembahkan ini untuk kalian, semoga kelak kalian melihat ini dan bangga kalau kakak kalian sudah melewati kuliah untuk mendapatkan gelar ini dengan banyak keluh dan syukurnya.



## MOTTO

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي ، أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ ،

“Sesungguhnya Ruhul-Qudus menghembuskan ke dalam diriku, bahwa suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan baguslah dalam meminta, dan jangan lah kalian menganggap lamban datangnya rezeki, sehingga kalian mencarinya dengan cara mendurhakai Allah, karena apa yang ada disisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan menaati-Nya”

( Rasulullah saw)

## ABSTRAK

**Fitrah, Nim (1901056017) 2023. Haji Politik : Perlawanan Para Hujaj Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945). Skripsi : Program Studi Manajemen Haji dan Umroh, UIN Walisongo Semarang.**

Penelitian ini menggambarkan tentang perlawanan para hujaj masa pendudukan Jepang di Indonesia. Topik ini dijadikan tema penelitian untuk memahami kehidupan suatu bangsa serta proses perkembangannya yang perlu direkonstruksi kembali fakta sejarahnya. Pemikiran politik orang Islam Indonesia tidak terlepas dari pengaruh ibadah haji yang dilakukan selama masa kolonial. Ulama haji pada masa ini membawa ideologi politik Islam dari Timur Tengah ke Indonesia, dengan kondisi bangsa pada masa ini sedang mengumpulkan dan menyatukan kekuatan melawan penjajah. Haji pada masa kolonial dipandang sebagai peluang sekaligus ancaman. Sejak berabad-abad lamanya, trafik haji memang bukan hanya pergerakan orang dan barang, tapi juga perputaran jasa dan uang. Momen haji juga merupakan ajang penyebaran ilmu dan gagasan. Haji merupakan ibadah dengan pengumpulan masa terbanyak, berkontak dengan orang-orang islam dunia. Hal ini yang menjadi satu alasan mengapa Ibadah haji mampu memunculkan kesadaran politik hingga munculnya perlawanan-perlawanan.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah guna untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan ialah : *Tahapan pertama*, pengumpulan data dan sumber, dimana sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah: buku, jurnal, artikel online, dan arsip foto yang berkaitan dengan sejarah perlawanan yang dilakukan oleh para hujaj selama pendudukan Jepang. Sementara datanya : berupa kumpulan kata, kalimat, hingga paragraf dari sumber data yang kemudian direalisasikan dalam penulisan penelitian. *Tahapan kedua*, kritik sumber , pada tahapan ini data-data sejarah yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah sesungguhnya. *Tahapan ketiga*, interpretasi, pada tahapan ini dilakukan penafsiran dan perbandingan atas data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang baru. *Tahapan keempat*, tahapan historiografi atau penulisan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada masa pendudukan Jepang, perlawanan yang terjadi dilakukan dalam berbagai bentuk. Diantaranya : ***Perlawanan dengan Strategi Kooperasi***, dilakukan oleh tokoh-tokoh perjuangan dengan memanfaatkan organisasi - organisasi yang dibentuk Jepang untuk menarik kaum muda agar terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. ***Perlawanan dengan Strategi Dibawah Tanah ( Ilegal)***. Perlawanan ini dilakukan secara rahasia dan terorganisir. Perlawanan yang dilakukan secara diam- diam dan tersembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat, juga menanam persatuan dan kesatuan perjuangan kemerdekaan. ***Perlawanan Melalui Senjata dan Pemberontakan***. Perlawanan-perlawanan yang terjadi banyak dimotori oleh umat Islam terlebih khusus tokoh-tokoh yang sudah berhaji. Hal ini menunjukkan bahwa haji memiliki peran penting dalam menyebarkan budaya dan pengetahuan yang berasal dari

Timur Tengah. Pengetahuan ini menjadi sarana untuk mentransfer nilai-nilai yang berasal dari Timur Tengah, yang kemudian dikembangkan dan pada akhirnya menghasilkan gerakan perlawanan terhadap Jepang. Ibadah haji dalam konteks ini menjadi sebuah ritual yang mampu memengaruhi pemikiran politik manusia, dan menunjukkan bahwa haji memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik selama masa pendudukan Jepang.

**Kata Kunci : Masa pendudukan Jepang, perlawanan, haji politik**

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN .....	III
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
PERSEMBAHAN .....	VIII
MOTTO .....	IX
ABSTRAK .....	X
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	6
<b>C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b> .....	6
<b>D. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>E. METODE PENELITIAN</b> .....	8
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	8
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	8
<b>3. Langkah-langkah Penelitian</b> .....	8
<b>F. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	10
BAB II.....	12
POLITIK, PERLAWANAN, DAN SEJARAH PERJALANAN IBADAH HAJI INDONESIA.....	12
<b>A. POLITIK</b> .....	12

1. Pengertian Politik .....	12
2. Konsep politik .....	13
3. Bentuk Partisipasi Politik .....	15
<b>B. PERLAWANAN.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Perlawanan.....	15
2. Bentuk-Bentuk Perlawanan .....	16
3. Faktor Munculnya Perlawanan .....	18
<b>C. SEJARAH PERJALANAN IBADAH HAJI INDONESIA.....</b>	<b>19</b>
1. Haji di era Kerajaan Islam Nusantara.....	19
2. Haji Masa Kolonial .....	21
3. Haji Pasca Kemerdekaan .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>SEJARAH PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA .....</b>	<b>35</b>
<b>A. LATAR BELAKANG PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA ....</b>	<b>35</b>
<b>B. RUTE MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA.....</b>	<b>38</b>
<b>C. MASA PENDUDUKAN JEPANG.....</b>	<b>40</b>
<b>D. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA.....</b>	<b>42</b>
1. Kebijakan Dalam Bidang Pemerintahan .....	42
2. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Ekonomi Dan Sosial.....	46
3. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Politik .....	48
4. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Pendidikan.....	52
<b>E. DAMPAK PENJAJAHAN JEPANG .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>62</b>
<b>PERLAWANAN PARA HUJAJ MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)</b> .....	<b>62</b>

<b>A. SEJARAH PERLAWANAN</b> .....	62
<b>B. BENTUK-BENTUK PERLAWANAN PARA HUJAJ MASA PENDUDUKAN JEPANG</b> .....	64
<b>1. Perlawanan Dengan Strategi Kooperasi</b> .....	64
<b>2. Perlawanan dengan strategi gerakan dibawah tanah ( Illegal)</b> .....	64
<b>3. Perlawanan melalui senjata dan pemberontakan</b> .....	67
<b>1. Perlawanan Aceh Terhadap Tentara Jepang</b> .....	67
<b>2. Perlawanan Petani Indramayu</b> .....	69
<b>3. Perlawanan di Singarparna, Tasikmalaya</b> .....	74
<b>4. Perlawanan Kalimantan</b> .....	75
<b>5. Perlawanan PETA ( Pembela Tanah Air)</b> .....	75
<b>6. Perlawanan Haji Darip</b> .....	78
<b>7. Perjuangan Laskar Hizbullah</b> .....	78
<b>C. KLASIFIKASI TOKOH-TOKOH HAJI</b> .....	89
<b>BAB V</b> .....	103
<b>PENUTUP</b> .....	103
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	103
<b>B. SARAN</b> .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	116

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hukum teologi Islam, menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan salah satu pilar penting yang membentuk dasar agama Islam. Bagi orang Muslim, menjalankan Haji adalah salah satu dari lima elemen utama yang mendukung fondasi agama Islam. Seseorang yang sengaja tidak memenuhi kewajiban ini akan dianggap memiliki status yang sama dengan seorang kafir. Dasar hukum yang menjadikan Haji sebagai kewajiban untuk dilaksanakan dapat ditemukan dalam Firman Allah SWT, seperti yang tercantum dalam Quran dalam surat Al-Hajj ayat 27 <sup>1</sup>:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

*Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*<sup>2</sup>

Ibadah haji dapat dijelaskan sebagai simbol persatuan umat Islam, tanpa memedulikan perbedaan suku, ras, jabatan, kebangsaan, warna kulit, dan faktor lain yang bisa memisahkan satu individu dari yang lainnya. Selain itu, ibadah haji juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menjalani kehidupan dalam suasana ibadah, mengembangkan sikap ramah dan penuh kasih kepada setiap mukmin (orang beriman). Juga sebagai sarana untuk melatih pengendalian emosi, melatih kesabaran, menahan hawa nafsu, memahami hakikat ibadah kepada Allah, menghadapi tantangan hidup, mengatasi berbagai kesulitan, serta membangun loyalitas kepada orang-orang yang dicintai Allah. <sup>3</sup>

Memahami kehidupan masa lalu suatu bangsa serta proses perkembangannya hingga dewasa ini diperlukan rekonstruksi kembali fakta

---

<sup>1</sup> Hatman, "Haji Dalam Berbagai Perspektif (Fiqh, Normatif-Filosofis, Dan Sosial)," *Academi. Edu*, 2020, 1–11.

<sup>2</sup> Arham Bin Ahmad Yasin, *Mushaf Ash-Shabib Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Agus Wadi (Depok: Hilal Media, n.d.).

<sup>3</sup> Azalia Mutammimatul Khusna, "Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff," *An-Nas* 2, no. 1 (2018): 132–45,.

sejarahnya. Melalui proses ini, berbagai aspek kehidupan dan perkembangan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun kemanusiaan, dapat diungkap kembali. Di Nusantara haji memiliki catatan sejarah yang tidak lepas dari perjuangan. Haji dipandang sebagai hal sakral karena membawa perubahan dalam penyebaran agama Islam. Ibadah haji masa lalu tidak hanya tentang ritual keagamaan, namun haji juga memiliki peran sebagai alat dalam menyebarkan sebuah ideologi bagi golongan nasionalis yang berjuang demi tercapainya negara kesatuan sebagaimana yang telah di proklamirkan. Ibadah haji memiliki filosofi yang kerap kali menunjukkan ideologi tentang semangat dalam perjuangan. Haji pada dasarnya merupakan total action, seperti tawaf yang mencerminkan transformasi prinsip dan langkah yang komprehensif, sa'i sebagai simbol konsistensi dan ketekunan dalam perjuangan, wukuf sebagai simbol evaluasi dan pemahaman diri spiritual, dan lontar jumrah sebagai simbol persiapan fisik dan mental dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.<sup>4</sup>

Sejarah umat Islam di Nusantara, menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji sudah dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama. Pelaksanaan ibadah haji telah memiliki dampak yang signifikan pada Nusantara dalam tiga aspek utama, yakni : *Pertama*, mengubah tata sejarah dan dinamika kehidupan beragama masyarakat Indonesia selama berabad-abad. *Kedua*, memainkan peran besar dalam Islamisasi dan pergolakan politik melawan kolonialisme. *Ketiga*, sejak awal abad ke-19, ziarah menjadi penting sejak abad ke-19 menjadi penyumbang devisa Arab Saudi karena jumlah haji nusantara lebih banyak dari negara-negara lain<sup>5</sup>.

Aktivitas ibadah haji Nusantara pada abad ke 19 dan abad ke 20 memiliki porsi yang sangat menonjol, jumlahnya berkisar 10 hingga 20 persen dari seluruh jamaah haji yang ada di Tanah Suci, walaupun Indonesia

---

<sup>4</sup> dan Ambo Upe Firda, Jamaluddin Hos, "Makna Sosial Haji Pada Sukubugis (Studi Di Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)," *Neo Societal* 4, no. 2 (2019): 1–13.

<sup>5</sup> Moeflich Hasbullah, *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara* (Depok: KENCANA, 2017). 118



terbilang datang dari wilayah yang cukup jauh dari pada negara yang lain. Pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh jemaah haji berasal dari Indonesia. Orang-orang yang berangkat haji masa ini memiliki motif selain untuk mencari legitimasi ilmu, juga syariat mewajibkannya bagi yang mampu. Alasan lain yang mendorong untuk melakukan perjalanan penuh kesulitan ke tanah suci tidak lain untuk memperluas agama dan memperoleh lebih banyak pengetahuan dalam bidang-bidang ilmu tentang Islam<sup>6</sup>. Orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsanya pada masa itu saat melakukan perjalanan ibadah haji yang memakan waktu cukup lama, memilih untuk tetap tinggal di tanah Arab untuk mempelajari berbagai bidang ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya dengan tujuan selain untuk dapat memperoleh ilmu yang cukup ada juga yang mencari dukungan dari berbagai pihak untuk mengusir penjajah Indonesia melalui pembentukan organisasi-organisasi Islam. Mengetahui hal ini, pada masa kolonial belanda dibentuknya regulasi ibadah haji dengan tujuan agar masyarakat indonesia enggan menunaikan ibadah haji. Bahkan mengiriskan seseorang untuk mempelajari dan meneliti kegiatan umat Islam saat melakukan ibadah ini. Tujuan politik itu adalah untuk melihat seberapa kuat pengaruhnya bagi pergerakan umat Islam di Indonesia. Pemerintah Belanda pun tidak melupakan kenyataan bahwa berbagai perlawanan umat Islam memang banyak dimotori oleh para haji dan ulama <sup>7</sup>

Pemikiran politik umat Islam di Indonesia pada masa kolonial dipengaruhi oleh aktivitas haji orang Indonesia. Ini bisa diamati dari munculnya organisasi politik Islam seperti Syarikat Islam (SI), yang kemudian bertransformasi menjadi PSII dan Permi (Persatuan Umat Islam Indonesia). SI didirikan pada tahun 1912 oleh seorang haji bernama Samanhudi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi-organisasi ini tumbuh sebagai hasil dari pengaruh ide-ide politik Islam yang

---

<sup>6</sup> Ahmad Royani, "Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2018): 121,

<sup>7</sup> E Y Wibowo, "Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam Di Indonesia (Tahun 1900-1945)," *Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 16, no. 1 (2016): 34-52,.

berasal dari Timur Tengah. Pengaruh pemikiran ini dibawa kembali ke Indonesia oleh ulama-ulama haji yang pada saat itu umat Islam Indonesia sedang berusaha bersatu dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan penjajah.

Haji pada masa kolonial dipandang sebagai peluang sekaligus ancaman. Sejak berabad-abad lamanya, trafik haji memang bukan hanya pergerakan orang dan barang, tapi juga perputaran jasa dan uang. Momen haji juga merupakan ajang penyebaran ilmu dan gagasan. Haji yang merupakan ibadah dengan pengumpulan masa terbanyak, berkontak dengan orang-orang islam dunia. Hal ini juga merupakan satu alasan mengapa Ibadah haji mampu memunculkan kesadaran politik. Orang-orang islam indonesia yang berangkat haji pada masa penjajahan belanda berkontak dengan orang-orang muslim dari negara lain,tak jarang memunculkan kesadaran politik untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kolonial. Haji memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk melakukan perenungan mendalam dan kritis terhadap diri masing-masing, orientasi hidup, dan kondisi sosial politik di Tanah Air mereka, serta kondisi global umat Islam secara keseluruhan. Haji selalu memiliki potensi dan konsekuensi politik yang luas.<sup>8</sup>

Setelah pemerintahan Belanda berakhir, Jepang menduduki Indonesia selama 3,5 tahun. Dalam catatan sejarah, dijelaskan bahwa selama periode penjajahan Jepang, bangsa Indonesia mengalami penderitaan dan kesulitan ekonomi. Pada bulan Januari 1945, laporan resmi menggambarkan kondisi di Jawa yang ditandai oleh kekurangan gizi yang berdampak serius pada kesehatan penduduk, yang diperparah oleh kekurangan obat-obatan dan pakaian yang memadai. Para buruh *romusho* yang kembali ke desa mereka setelah bekerja untuk Jepang juga sering kali membawa infeksi penyakit, terutama malaria dan penyakit kulit, yang menambah penderitaan masyarakat. Hal ini menyebabkan tingginya angka

---

<sup>8</sup> Syamsuddin Arif, "Haji Dan Politik," *Kasyaf* 5, no. 4 (2022): 6–7,

kematian dibandingkan dengan angka kelahiran. Pengaruh dari penjajahan Jepang terasa dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi bangsa dan penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang sangat terlihat, dengan masyarakat Indonesia saat itu mengalami isolasi secara spiritual dan material serta kehilangan ikatan sosial mereka, yang bahkan memengaruhi pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

Selama masa pendudukan Jepang yang berlangsung selama 3,5 tahun, sejarah mencatat bahwa terdapat upaya propaganda Jepang terhadap Islam. Jepang berusaha memanfaatkan Islam sebagai basis pergerakan yang besar dan strategis. Berbagai upaya yang mereka lakukan, diantaranya : mengirim umat Islam untuk berhaji ke Mekah. Di ibu kota Jepang, mereka mendirikan sebuah masjid, dan yang menarik, mereka juga menyelenggarakan sebuah konferensi umat Islam di Tokyo. Jepang memberikan kesempatan besar bagi umat Islam, bahkan memungkinkan mereka untuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia mulai menyadari niat buruk Jepang yang ingin mengubah identitas bangsa Indonesia dan menggantikan Islam dengan *Sintoisme*. Hingga pada saat itu, adanya perlawanan dari yang secara keras maupun lunak. Sikap keras dengan perang yang diperlihatkan oleh ulama-ulama secara individual dan sikap lunak yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin muslim melalui organisasi-organisasi.<sup>9</sup>

Elite agama pada masa itu menjadikan haji sebagai ideologi politik untuk mencapai tujuan dan menata kekuasaan politik. Di Indonesia asal muasal kebangkitan nasionalisme, ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, yang berarti telah tumbuh kesadaran kaum pribumi mengenai politik berkebangsaan pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang mendirikan

---

<sup>9</sup> Alvin Noor Sahab Rizal, "Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)," *Indo-Islamika* Volume 4, (2014): 179–89.

organisasi federatif baru, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) yang diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan wakilnya Wondoamisino dari PSII. Tujuan didirikannya organisasi Masyumi ini untuk menaungi seluruh organisasi muslim seperti, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Pada awalnya, Masyumi memang tunduk pada ketentuan politis yang dikehendaki pemerintah Jepang, namun lambat laun mulai berusaha berkelok. Wadah Masyumi semua ormas Islam bersatu sehingga memiliki kekuatan yang lebih unggul dan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kalangan nasionalisme.<sup>10</sup> Dikutip dari *Republika.id*, dijelaskan antara tahun 1942 - 1945 ada peran ganda yang dijalankan kalangan ulama Nusantara. *Pertama*, menegakkan akidah Islam. dengan cara itu, kaum muslimin dapat dicegah dari kebijakan-kebijakan penguasa yang menggerus kepribadian mereka sebagai pemeluk Islam yang sejati. *Kedua*, para pemuka agama ini turut menyiapkan rakyat Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan. Hal ini yang didalamnya berbagai organisasi yang dibentuk atau keputusan politik yang diambil penguasa dimanfaatkan, peran-peran tokoh agama dan para kyai yang sudah berhaji ikut andil dalam menyosong kemerdekaan.

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait perlawanan para hujaj masa pendudukan jepang dalam menyosong kemerdekaan inodnesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan kajian yaitu : **Bagaimana Perlawanan Yang Dilakukan Para Hujaj Masa Pendudukan Jepang ( 1942-1945)?**

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perjuangan yang dilakukan oleh para hujaj selama masa pendudukan Jepang sebagai bagian

---

<sup>10</sup> Riyadi Suryana, "Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia," *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 83–95,.

dari upaya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks sejarah. Diharapkan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema/topik yang sama

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Guna menyelesaikan penelitian ini, penulis mengambil beberapa tulisan yang dianggap dapat membantu dalam proses penelitian tentang *Haji Politik : Perlawanan Para Hujaj Masa Pendudukan Jepang*, diantaranya :

1. Buku karya Dr. M. Shaleh Putuhena yang berjudul “Historigrafi haji Indonesia” yang diterbitkan oleh LkiS pelangi aksara Yogyakarta , pada tahun 2007. Buku ini berisi tentang sejarah haji di Indonesia, politik haji, dan juga dinamika haji .Penulis menjadikan karya ini sebagai salah satu bahan rujukan untuk mencari informasi terkait dengan haji politik : perlawanan para hujaj masa pendudukan Jepang
2. Buku karya Amelia F yang berjudul “ Masa Pendudukan Jepang” yang diterbitkan oleh Alprin pada tahun 2020. Buku ini berisi tentang sejarah masa pendudukan Jepang. Menggunakan buku ini sebagai bahan rujukan dalam mencari informasi masa pendudukan Jepang
3. Buku karya Sigit Sudiby, Humar Sidik, dan Debi Robi Yanti, yang berjudul “ Buku Seri Infografis : Pendudukan Jepang di Indonesia” yang diterbitkan oleh Guepedia, tahun 2021. Buku ini memuat isi tentang perlawanan pada masa jepang dan juga tokoh-tokoh yang memiliki peran dalam melakukan perlawanan. Yang dapat membantu dalam mengumpulkan informasi terkait perlawanan yang dilakukan para hujaj masa pendudukan Jepang
4. Buku karya Henry Cambert Loir dengan judul *Naik Haji di Masa Silam “Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji 1482-1964”* yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2013. Buku isi berisi tentang perjalanan orang Indonesia dalam melaksanakan ibadah

haji. Penulis menjadikan karya ini sebagai salah satu bahan rujukan untuk memperoleh informasi terkait orang-orang yang berangkat haji pada masa silam yang kemudian menghadirkan perlawanan masa pendudukan Jepang dari para hujaj

Sejumlah karya diatas akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan, dan juga penulis juga belum menemukan penelitian terdahulu terkait *Haji Politik : Perlawanan Para Hujaj Masa Pendudukan Jepang*

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian sejarah, dengan mendeskripsikan kembali sejarah masa lampau. Menggunakan teknik *library reseach* (riset kepustakaan) dalam mengumpulkan data. Sumber data yang digunakan berupa buku, jurnal, penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, arsip foto.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan, diantaranya :

#### **a. Pendekatan Sejarah**

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui perjalanan ibadah haji dari masa ke masa sehingga menghadirkan para hujaj yang ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia

#### **b. Pendekatan Politik**

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui haji politik pada masa pendukuksn Jepang, yang berupa: pengaruh haji dalam munculnya perlawanan yang dilakukan para hujaj

### **3. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian sejarah terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sahingga sampai kepada penulisan sebuah hasil penelitian, yakni:

#### **1. Heuristik**

Kata heuristik ini diambil secara harfiah dari bahasa Yunani “*heurishein*” yang berarti memperoleh atau mendapat. Dapat dipahami bahwa heuristik adalah tahapan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan penelitian. <sup>11</sup>Dalam upaya mencari dan menghimpun referensi, dilakukan melalui kegiatan bibliografis. Bibliografis merujuk pada kumpulan publikasi yang mencantumkan daftar dokumen, termasuk buku, artikel majalah, atau sumber-sumber lain yang relevan dengan ilmu pengetahuan atau karya orang lain yang telah diterbitkan. <sup>12</sup>

## **2. Kritik Sumber**

Penilaian atau pengujian terhadap materi asal tersebut hanya dari perspektif kebenaran disebut sebagai kritik sumber atau kritisisme dalam tahap kedua ini. Setiap informasi sejarah yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan validitas dan keandalannya, sehingga semua data tersebut sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya. Kritik sumber bertujuan untuk mengkonfirmasi keaslian sumber tersebut. <sup>13</sup>

## **3. Interpretasi**

Langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data dan interpretasi. Pada tahap ini, peneliti akan memahami serta membandingkan data yang telah diperoleh untuk menghasilkan informasi tambahan. Proses analisis data bertujuan untuk menjawab setiap masalah atau hipotesis penelitian, yang kemudian diinterpretasikan atau disimpulkan. <sup>14</sup>

## **4. Historiografi**

---

<sup>11</sup> Wulan Juliani Sukmana, “Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah),” *Seri Publikasi Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 1–4.

<sup>12</sup> Sumargono, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019). 9

<sup>13</sup> Sukmana, “Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah).” 1-4

<sup>14</sup> Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (yogyakarta: Cet. IV. Ombak, 2015).

Pada bagian ini, fokus pada penulisan sejarah secara ilmiah. Dalam tahap ini, akan melakukan apa yang dikatakan G. J. Renier (1997:194-204) sebagai serialisasi dalam cerita sejarah dimana harus memperhatikan tiga aspek utama yaitu : kronologi, kausalitas dan imajinatif.<sup>15</sup>

Tiga aspek utama di atas dalam penelitian ini ialah penulisan cerita sejarah secara berentetan (kronologi) dengan memperhatikan sebab akibat maupun hubungannya dengan yang lain (kausalitas). Semua itu disusun dengan menggunakan kemampuan penulis dalam menarasikan sejarah (imajinatif) mengenai *Haji Politik : Perlawanan Para Hujaj Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)*

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan penelitian ini terdiri dari V bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

**Bab I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Kerangka Teori**, memuat tentang : 1.) politik, yang meliputi pengertian politik, konsep politik, dan bentuk partisipasi politik. 2) perlawanan, yang meliputi pengertian perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan, dan faktor munculnya perlawanan. 3) sejarah haji nusantara yang meliputi : sejarah haji zaman kerajaan islam, sejarah haji masa kolonial, dan sejarah haji pasca kemerdekaan.

**Bab III Gambaran Umum**, terkait dengan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) yang mana membahas : Latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia, masa pendudukan Jepang, dan akibat penjajahan Jepang.

---

<sup>15</sup> Khoirul Huda, *Buku Ajar Metode Penulisan Sejarah* (Madiun Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, n.d.).



**Bab IV Pembahasan**, yang menjawab rumusan masalah dari bab I, memuat : Bentuk perlawanan yang terjadi pada masa Jepang, diantaranya : Perlawanan dengan Strategi Kooperasi, Perlawanan dengan Strategi dibawah Tanah (Illegal), Perlawanan dan bentuk Pemberontakan. Serta tokoh-tokoh lain yang berperan diluar perlawanan.

**Bab V Penutup**, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan dan saran-saran sebagai perbaikan dari kekurangan penulis.

## **BAB II**

### **POLITIK, PERLAWANAN, DAN SEJARAH PERJALANAN IBADAH HAJI INDONESIA**

#### **A. POLITIK**

##### **1. Pengertian Politik**

Politik berasal dari kata Yunani kuno "Polis," yang berarti kota. Konsep ini kemudian berkembang menjadi "polites," yang mengacu pada warga negara, dan "politikos," yang berarti kewarganegaraan. Secara etimologis, dapat disimpulkan bahwa politik adalah bidang yang berkaitan dengan interaksi antara warga negara dalam suatu kota atau negara. Di bahasa Inggris, kata "politics" memiliki makna bijaksana. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "politik" didefinisikan sebagai : (1) pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan; (2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb) terkait pemerintahan negara atau hubungan dengan negara lain; (3) cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.

Didalam masyarakat istilah politik pertama kali dikenalkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul "Politeria dan Republik," dan kemudian Aristoteles mengembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul "Politica." Kedua karya ini merupakan poin awal dalam pemikiran politik, di mana politik digunakan sebagai konsep untuk mengatur masyarakat. Kedua karya ini membahas berbagai isu terkait dengan bagaimana tugas pemerintahan dapat menciptakan sebuah masyarakat politik atau suatu bentuk organisasi negara yang berfungsi dengan baik.<sup>16</sup>

Beberapa ahli sosial dan politik memaparkan tentang pengertian politik, diantaranya adalah :

---

<sup>16</sup> Ma'mun Mu'min, "Pergumulan Tarekat Dan Politik (Peranan Kyai Haji Muhammad Shiddiq Dalam Tarekat Dan Politik Di Kudus)," *Fikrah* 2, no. 1 (2014): 153–86.

1. Hans J.Morgenthau (1960), politik diartikan sebagai pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan.
2. E.F Zchattchneidr (1960), Politik dapat diartikan sebagai suatu seni dan ilmu dari pemerintahan.
3. David easton( 1953) mengartikan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, negara dan konflik
4. Menurut Pater Merkl, politik adalah upaya untuk mencapai kemajuan sosial yang lebih baik daripada situasi saat ini dan menciptakan sistem yang adil. Dalam konteks ini, politik adalah usaha untuk merumuskan aturan yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat, dengan tujuan membawa mereka menuju kehidupan bersama yang lebih baik.<sup>17</sup>
5. Andrew Heywood mengartikan politik sebagai kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan,dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari konflik dan kerja sama<sup>18</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya.<sup>19</sup>Dari beberapa uraian tentang pengertian politik, dapat disimpulkan bahwa politik adalah aktivitas atau perilaku yang dimana proses didalamnya menggunakan kekuasaan dan kerja sama untuk menyelesaikan konflik secara bijaksana.

## **2. Konsep politik**

Politik memiliki konsep diantaranya :

---

<sup>17</sup> P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012).4-6

<sup>18</sup> Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013).8-9

<sup>19</sup> Miriam Budiarjo, Nuri Soeseno, and Rosa Evaquarta, "Ilmu Politik: Ruang Lingkup Dan Konsep," *Modul 42*, no. 12 (2014): 1-61,

1. Klasik, konsep klasik dalam politik diartikan sebagai sesuatu hal yang digunakan oleh masyarakat untuk bisa mencapai suatu kebaikan bersama yang didalam pelaksanaannya memiliki moral. Konsep klasik ini bertujuan untuk kepentingan umum yang mana memiliki sifat abstrak seperti keadilan, kebenaran dan juga kebahagiaan.
2. Kelembagaan, politik menurut Max Weber adalah segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penyelenggara negara. Negara dianggap memiliki suatu hak monopoli kekuasaan fisik yang paling utama.
3. Kekuasaan, politik adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, atau suatu kegiatan yang menentang pelaksanaan kekuasaan. Kekuasaan disini berarti kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. baik itu tentang pola pikir ataupun perbuatan yang bisa membuat orang lain berfikir dan bertindak sesuai dengan orang yang memberikan pengaruh tersebut.
4. Fungsionalisme, menurut David Easton memiliki pendapat jika politik merupakan penyaluran dari nilai-nilai secara otoritatif. Nilai-nilai otoritatif tersebut memiliki dasar kewenangan serta mengikat masyarakat. Politik juga digunakan sebagai perumusan serta pelaksanaan kebijakan umum.
5. Konflik, Konsep ini dapat diartikan sebagai politik, yang merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan umum dan upaya untuk mempengaruhi, memperoleh dan memelihara nilai-nilai tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hendrik, "Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep ,Contoh Politik Ini!," Granmedia Blog, accessed October 25, 2022

### 3. Bentuk Partisipasi Politik

Mengetahui bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari sudut pandang mana kita mengkajinya. Penelitian menggunakan beberapa bentuk partisipasi politik yang sesuai, antaranya :

1. Informal group (kelompok informal) dan social movement (pergerakan sosial)  
adalah cara-cara di mana sekelompok orang bersatu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ditujukan untuk mengungkapkan aspirasi mereka dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui pertemuan-pertemuan dalam organisasi-organisasi tertentu guna membahas isu-isu yang dihadapi dan mencari solusinya.
2. Protes activity (aktivitas protes), bentuk partisipasi politik ini muncul karena ketidakpuasan masyarakat atau kelompok tertentu terhadap kebijakan pemerintah.<sup>21</sup>

## B. PERLAWANAN

### 1. Pengertian Perlawanan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlawanan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melawan dalam mencegah suatu hal.<sup>22</sup> Menurut James Scott. James C perlawanan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat( kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan atau status sosial rendah) yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok superordinat ( kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan atau status sosial yang tinggi) terhadap mereka. Perlawanan yang dimaksud dalam teori ini muncul akibat adanya penindasan dalam keseharian masyarakat. Perlawanan digunakan oleh kaum tertindas

---

<sup>21</sup> Arifin, "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi Ppkn Fkip Universitas Muhammadiyah Ponorogo Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018," *Skripsi*, 2018.

<sup>22</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online," <https://www.kbbi.web.id/>, N.D.

sebagai alat untuk membela hak-hak mereka. Gerakan perlawanan kaum yang tertindas akan mempertahankan subsistensi yang sudah ada dengan cara menolak perubahan yang ditetapkan. Pada dasarnya resistensi atau sikap menentang menjelaskan tentang terjadinya perlawanan oleh orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka serta merugikan mereka dalam hal lain.

Perlawanan adalah sebuah antitesis, memilih untuk tidak tunduk pada produk budaya, gaya hidup, dan doktrin atau khotbah para penindas<sup>23</sup>

Perlawanan dapat disimpulkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk membalas atau memberhentikan tindakan-tindakan orang lain guna untuk membela hak yang ada pada diri mereka.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlawanan**

Sangaji (2000) mengkategorikan variasi perlawanan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) Tindakan perlawanan yang dinyatakan secara individu, dan (2) Tindakan perlawanan yang dilakukan bersama-sama atau dalam bentuk kolektif. Kedua jenis tindakan ini dapat diungkapkan melalui berbagai cara, termasuk protes terbuka yang dicerminkan dalam media massa, surat protes, pengiriman delegasi, serta melalui dialog, seminar, atau bahkan metode tertutup seperti aksi tutup mulut dan boikot pertemuan dengan pihak yang berseberangan. Di sisi lain, Scoot (2000) membagi perlawanan menjadi dua bentuk, yaitu perlawanan yang bersifat publik atau terbuka (public transcript), dan perlawanan yang tersembunyi atau tertutup (hidden transcript).

---

<sup>23</sup> James C Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).Hlm14

Bentuk resistensi atau perlawanan terbuka yaitu bentuk perlawanan nyata yang muncul di lingkungan atau masyarakat tertentu (misalnya lingkungan kampus, buruh, petani, dll) yang dapat memprovokasi gerakan massa secara spontan dan terus menerus. Perlawanan ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala struktural (structural tensions) yang membuat masyarakat secara sukarela melakukan gerakan massa untuk keluar dari situasi yang memprihatinkan. Perlawanan terbuka adalah perlawanan yang terjadi secara terang-terangan dan biasanya melibatkan tindakan kekerasan.

Ciri-ciri perlawanan terbuka mencakup:

- Bersifat alami, terstruktur, dan kolaboratif.
- Didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan bersama daripada diri sendiri.
- Fokus pada perubahan revolusioner.
- Bertujuan untuk menghapuskan dasar dominasi.

Perlawanan tertutup atau perlawanan tersembunyi adalah tindakan yang biasanya dilakukan secara rahasia dan individu. Biasanya disebut perlawanan sembunyi-sembunyi, yang memiliki karakteristik : (1) tidak teratur dan tidak terjadwal, dilakukan secara mandiri, (2) cenderung bersifat oportunistik dengan fokus pada kepentingan pribadi dan ego, (3) tidak memiliki dampak revolusioner yang signifikan, dan/atau (4) lebih cenderung untuk beradaptasi dengan sistem dominasi yang ada. Tindakan kriminal seperti pencurian kecil-kecilan, hujatan, penghinaan, dan bahkan tindakan pura-pura patuh (meskipun sebenarnya melawan di belakang layar) dapat dianggap sebagai manifestasi dari perlawanan tersembunyi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Agus Prastya, "Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun ( Studi Kasus :Upaya Mempertahankan Lapak Dalam Rangka Untuk Hidup)," *Disertasi*, 2018, 127.

### 3. Faktor Munculnya Perlawanan

Faktor penyebab munculnya perlawanan atau disebut sebagai tindakan, dibagi menjadi dua yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. *Faktor internal* adalah keinginan masyarakat atau individu itu sendiri untuk melakukan perlawanan, yang disebabkan oleh tekanan dan penderitaan yang terus menerus, rasa kesadaran akan hal yang bersifat untuk kepentingan bersama, serta rasa senasib atau sepenanggungan yang dirasakan bersama sehingga timbul semangat bersatu membentuk perlawanan. *Faktor eksternal* adalah faktor dari luar yang membantu mendorong faktor internal, seperti dukungan dari pihak lain, lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan.

Faktor- faktor lain yang timbul dari faktor eksternal ini antara lain : *Pertama*, undang-undang yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. *Kedua*, reaksi pasif masyarakat terhadap kebijakan publik. Karena selama ini masyarakat hanya merasa takut ketika terlibat dalam kebijakan publik. *Ketiga*, tingkat heterogenitas sosial yang sangat tinggi, dengan berbagai karakter yang muncul dalam diri masyarakat sehingga individu didorong oleh arus kekuatan sosial. *Keempat*, faktor ekonomi, kondisi ekonomi negara yang yang tidak menentu memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan inilah yang menjadi pemicu munculnya tindak kekerasan. *Kelima*, perubahan kondisi politik bangsa, dengan pergantian kepemimpinan nasional, langkah-langkah yang diambil mungkin tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat, yang dapat menyebabkan perilaku anarkis di masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rini Idayatiningsih, "Perlawanan Terhadap Dominasi Kekuasaan Dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari (Analisis Wacana Kritis)," *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2017): 42–62,



### C. SEJARAH PERJALANAN IBADAH HAJI INDONESIA

Menunaikan ibadah haji dimasa lampau terbilang sangat susah sehingga menjadikan ibadah haji sebagai motivasi dan inspirasi yang cukup mewah bagi sebagian masyarakat. Menurut kamus besar bahasa indonesia, ibadah haji adalah rukun islam kelima yang wajib dilakukan bagi yang mampu dengan mengunjungi ka'bah untuk mengerjakan ritual-ritual ibadah yang telah disyariatkan.

Ibadah haji yang dalam pengerjaannya dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama dengan serangkaian ibadah tertentu yang telah ditentukan dan ditetapkan. Waktu yang ditetapkan sama yaitu bulan-bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Tempat yang ditetapkan sama yakni; Makkah, Shafa,Marwah, Muzdalifah, dan Arafah. Serangkaian ibadah yang telah ditentukan yakni ; Ihram, Thawaf, Sa'i, dan Wukuf di Padang Arafah. Tidak menutup kemungkinan ibadah haji adalah tempat dan waktu strategis dalam membagikan informasi dan pengetahuan yang baru dari berbagai orang diseluruh dunia.<sup>26</sup>

Perjalanan ibadah haji nusantara merupakan perjalanan “ terjauh “ dan “terlama” dalam bingkai sejarah penyelenggaraan ibadah haji Nusantara. Proses perjalanan haji dari Tanah Air menuju Hijaz juga mengundang diskursus yang cukup hangat. Proses perjalanan haji penduduk Nusantara punya caranya tersendiri, dimulai dari cara mempersiapkan diri dari Tanah Air, pelayaran yang akan digunakan, juga proses pelaksanaan ibadah haji di tanah Hijaz. Pelaksanaan haji dari masa ke masa punya aturannya sendiri-sendiri sesuai dengan masanya<sup>27</sup>,diantaranya :

#### 1. Haji di era Kerajaan Islam Nusantara

Disaat agama menyebar dipulau sumatra dan jawa, Islam dikenalkan dengan cara memberikan pemahaman tentang rukun Islam dan iman bagi

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqih Haji Komprehensif* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh, 2019).

<sup>27</sup> Muhammad Irfai Muslim, “Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan,” *Jurnal Manajmen Dakwah* 6, no. 1 (2020): 51–66.

masyarakat awam. Ibadah haji pada masa ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah paham betul tentang Islam dan memiliki jaringan keluar negeri. Pada masa ini., orang yang bisa keluar negeri hanya utusan kerajaan dan juga saudagar yang membawa ekspor impor barang. Terbilang hanya sedikit orang yang berangkat haji masa ini disebabkan ibadah haji memerlukan persiapan yang matang dan juga biaya yang cukup besar. Maka tidak heran, orang yang berhaji masa kerajaan dianggap orang yang istimewa, juga dianggap sebagai orang yang berilmu. Keuntungan lain haji masa ini ialah orang-orang yang sudah berhaji memiliki kesempatan bahkan diberikan kesempatan untuk menjadi penghubung bilateral antar bangsa.

Perjalanan haji Nusantara asal mulanya tidak diketahui secara pasti, yang jelas haji dimasa kerajaan Islam Nusantara dimulai melalui jalur perdagangan. Sedangkan ibadah haji berdasarkan utusan kenegaraan dimulai sejak abad ke 14-15 yang diawali di Samudra Pasai. Ibadah haji masa ini memiliki peran penting dalam mempertahankan keberadaan sebuah negara kepada masyarakat internasional. Dengan begitu akan diketahui ada negara baru yang kemudian diajak kerja sama. Hal ini sangat menguntungkan bagi masing-masing negara dalam hal perdagangan, terutama dikawasan Asia Barat. Makin banyak pedagang yang ikut serta berlayar ke Asia Barat, begitu pula delegasi kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang mengunjungi kota Mekkah, serta para pencari ilmu yang berguru pada ulama-ulama besar di Mekkah dan Madinah. Bagi kerajaan Islam yang dulunya besar pengaruh budda dan hindu sangat perlu memperdalam ilmu agamanya agar berpengaruh terhadap masyarakat untuk bisa menerima Islam. Dengan cara mengirim orang-orang yang dirasa mahir untuk belajar agama di Tanah Arab. Orang-orang yang berangkat haji pada masa ini dari golongan atas seperti utusan kerajaan, musafir penuntut ilmu dan juga pedagang.<sup>28</sup> Kapal yang digunakan ketika masa ini adalah kapal layar yang dapat memakan waktu selama 2 tahun pelayarannya. Selain

---

<sup>28</sup> Kyota Hamzah, *Haji: Ibadah Yang Mengubah Sejarah Nusantara*, Adnan Rizk (jakarta: PT. Noosphere Digdaya Mulia, 2022).26-28

waktu tempuh yang sangat lama, naik haji masa ini memiliki resiko yang cukup besar. Kondisi alam yang tidak menentu, kehabisan bekal diperjalanan. Akibatnya tidak jarang perahu yang ditumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampat ditempat yang tidak diketahui, akibat badai dan gelombang. Juga tidak sedikit orang yang meninggal dalam perjalanan akibat kekurangan bekal makanan dan juga mabuk laut.<sup>29</sup> Niat haji masa ini untuk berdagang dan juga menuntut ilmu.

## 2. Haji Masa Kolonial

Pada masa ini ketertarikan masyarakat Indonesia untuk berangkat haji tidak hanya di dorong oleh ruhaniyyah atau motivasi keagamaan, juga karena maraknya perkembangan pelayaran yang ada. Teknologi pelayaran maritim pada masa ini sudah cukup pesat. Para jemaah haji masa ini memanfaatkan kapal layar - yang sejatinya merupakan kapal dagang, untuk perjalanan haji. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tiupan angin laut, maka perjalanan dari Nusantara hingga ke pelabuhan Aden (Yaman) membutuhkan waktu kurang lebih lima bulan.

Di Indonesia cikal bakal kolonial muncul pertama kali ialah sebuah organisasi usaha dagang bernama VOC (*vereenigde Oostindische Compagnie*). VOC memulai usaha dagangnya di Nusantara pada 1605 M. Agama Islam pada masa ini sudah tumbuh subur baik dipesisir maupun di pedalaman. Hal ini disebabkan telah adanya hubungan dan interaksi yang kuat dan intens pada abad sebelumnya dengan wilayah Arab.<sup>30</sup> Perubahan visi VOC terhadap Nusantara yang awalnya sebagai perusahaan perdagangan dengan politik perdanganan monopolistis menjadi penguasa wilayah kerajaan melalui dominasi politik.<sup>31</sup> Pada masa ini terjadi pergolakan

---

<sup>29</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999). 48

<sup>30</sup> Asyhadi Mufsi Sadzali, "Kelas Haji Kelas Sosial Sejarah Haji Dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau Dari Kajian Kritis Kapitalisme," *Tsaqofah & Tarikh* 3, no. no.1 (2018).

<sup>31</sup> M. Saleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Fathorrahm (yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007).123

masyarakat Nusantara akibat kebijakan Belanda terkait pembatasan perjalanan haji ke Makkah. Hal ini bukan tanpa alasan, ketakutan dan kecurigaan terhadap para haji yang baru pulang dari tanah suci. Terdapat kecurigaan bahwa masyarakat Nusantara yang menunaikan ibadah haji di Makkah akan membawa pemikiran baru dalam pergerakan Islam untuk menentang kolonialisme. Hal ini kemudian dijadikan alasan sebagai alat untuk merumuskan prosedur ibadah haji untuk memudahkan dalam mengontrol pergerakannya. Namun disisi lain ternyata pihak kolonial juga melihat adanya keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila melakukan monopoli terhadap prosedur ibadah haji.

Pada tahun 1810 Gubernur Jenderal Daendels melakukan usaha memantau pergerakan calon jemaah haji Indonesia dengan membuat peraturan bahwa calon jemaah haji harus menggunakan paspor ketika hendak pergi berhaji. Dengan dalih keamanan dan ketertiban saat perjalanan.

Regulasi ibadah haji masa kolonial pun tidak dikelola dengan baik, hal ini dengan maksud agar masyarakat Indonesia enggan untuk berangkat haji. Takut cikal bakal pertumbuhan pemikiran baru yang kemudian akan menentang kolonial. Pemerintah Hindia Belanda juga menjadikan ibadah haji sebagai sumber pendapatan pemerintahan kolonial. Hingga penipuan dari para agen pemberangkatan haji juga tidak bisa dihindari.<sup>32</sup>

Berangkat haji pada masa ini pun memiliki tantangan yang cukup besar, baik dari pemerintahan kolonial sendiri maupun perjalanan menuju Makkah. Mulai dari regulasi yang memberatkan rakyat Indonesia dengan kebijakan ONH tahun 1825 yang mana ONH (ongkos naik haji) yang ditentukan oleh pihak kolonial sebanyak f.110, tidak termasuk uang pembuatan paspor (surat jalan dari penguasa setempat), biaya hidup, ongkos pulang dan dikenakan wajib lapor kepada pemerintah setempat sepulangnya ke tanah air. Jasa perusahaan dan Syekh sebesar f.17,5, dengan begitu

---

<sup>32</sup> Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan."

ongkos transportasi yang dikeluarkan f.127,5 ( ongkos pergi), namun secara keseluruhan pemerintah Belanda meminta setiap calon jemaah haji harus menyetor F.500. Juga ditambah tantangan perjalanan yang cukup jauh, mulai dari kondisi alam, kurangnya pembekalan saat diperjalanan, dan juga wabah penyakit. Namun hal ini tidak mengurangi minat masyarakat untuk pergi berhaji. Terbukti jumlah jemaah haji relatif stabil tiap tahunnya, bahkan cenderung meningkat – kecuali pada beberapa tahun tertentu<sup>33</sup>. Berikut Tabel jemaah haji dari tahun 1888-1936

No	Tahun	Jumlah Jemaah
1.	1888	6044 orang Jemaah
2.	1889	6841 orang Jemaah
3.	1890	8092 orang Jemaah
4.	1891	6874 orang jemaah
5.	1892	7128 orang jemaah
6.	1893	11788 orang jemaah
7.	1894	7075 orang jemaah
8.	1895	7895 orang jemaah
9.	1896	7694 orang jemaah
10.	1897	7568 orang jemaah
11.	1898	7421 orang jemaah
12.	1899	6092 orang jemaah
13.	1900	5669 orang jemaah
14.	1901	9481 orang jemaah
15.	1902	4964 orang jemaah
16.	1903	6863 orang jemaah

---

<sup>33</sup> Dawam Multazamy Rohmatulloh, “Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial,” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 9, no. 02 (2017): 115–27,.

17.	1904	8694 orang jemaah
18.	1905	9219 orang jemaah
19.	1906	10300 orang jemaah
20.	1907	10944 orang jemaah
21.	1908	14234 orang jemaah
22.	1909	24425 orang jemaah
23.	1910	18353 orang jemaah
24.	1911	26321 orang jemaah
25.	1912	28427 orang jemaah
26.	1913	-
27.	1914	-
28.	1915	72 orang jemaah
29.	1916	48 orang jemaah
30.	1917	1163 orang jemaah
31.	1918	14805 orang jemaah
32.	1919	28795 orang jemaah
33.	1920	22212 orang jemaah
34.	1921	22022 orang jemaah
35.	1922	39000 orang jemaah
36.	1923	74 orang jemaah
37.	1924	3474 orang jemaah
38.	1925	52412 orang jemaah
39.	1926	43082 orang jemaah
40.	1927	31405 orang jemaah
41.	1928	33000 orang jemaah
42.	1929	6917 orang jemaah
43.	1930	4385 orang jemaah
44.	1931	226 orang jemaah
45.	1932	2854 orang jemaah
46.	1933	3693 orang jemaah

47.	1934	4015 orang jemaah
48.	1935	5432 orang jemaah
49.	1936	14976 orang jemaah

Dari data diatas menunjukkan begitu besar keinginan dan antusias masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di era kolonial <sup>34</sup>. Dengan motivasi yang berbeda, namun diantara motivasinya yakni : *Pertama*, menjalankan perintah agama. *Kedua*, keinginan untuk memperluas agama. *Ketiga*, status sosial dikalangan masyarakat (orang yang berhaji akan mendapat gelar Haji). *Keempat*, kekecewaan/kejenuhan pada kehidupan di tanah air (yang masih terjajah) dan ingin tinggal di Makkah.<sup>35</sup> Namun tak sedikit jemaah haji tidak kembali lagi ke tanah air dan kampung halamannya. Dikarenakan kecelakaan diperjalanan dan juga ada yang menetap disana untuk menuntut ilmu agama. Dari catatan Van der Plas, pejabat konsul Belanda di Jeddah, pada tahun 1931 sekitar 10.000 orang bermukim di Jeddah dari 30.000 jemaah saat itu. dengan alasan yang bervariasi, mulai dari menuntut ilmu hingga ada juga yang pemebekalannya habis, hilang dalam perjalanan,terserang penyakit. <sup>36</sup>

Semakin banyak penambahan jumlah jemaah haji semakin menimbulkan masalah terutama dalam kesadaran politik pribumi atas kolonialisme, sehingga kecurigaan Belanda pada para haji makin tinggi, hingga akhirnya dipersulit dan dibatasi ruang geraknya di Makkah, disterilkan dari pola pikir nasionalisme setelah kedatangan dari Makkah, dan sebelum bergabung dengan warga tetangga di kampung dilakukan pola karantina, dan sebagainya. Dengan demikian, menandakan bahwa sulitnya orang berhaji pada masa lalu penuh liku dan kecurigaan dari kolonial.

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama, "Haji Dalam Angka : Jumlah Jemaah Haji Dalam Seabad Lebih," haji.kemenag.go.id, 2015.

<sup>35</sup> Aan Budianto Uswatun Hasanah, "Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji," *Jurnal Candi* 21, no. 2 (2021): 82–98.

<sup>36</sup> Hasbullah, *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara*, 2017. 127

Imbasnya, bila orang mampu haji (pada masa lalu) diberi “tanda” berupa nama yang diawali titel “Haji” dan kehidupannya pada masa kolonial menjadi pantauan khusus dengan pertimbangan beberapa alasan, diantaranya : *Pertama*, kedudukan haji dalam masyarakat sangat dihormati, oleh karena itu ia berpeluang menjadi pemimpin, sebagai seorang pemimpin ia dapat menggerakkan orang khususnya untuk menentang penjajah. *Kedua*, kenyataan sejarah menunjukkan adanya pemberontakan yang dipelopori para haji, seperti kasus perang jihad Palembang, perang jihad Cilegon dan pemberontakan Mutiny di India. *Ketiga*, haji itu sifatnya kosmopolitan, dimana para jama’ah haji bertemu dengan jama’ah haji dari seluruh dunia, dengan demikian wawasan mereka lebih luas, dan kemungkinan meluasnya pengaruh Pan Islamisme di tanah air.<sup>37</sup>

Pada masa penjajahan dan pemerintahan Hindia Belanda, penyelenggaraan ibadah haji lebih berkonotasi ekonomi dan jauh dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hindia Belanda membiarkan perhajian Indonesia dalam kondisi kurang dan tidak terjamin baik pelayanan maupun ketertiban dalam perjalanannya. Tindakan ini dilakukan agar umat Islam enggan menunaikan ibadah haji. Pemerintah kolonial dengan kaki tangannya menjadikan urusan haji untuk memperoleh penghasilan (obyek mencari keuntungan materil) dan pemerasan yang sangat empuk. Sikap Hindia Belanda sangat mengecewakan, menghinakan dan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia. Perlakuan Hindia Belanda inilah yang kemudian tercetuslah ide-ide perbaikan perjalanan haji yang dimulai dari seorang tokoh “herfarmer” KH. Ahmad Dahlan melalui organisasi yang didirikannya pada tahun 1912 yakni persyarikatan Muhammadiyah yaitu adanya Bagian Penolong Haji (BPH) yang diketuai oleh KH. M. Sudrajat. Usaha Muhammadiyah bagian penolong haji ini nantinya menjadi perintis pertama pembinaan urusan haji (kini merupakan

---

<sup>37</sup> Moh. Rosyid, “Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial Dan Problematika Calon Haji Ilegal,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 241,.



satu direktorat pada Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji). Dalam hal ini BPH memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap perbaikan-perbaikan. Hasil penyelidikan dan perbaikan perjalanan haji dari bagian Penolong Haji (BPH) ini ditemukan bahwa pihak Hindia Belanda bersifat *ambivalent* karena dalam rangka politik Islamnya disatu pihak berusaha mengambil hati umat Islam dan dipihak lain menindak tegas setiap usaha-usaha yang menentang Hindia Belanda.

Pada tahun 1922 Volksraad mengadakan perubahan bahan dalam ordonansi 1922 diantaranya menyebutkan bahwa bangsa pribumi (Indonesia) dapat mengusahakan pengangkutan calon haji. Walaupun sifat dan kebijakan Hindia Belanda *ambivalent*, namun disambut baik oleh bangsa Indonesia dengan menunjuk KH. M. Sudrajat dan M. Wirjopertomo untuk mengkhususkan kegiatan terlaksananya perjuangan perbaikan urusan haji. Dengan di sponsori oleh H. Oemar Syahid Tjokrominoto, H. Agus Salim dan KH. M. Sudrajat tahun 1923 dibentuk organisasi Haji Hindia Timur. Sebagai realisasi Pilgrims Ordonantie 1922 R.A.A. Djojodiningrat, R. Muljadi, H. Agus Salim dan KH. M. Sudrajat berusaha mengorganisasi pengangkutan haji sendiri tetapi mendapat rintangan dari Maskapai Pelayaran pihak Hindia Belanda sendiri. Peguruan pencak silat Persatuan Hati (PH) yang berpusat di kota Yogyakarta, pada tahun 1935 membentuk sebuah badan yakni “Comitee Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia” yang anggotanya terdiri dari para ulama dan golongan cerdik pandai.<sup>38</sup>

Pemerintahan Hindia-Belanda selesai menjajah , Nusantara jatuh ke penguasa Jepang. Dalam urusan persoalan pengurusan perjalanan ibadah haji, pemerintah Jepang juga tidak jauh berbeda dengan penguasa kolonial Hindia-Belanda. Pemerintah Jepang sangat khawatir dengan semangat jihad

---

<sup>38</sup> Zainal, “Dakwah Jama’ Ah Haji Nusantara,” *Al-Munir* III, no. 5 (2012): 71–108,

dan juga semangat pan-Islamisme yang dikobarkan para jamaah haji sepulang dari ritual ibadah di Makkah.<sup>39</sup>

Pada masa pendudukan Jepang yang mana pada masa itu Jepang sibuk dengan perang dunia kedua sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak dilaksanakan. Hal ini terbukti dalam data kementerian agama menunjukkan bahwa dari tahun 1937 sampai tahun 1948 terjadi kekosongan jamaah yang disebabkan oleh : *pertama*, kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. *Kedua*, sebagaimana suatu bangsa yang baru merdeka dalam penataan. *Ketiga*, bangsa Indonesia dihadapkan pada perang kemerdekaan ( agresi militer) dan keluarnya fatwa ulama yang mengharamkan meninggalkan tanah air dan tidak wajib pergi haji dalam keadaan perang melawan penjajah.<sup>40</sup>

Selama pendudukan Jepang di Indonesia dan Perang Dunia II, tidak ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang terkait dengan masalah haji. Pemerintah Jepang tidak merevisi ordonansi haji yang dibuat oleh pemerintah Belanda ataupun tidak membuat peraturan tersendiri tentang penyelenggaraan ibadah haji. Begitu pula dengan organisasi Muslim seperti Muhammadiyah maupun NU selama tahun 1940-1945 tidak diketahui menyelenggarakan atau mengatur layanan apapun terkait masalah haji. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tidak ada data yang menyebutkan adanya kapal angkutan jamaah haji yang beroperasi. Kapal angkutan swasta yang selama ini mengangkut jamaah haji Indonesia ke Mekkah juga tidak diketahui melakukan pengangkutan jamaah haji. Ini dikarenakan situasi (Perang Dunia II) pada saat itu yang tidak kondusif untuk melakukan perjalanan haji<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> M. Abdul Ghofur, *Haji Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012).

<sup>40</sup> Agama, "Haji Dalam Angka : Jumlah Jamaah Haji Dalam Seabad Lebih."

<sup>41</sup> Rina Farihatul Jannah, "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000m" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).37-38

### 3. Haji Pasca Kemerdekaan

Sejarah mencatat aktivitas haji mempunyai peran penting bagi lahirnya negara Indonesia, terlihat jelas saat menjelang kemerdekaan, bahkan jauh hari saat masa kerajaan di mana Indonesia lebih dikenal sebagai Nusantara. Bagi muslim Nusantara, ibadah haji bukan semata menjalankan laku spiritual, namun simbol status sosial, legitimasi bagi warga sekitar sebagai orang taat beragama dan mampu.

Penyelenggaraan ibadah haji masa ini sudah sedikit lebih baik dari masa pemerintahan kolonial sebelumnya, sekalipun dalam hal peyalanan masih banyak kurangnya. Setelah terjadi kekosongan pemberangkatan ibadah haji tahun 1937-1949, Indonesia kembali memberangkatkan jemaah haji ke tanah suci dibawah naungan pemerintahan Indonesia sendiri pada tahun 1949-1950 dengan menggunakan kapal laut. Jumlah jemaah pertama yang diberangkatkan 9.892 jemaah. Departemen Agama yang sudah ada pada saat itu juga melibatkan yayasan lain dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, seperti Yayasan Perjalanan Ibadah Haji ( YPIH). Bahkan usaha perorangan, panitia-panitian penyongkong haji milik swasta, dan perusahaan jasa yang lebih berorientasi pada keuntungan.<sup>42</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji semakin mengalami pembenahan. Pada 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslim Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan ibadah haji, yaitu Panitia Perbaikan Perjalanan haji Indonesia (PPHI) yang diketuai oleh K.H.M. Sudjak. Kedudukan PPHI semakin kuat tatkala Menteri Agama mengeluarkan Surat Kementerian Agama RIS No. 3170 Tahun 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama RIS No. A. III/I/648 Tahun 1950 yang menunjuk PPHI sebagai lembaga yang sah di samping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan Ibadah Haji di Indonesia. Pada tahun 1952 dibentuk perusahaan pelayaran

---

<sup>42</sup> Moeflich Hasbullah, *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara* (Depok: KENCANA, 2017).134

PT Pelayaran Muslim yang disetujui oleh Menteri Agama sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi panitia haji. Besarnya jumlah masyarakat yang berminat untuk menunaikan ibadah haji, sementara fasilitas yang tersedia sangat terbatas, Menteri Agama memberlakukan sistem *Quotum*, yaitu jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari masing-masing daerah dengan pertimbangan skala prioritas.

Haji Pada Masa Orde Baru dilakukan perubahan struktur dan tata kelola organisasi Menteri Urusan Haji dan mengalihkan tugas penyelenggaraan haji di bawah wewenang Direktur Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama, termasuk mengenai penetapan besaran biaya, sistem managerial, dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Pada tahun ini, penetapan biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan berdasar tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut, haji berdikari, dan haji dengan pesawat udara<sup>43</sup>. Dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Urusan Haji Nomor 105 tahun 1966. Tahun ini juga ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan pembagian kapal laut sebesar Rp. 27.000, haji berdikari sebesar Rp. 67.500, haji dengan pesawat udara sebesar Rp. 110.000.

Pemerintah ikut bertanggungjawab secara penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji, sejak penentuan biaya hingga pelaksanaan serta hubungan antara dua Negara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Pada tahun ini, ditetapkannya biaya perjalanan ibadah haji yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kriteria penggunaan transportasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1970, yaitu biaya perjalanan pesawat terbang sebesar Rp. 380.000, sedangkan berdikari sebesar Rp. 336.000 Banyaknya problema perjalanan haji dengan kapal laut yang tidak dapat diselesaikan, termasuk pailitnya PT.

---

<sup>43</sup> Inti Ulfi Sholichah, "Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 161–78.

Arafat, mulai tahun 1979 pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK-72/OT.001/Phb79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut dan menetapkan bahwa penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan menggunakan pesawat udara<sup>44</sup>

Pada masa reformasi, pemerintah membuat aturan baru yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Isinya adalah penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan kepengurusan penyelenggaraan yang baik, agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntutan agama, serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga memperoleh haji mabrur. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah kemudian merevisi UU nomor 17/1999 dengan UU nomor 13/2008 yang menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (DEPAG) masih menjadi Operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji.”<sup>45</sup> Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji pasca kemerdekaan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan tuntutan pada zamannya, maka dari itu peneliti mengambil sampel tahun 1949- 2011 dengan penjabaran sebagai berikut :

No	Tahun	Penyelenggaran Ibadah Haji
1.	1949/1950	Keberangkatan haji pertama ke Arab Saudi.
2.	1950/1962	Penyelenggaraan haji dilaksanakan secara bersamasama oleh Pemerintah dan Yayasan

<sup>44</sup> zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern),” *Manhaj* 4, No. 3 (2016): 274–82.

<sup>45</sup> Prasetyo Agung, “Sejarah Haji Di Indonesia Dari Masa Ke Masa,” *Ceknriccek.com*, 2019.

		Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) yang didirikan tanggal 21 Januari 1950 dengan pengurusnya terdiri dari para pemuka Islam berbagai golongan.
3.	1962-1964	Pemerintah membentuk dan menyerahkan penyelenggaraan haji Indonesia kepada Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H). Pada masa inilah dimulai penyelenggaraan haji Indonesia dengan suatu panitia yang bersifat inter-departemental ditambah dengan wakil-wakil Badan/ Lembaga Non Departemen, yang kemudian ditingkatkan menjadi tugas nasional yang dimasukkan dalam tugas dan wewenang Menko Kompartimen Kesejahteraan. Dengan demikian, urusan haji yang tadinya berbentuk Panitia Negara P3H berubah menjadi Dewan Urusan Haji (DUHA)
4.	1965-1966	Dewan Urusan Haji menjadi Departemen urusan Haji dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh beberapa Deputi Menteri. Pada tahun 1966 Departemen ini digabungkan ke DEPAG menjadi Direktorat Jenderal urusan Haji DEPAG dan sejak tahun 1979 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
5.	1969	Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi Presiden No. 6 tahun 1969 yang mengatur penyelenggaraan haji hanya oleh Pemerintah, yang dilaksanakan

		Departemen-departemen dan lembaga-lembaga lain terkait di bawah koordinasi DEPAG.
6.	1978	Pengangkutan haji ke Arab Saudi ditetapkan hanya dengan pesawat udara.
7.	1999	Lahir Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia yang mengatur tentang tiga hal yang harus diupayakan secara konsisten dan terus menerus oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama sebagai leading sector penyelenggaraan ibadah haji yaitu: Pertama, pembinaan yang mencakup bimbingan pra haji, ketika berlangsung, dan paska haji. Kedua, pelayanan yang terdiri dari pelayanan administrasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, akomodasi, dan sebagainya. Ketiga, perlindungan yang meliputi keselamatan, keamanan, serta asuransi perlindungan dari pihak lain yang merugikan jemaah haji
8.	2001	setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi 20.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji.
9.	2004	Setoran awal jemaah haji reguler sebar 20.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Mentri Agama
10	2008	Ditetapkan UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui SISKOHAT dengan prinsip <i>firts come first served</i>

11	2010	setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi 25.000.000, yang disimpan dalam rekening atas nama Mentri Agama
12	2011	ONH ditetapkan sebesar 30.771.900 sesuai keputusan Komisi VIII DPR. <sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Nuri, "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014),.



### **BAB III**

#### **SEJARAH PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA**

##### **A. LATAR BELAKANG PENJAJAHAN JEPANG DI INDONESIA**

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945. Perjalanan Jepang menjajah Indonesia tentu saja dengan maksud dan tujuan tertentu. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan ketika itu Jepang berada dalam Perang Dunia II, perang yang dimulai sejak 1939-1945. Perang Dunia II melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan yaitu Sekutu dan Poros. Perang Dunia II dapat dikatakan perang terluas dalam sejarah karena melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan "perang total", negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan pengetahuannya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Selain itu, Perang Dunia II mengakibatkan kematian massal warga sipil, termasuk pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Jumlah kematian yang mencapai 70 juta jiwa menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia.<sup>47</sup>

Pada bulan oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Kono Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Pada pergantian perdana menteri ini, Jepang melihat bahwa Amerika, Inggris dan Belanda harus dihadapi dengan serius, untuk bisa mendapatkan embargo minyak bumi yang mereka butuhkan dan menguasai sumber kekuatan lingkungan kehidupan di Asia Tenggara. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang mengembangkan strategi perang yang sangat berani

---

<sup>47</sup> Tito Hilmawan Reditya, "Sejarah Perang Dunia II : Faktor Pemicu Dan Negara Yang Terlibat," Kompas.com, 2021,

dengan mengerahkan seluruh armadanya menjadi dua operasi agung. Seluruh potensi Tingkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur.<sup>48</sup>

Upaya Jepang dalam membangun imperium di Asia, Jepang meletuskan perang di Pasifik. Yakni perang dunia ke II, di tandai dengan serangan Jepang terhadap pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Kekuatan pertama, dengan mengerahkan 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Tidak lama setelah melakukan penyerangan atas Pearl Harbour, gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Dalam waktu kurang dari 10 hari Jepang berhasil menghancurkan Pearl Harbour, Jepang berhasil membuat kacau kekuatan dan pertahanan bangsa-bangsa Barat di kawasan Asia Pasifik. Selama enam bulan sejak jatuhnya Pearl Harbour, Jepang terus melakukan Gerakan *ofensif*. Hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan mengerahkan 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Pada tanggal 15 Februari 1942 Singapura berhasil direbut dari tangan Inggris setelah berhasil menenggelamkan *kapal induk Prince Of Walls dan Refulse*.<sup>49</sup>

Perang dunia II yang terjadi di Asia pasifik sangat berpengaruh terhadap gerakan merdeka di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa pada masa itu dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> P2K Ungkris, "Sejarah Nusantara ( 1942-1945)," p2k.unkris.ac.id, accessed December 24, 2022,

<sup>49</sup> Amelia F., *Pendudukan Jepang Di Indonesia* (Alprin, 2020). hlm 1-2

<sup>50</sup> And Sofyan\_99, "Sejarah Nusantara," *Lisensi*, n.d.

Jepang masuk ke Indonesia jauh sebelum penyerahan belanda kepada Jepang tahun 1942. Pada tahun 1937 dunia dilandai krisis ekonomi, yang ternyata pada masa itu Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Pada masa ini kolonial belanda ( Indonesia dibawah penjajahan Hindia Belanda) juga merasakan krisis ekonomi, sehingga menjadi jalan masuk awal Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1938-1939, orang-orang Jepang datang ke Indonesia untuk melakukan investasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebelum Jepang menduduki Indonesia, Jepang telah mengirim utusan kepada pemerintah Hindia Belanda pada awal 1941. Nota yang dibawa oleh Kobayashi (utusan Jepang) dari pemerintah Jepang berisi permohonan agar pihak Jepang diberi fasilitas-fasilitas terutama (1) mengizinkan emigran Jepang ke Kalimantan, Sumatera, dan Kepulauan Nusa Tenggara; (2) memberikan izin kepada pihak Jepang konsesi untuk membuka jalan-jalan kereta api, pelabuhan-pelabuhan yang penting, serta mendirikan perusahaan-perusahaan. Namun, permohonan Jepang itu ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda.

Jepang muncul sebagai negara penjajah di Indonesia, adalah sebuah jawaban atas permasalahan-permasalahan kala itu. Kemunculannya sebagai negara penjajah tentu saja melalui proses yang panjang dan sejarah yang pahit terkait diskriminasi yang dialaminya dalam percaturan global dengan Negara-negara barat. Disamping persoalan-persoalan yang bersifat eksternal, Jepang juga menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat internal, yakni: "Persoalan kepadatan Penduduk, keterbatasan pemasaran hasil industri dalam negeri, dan adanya pembatasan imigran ke Amerika dan Australia"<sup>51</sup> Jepang dengan mudah masuk ke Indonesia, karena dinilai memiliki postur badan yang sama dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kala itu menganggap Jepang sebagai pembebas dari belenggu penjajahan Belanda. Rakyat Indonesia memiliki harapan yang besar terhadap pemerintahan Jepang untuk menentukan kemerdekaan bagi

---

<sup>51</sup> Muhammad Ishak, "Sistem Penjajahan Jepang Di Indonesia," *Jurnal INOVASI* 9, no. 1 (2012): 1-12.

Indonesia, sebab masyarakat Indonesia kala itu sudah lama meinginkan kemerdekaan, sehingga kedatangan Jepang disambut dengan baik oleh masyarakat.<sup>52</sup>

## **B. RUTE MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA**

Sebelum menjajah Indonesia, Jepang telah melakukan riset mendalam untuk memahami kebutuhan mereka, baik dari perspektif ekonomi maupun politik. Terutama dalam hal ekonomi, Jepang memiliki keterbatasan sumber daya alam dan mengandalkan teknologi serta produktivitas tinggi. Oleh karena itu, mereka mencari bahan baku dan pangsa pasar yang diperlukan. Indonesia dianggap sebagai pilihan terbaik di Asia Tenggara untuk memenuhi harapan ini. Salah satu wilayah yang menjadi target Jepang adalah Pulau Kalimantan. Sehingga masuknya Jepang secara kronologis dimulai dengan penaklukan Tarakan dan Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Ke-esokan harinya pada tanggal 12 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Tarakan dan secara cepat mengambil alih berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Maluku di wilayah timur. Pada tanggal 24 Januari dan 29 Januari 1942, setelah berhasil menguasai Tarakan dan sekitarnya, Jepang juga berhasil menduduki daerah lain seperti Balikpapan dan Pontianak. Selanjutnya, antara tanggal 3 hingga 10 Februari 1942, Jepang berhasil merebut Samarinda dan Banjarmasin. Keberhasilan ini sangat penting bagi Jepang karena mereka membutuhkan sumber minyak selama Perang Pasifik dan Perang Dunia II, dan juga untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah industri mereka. Kalimantan terkenal sebagai salah satu produsen minyak terbesar kedua di Indonesia, setelah Riau dan Palembang, pada masa penjajahan Belanda.

Dalam waktu hampir bersamaan dengan serangan ke Kalimantan oleh pasukan yang berbeda, Jepang juga memperluas kekuasaannya ke Sulawesi. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang berhasil merebut Manado yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi. Kemudian, pada tanggal 24

---

<sup>52</sup> Muhammad Rijal Fadli And Dyah Kumalasari, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan," 2019, 189–205,

Januari, Jepang berhasil menguasai Bandara Kendari, yang awalnya merupakan pangkalan militer milik Belanda dan Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Sinai, dan hanya dalam satu hari setelahnya, pada tanggal 10 Februari, mereka berhasil menguasai Makassar.

Pada tanggal 14 Februari, pasukan Jepang melakukan mobilisasi pasukan payung dengan tujuan menduduki Sumatera. Hanya dalam waktu dua hari, tepatnya pada tanggal 16 Februari, Jepang berhasil merebut kendali atas Palembang dan wilayah sekitarnya. Setelah berhasil menguasai Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, tentunya Jepang semakin bersemangat untuk menguasai Jawa, yang pada saat itu merupakan pusat politik pemerintahan Hindia Belanda.

Pada awal bulan Maret tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Teluk Banten di Jawa Barat serta Kragan di Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia, yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu, berhasil ditaklukkan. Kemudian, Bandung pun jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 7 Maret 1942. Belanda, yang semakin terdesak dalam situasi tersebut, akhirnya memutuskan untuk melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, pertemuan antara kedua belah pihak berlangsung di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat. Perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati. Pada perjanjian inilah Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh Stachouwer dan Letnan Jenderal Heindrik Ter Poorten, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, kepada Jenderal Hitoshi Imamura, yang bertindak sebagai wakil delegasi Dai Nippon.<sup>53</sup>

Ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penjahan Jepang di Indonesia, yakni : *Pertama*, Indonesia memiliki kekayaan sumber

---

<sup>53</sup> Alhidayath Parinduri, "Sejarah Jepang Masuk Ke Indonesia: Kapan, Tujuan, & Kronologi," *tirto.id*, 2022, <https://tirto.id/sejarah-jepang-masuk-ke-indonesia-kapan-tujuan-kronologi-goLR>.

daya alam, termasuk minyak dan batubara. *Kedua*, Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah seperti karet, beras, kapas, jagung, dan rempah-rempah, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah militer Jepang selama masa perang. *Ketiga*, Indonesia memiliki banyak tenaga kerja murah dan tidak dibayar yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk membantu memulai perang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sementara Jepang, wilayahnya sangat sempit dan bergunung-gunung yang kurang cocok dengan lahan pertanian. Demikian pula, persoalan demografi Jepang pasca politik isolasinya mengalami penambahan penduduk yang berimbas pada emigrasi sebagai jalan keluarnya dan militerisme sebagai pemberi jalan. *Ke-empat*, Indonesia membutuhkan jalur pelayaran yang aman untuk memasok/mendistribusikan barang dan jasa. Alasan lainnya Jepang menjajah Indonesia ialah ingin menguasai wilayah Asia-Pasifik pada Perang Dunia II, mencari daerah industri, adanya semangat shintoisme (membangun kesatuan umat manusia) dan gerakan 3A<sup>54</sup>

### C. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Pendudukan Jepang di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat. Jepang disambut hangat dengan sebutan “ Sahabat tua” karena mampu mengusir bangsa Belanda. Seruan “ Banzai-banzai” ( selamat datang) terdengar dimana-mana. Hal ini menjadi peluang besar bagi Jepang untuk melakukan propaganda dan terus menggalang dukungan dari rakyat Indonesia. Setiap kali Tokyo radio menyiarkan lagu kebangsaannya *Kimigayo*, lagu *Indonesia Raya* juga turut di perdengarkan. Bendera merah putih juga berkibar barenan dengan bendera Jepang Hinomaru. Tidak hanya itu saja, Jepang juga berhasil menarik perhatian masyarakat dengan menggandeng para Kyai yang pada masa itu memiliki kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jepang juga melakukan program politik untuk menarik simpati masyarakat dibidang pendidikan dengan memberikan

---

<sup>54</sup> Sahajuddin Sahajuddin, “Propaganda Dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang Di Enrekang (1942-1945),” *Walusuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, no. 2 (2019): 185–201,

kesempatan kepada pelajar Indonesia untuk mendapatkan beasiswa belajar di Jepang dengan alasan untuk kemajuan rakyat pribumi, juga terkhusus untuk umat Islam, Jepang berusaha menarik simpati dengan mengirim umat Islam untuk berhaji ke Mekkah, juga di ibu kota Tokyo didirikan masjid sebagai bentuk perhatian mereka terhadap umat Islam. Tidak hanya itu saja, yang paling menarik ialah diadakannya konferensi umat Islam di Tokyo. Propaganda lainnya yang dilakukan Jepang adalah dengan mengumandangkan semboyan 3A yaitu : Jepang pimpinan Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia. Serta melancarkan politik dumping, demi memuluskan aksinya menghapus pengaruh kolonial Belanda <sup>55</sup>. Pada masa awal pendudukan, kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia memiliki dua prioritas, yaitu : menghilangkan pengaruh barat di Indonesia dan menggalang kemengangan Jepang. Jepang melakukan propaganda di Indonesia dengan motif yang sama yaitu menjajah Indonesia sebagai negara yang Imperialisme agar Jepang dapat mengembangkan industrinya, dibutuhkan bahan mentah yang diperoleh dengan menjajah tanah yang diduduki. Berbagai alat propaganda seperti sandiwara digunakan untuk merebut hati dan pikiran rakyat Indonesia untuk bekerjasama dengan Jepang

Janji kemerdekaan yang selalu disebutkan Jepang kepada rakyat Indonesia adalah komitmen yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, Jepang juga berjanji memberikan kemerdekaan kepada pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta. Penjajahan Belanda telah berlangsung selama tiga abad, dan ini merupakan periode yang sangat lama bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketika Jepang datang dengan janji kemerdekaan, hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat pada saat itu. Perdana Menteri Koiso mengucapkan janji kemerdekaan ini pada sidang Chuo Sangi In yang kelima pada tanggal 7 September 1944. Namun, janji ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi untuk dilaksanakan karena mengandung frase "*Janji Kemerdekaan di Kemudian Hari.*" Jepang

---

<sup>55</sup> Rizal, "Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)." Hlm 14

memang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi kata-kata "*di kemudian hari*" membuat waktu pelaksanaan janji tersebut menjadi tidak jelas. Sementara sebenarnya, niat Jepang dalam memberikan janji kemerdekaan ini adalah untuk memanfaatkan situasi tersebut dalam upaya mereka untuk memenangkan perang melawan sekutu. Pengumuman janji kemerdekaan ini juga disebabkan oleh memburuknya kondisi perang, yang membuat penguasa Jepang berusaha mempertahankan pengaruh mereka di kalangan pemimpin bangsa Indonesia.<sup>56</sup>

Pada tahun 1944, Jepang terdesak dalam perang pasifik melawan amerika serikat. Amerika pada saat itu berhasil menduduki mariana, yang mana lokasi ini sangat strategis untuk mereka menyerang jepang secara langsung. Akibat kejadian ini, kedudukan jenderal Hedeki Tojo digantikan oleh Jenderal Kuniaku Kairo sebagai perdana menteri. Untuk menghadapi situasi ini, siasat yang Jepang lakukan adalah dengan memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan maksud agar bangsa indonesia dengan suka rela memberikan jiwa dan raganya untuk ikut bertempur atas nama Jepang di perang Pasifik. Yang kemudian janji ini di kenal dengan sebutan "Janji kairo". Namun pada akhirnya janjinya tidak ditepati karena kekalahan jepang dalam perang dunia II akibat jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki.

#### **D. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN JEPANG DI INDONESIA**

##### **1. Kebijakan Dalam Bidang Pemerintahan**

Pendudukan Jepang di Indonesia berbeda dengan Belanda yang hanya memiliki satu pemerintahan sipil. Pada masa pemerintahan Jepang terdapat tiga pemerintahan militer penduduk. Indonesia pada masa itu dibagi menjadi tiga wilayah, yakni :

- 1) Pemerintahan militer Angkatan Darat Ke-25, yang menguasai wilayah Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi.

---

<sup>56</sup> Dio Yulian Sofansyah and Sri Mastuti Purwaningsih, "Dibalik Sandiwara Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)," *Avatara* 1, no. 2 (2013): 44–52, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2383>.



- 2) Pemerintahan militer Angkatan Darat Ke-16, yang memerintah Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
- 3) Pemerintahan militer Angkatan Laut II, yang menguasai Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, dengan pusat pemerintahan di Makassar.<sup>57</sup>

Pemerintahan pendudukan di Jawa pada masa itu direncanakan sebagai suatu entitas sementara berdasarkan Osamu Seirei nomor 1 pasal 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942 oleh panglima Tentara Keenam Belas. Undang-undang dasar peraturan ketatanegaraan selama masa Jepang di Jawa dapat disarikan sebagai berikut:

- Pasal 1: Tentara Jepang akan menjalankan pemerintahan militer sementara di daerah yang telah mereka okupasi untuk segera menjamin keamanan yang stabil.
- Pasal 2: Para pemimpin militer Jepang memegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan militer, menggantikan peran Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sebelumnya memegang segala kekuasaan.
- Pasal 3: Semua lembaga pemerintahan dan hukum dari pemerintahan sebelumnya dianggap sah untuk sementara waktu, selama tidak bertentangan dengan peraturan militer.
- Pasal 4: Tentara Jepang akan menghormati posisi dan kekuasaan pegawai yang setia kepada Jepang.

Dengan kata lain, pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa pada saat itu dirancang sebagai tindakan sementara dengan fokus utama pada keamanan dan pemeliharaan otoritas militer Jepang, sambil mengakui sebagian struktur pemerintahan dan pejabat

---

<sup>57</sup> Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Nugroho No (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1984). Hlm. 5

yang sudah ada sebelumnya. Undang-undang ini juga mengisyaratkan bahwa pemerintahan Jepang berkeinginan untuk terus-menerus menggunakan aparat sipil dan pesertanya dalam waktu yang lama. Agar pemerintahan Jepang dapat terus menjalankan misinya.

Susunan pemerintahan militer Jepang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Panglima Tentara, (Gunshireikan) yang kemudian disebut sebagai Saiko Shikikan, adalah panglima tertinggi atau kepala pimpinan.
- 2) Kepala Pemerintahan Militer, (Gunseikan) yang juga menjabat sebagai staf negara. Kepala Pemerintahan Militer terbagi menjadi lima departemen yang disebut sebagai "bu," yaitu:
  - a) Departemen Urusan Umum (Sumabu)
  - b) Departemen Keuangan (Zaimubu)
  - c) Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan (Sangyobu)
  - d) Departemen Lalu Lintas (Kotsubu)
  - e) Departemen Kehakiman (Shihobu)
  - f) Koordinator pemerintahan setempat disebut Gunseibi.

Gunshireikan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan yang telah diatur oleh gunseikan. Peraturan ini dikenal sebagai Osamu kanrei dan diumumkan melalui Kanpo (publikasi pemerintahan) yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh gunseikan. Pusat-pusat koordinator militer pada saat itu berlokasi di Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Surabaya (Jawa Timur). Namun, upaya untuk membentuk pemerintahan lokal mengalami kesulitan

karena kekurangan personel administrasi dan serangan torpedo dari sekutu yang menyebabkan kehilangan personel Jepang yang dikirim dalam perjalanan. Akibatnya, Jepang terpaksa mempekerjakan pegawai dari kalangan orang Indonesia. Hal ini pada akhirnya memberikan keuntungan bagi pihak Indonesia karena mereka memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.<sup>58</sup>Dengan diangkatnya pegawai-pegawai Indonesia,pada tanggal 1 April 1942 pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang tentang peraturan gaji pegawai negeri dan lokal. Untuk sementara waktu gaji pegawai-pegawai bagsa indonesia yang dahulu dibayar f.100 sebulan, akan tetap dibayarkan demikian. Namun bagi mereka yang gajinya melebihi f.100 akan dibayar dengan aturan terbaru. Yang mana aturan tersebut sebagai berikut

Banyak Gaji Dahulu ( Masa Pendudukan Belanda ) Sebulan	Potongan %	Banyak Gaji sekarang(Masa Pendudukan Jepang) sebulan
f.100-150	5 %	f.100
f.151-201	7,5 %	f.141
f.201-250	10%	f. 184
f.251-300	12%	f.224
f.301-400	15%	f.239
f.401-500	18%	f.263
lebih dari f.500	20%	f.409 <sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Notosusanto. 6-7

<sup>59</sup> Notosusanto.10

Menurut Undang-undang no. 27 tahun 1942 tentang perubahan tata pemerintahan daerah, seluruh pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua poci, Surakarta dan Yogyakarta) yang dibagi atas enam wilayah pemerintahan :

- 1) Syu ( karesidenan) yang dipimpin oleh seorang syuco
- 2) Syi (kotapraja), yang dipimpin oleh seorang syico
- 3) Ken ( Kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco
- 4) Gun ( Kewedanan atau distrik) dipimpin oleh seorang gunco
- 5) Son ( kecamatan) dipimpin oleh seorang sonco
- 6) Ku ( kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco<sup>60</sup>

## **2. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Ekonomi Dan Sosial**

Dibidang ekonomi, di bawah kendali Jepang selama tiga setengah tahun, Indonesia beroperasi dalam keadaan darurat perang. Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi ini adalah bahwa hampir semua aspek kehidupan diatur oleh peraturan penguasa perang. Institusi-institusi masa damai dibekukan, kepentingan bersama dalam memenangkan perang mengatasi segalanya, dan individu-individu memiliki keterbatasan yang signifikan dalam ruang gerak mereka. Pada masa ini, fokus utama ekonomi adalah membuat Indonesia menjadi penyokong kegiatan perang, artinya ekonomi dijalankan untuk menghasilkan barang dan bahan yang diperlukan untuk mendukung perang, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produksi minyak bumi, hasil tambang, dan makanan dipacu untuk mendukung pasukan Jepang di garis depan.<sup>61</sup> Jepang membuat keputusan yang arahnya terpusat pada tujuan mereka mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang.

Tujuan ini dicapai dengan menggunakan dua tahap perencanaan yang dilakukan oleh Jepang, yakni : tahap penguasaan dan tahap penyusunan kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang

---

<sup>60</sup> Amaliatulwalidain, "Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 1 (2017): 25–30, Sinta 1.

<sup>61</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020). hlm 67-68

mengambil alih pabrik gula milik Hindia Belanda yang di kelolah oleh oleh pihak swasta Jepang. Tahap rekontruksi atau tahap penyusunan kembali struktur, Jepang membuat beberapa kebijakan yaitu :

- 1) Prinsip otonomi, di mana penduduk dan pemerintahan daerah diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk mendukung perang Jepang.
- 2) Pembentukan kelompok tetangga yang disebut tonarigumi, yang terdiri dari 10-20 keluarga, dengan tujuan mengumpulkan kontribusi kepada pemerintah Jepang.
- 3) Jepang memiliki kendali monopoli atas hasil-hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh gunseikan.
- 4) Adanya pengerahan untuk kebutuhn perang.

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung keperluan perang, Jepang menerapkan berbagai bentuk mobilitas sosial yang mencakup:

- a. Penyelenggaraan kinrohosi atau pelatihan kerja paksa
- b. Pelaksanaan romusa atau pekerjaan paksa tanpa upah.
- c. Pembentukan tonarigumi atau organisasi rukun tetangga

Membangun mentalitas untuk berani mati, rela berkorban, siap menghadapi bahaya, dan menjunjung tinggi keperwiraan. Jepang memberntuk organisasi kemiliteran, yang terdiri atas :

1. Seinendan, merupakan kelompok pemuda dengan rentang usia antara 14 hingga 22 tahun.
2. Losyi seinendan, adalah kelompok cadangan atau sejenis seinendan yang terdiri dari perempuan.
3. Bakutai, adalah pasukan yang siap untuk pengorbanan maksimal, atau pasukan berani mati

4. Keibodan, adalah kelompok yang membantu polisi yang anggotanya berusia antara 23 hingga 35 tahun. Di Sumatra, mereka dikenal sebagai Bogodan, sementara di Kalimantan disebut Borneo konon Hokokudan.
5. Hisbullah, merupakan barisan semi militer yang ditujukan untuk orang Islam.
6. Heiho, adalah kelompok pembantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia antara 18 hingga 25 tahun.
7. Jawa Sentotai, adalah kelompok pertahanan atau benteng perjuangan di Jawa.
8. Suisyintai, barisan pelopor
9. Peta, atau Pembela Tanah Air, adalah tentara daerah yang didirikan oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943.
10. Gokutokai, merupakan korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember 1944.
11. Fujinkai, adalah himpunan wanita yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1943.<sup>62</sup>

### **3. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Politik**

Berhasil menguasai Indonesia sepenuhnya, Jepang menerapkan kebijakan pertamanya dengan melarang segala bentuk kegiatan berorganisasi. Larangan ini mengakibatkan partai-partai dan organisasi politik di Indonesia harus membubarkan diri, dan jika mereka tetap bertahan, Jepang akan mengambil tindakan tegas. Selain itu, pemerintah Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris, yang kemudian menjadikan bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Hal ini dilakukan untuk pertimbangan praktis dan semata-mata untuk pengamanan usaha perang. Penggunaan Bahasa Indonesia oleh

---

<sup>62</sup> Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia (Dari Era Klasik Hingga Kini)*, Rusdianto (Yogyakarta: DIVA Press, 2014).

masyarakat Indonesia digunakan untuk menggalang persatuan nasional dan memperkuat rasa nasionalisme. Penggunaan Bahasa Indonesia ini juga membantu meningkatkan cinta tanah air dan mengangkat martabat bangsa. Kampanye anti-Barat yang dilakukan oleh Jepang juga mendorong penyebaran tentang konsepsi Indonesia di kalangan rakyat.

Kebijakan lain yang dilakukan Jepang adalah dengan mengizinkan Bendera Merah Putih di kibarkan dan juga lagu Indonesia Raya dikumandangkan.<sup>63</sup>Tidak hanya itu saja, penjajahan Jepang memunculkan fenomena baru bagi bangsa Indonesia, yang tadinya bangsa Belanda lebih menampakkan sikap anti-islam, Jepang justru memperlihatkan sikap “bersahabat” terhadap umat Islam. Jepang mengakui bahwa betapa pentingnya kedudukan umat Islam didalam dunia perpolitikan di Indonesia. Meskipun sikap kedua bangsa penjajah (Belanda dan Jepang) tampak berbeda namun tujuan dari keduanya tetap sama, yaitu: melanggengkan kekuasaan penjajahan di Indonesia.

Sikap “bersahabat” yang di tunjukan Jepang kepada umat Islam pertama kali dengan membentuk gerakan 3A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia) pada bulan April 1942. Gerakan 3A ini dibentuk dengan tujuan untuk memobilisasi rakyat. Sejak juli 1942, didalam gerakan 3A, dibentuk subseksi yang diberi nama “Persiapan Persatuan Umat Islam” yang diketua oleh Tjokroaminoto.

Pada bulan pendaratan pasukan Jepang di Indonesia, sebuah kantor yang biasa di sebut “Shumubu”(Kantor urusan Agama) didirikan di ibu kota, tepatnya pada bulan mei 1942, yang kemudian pada tahun 1944 membuka cabang diseluruh Indonesia. Shmubu berfungsi sama dengan kantor yang dirikan Belanda sebelumnya Kantoer voor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang mana berfungsi sebagai tempat untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan fungsi

---

<sup>63</sup> Yasmis, “Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia,” *Jurnal Sejarah Lontar* 4, no. 2 (2007): 25–26.

departemen dalam negeri, kejaksaan, pendidikan, dan keagamaan umum. Awal mulanya diketuai oleh Kolonel Horei, kemudian Profesor Hoesien Djajani. Mulai tanggal 1 Agustus 1944, jabatan kepala kantor urusan agama diserahkan kepada Kiai Hasyim Ash'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Meskipun pada praktiknya tugas tersebut dilaksanakan oleh putra Hadrastus Syaikh, K.H.A. Wahid Hasyim.

Gerakan tiga A yang didirikan Jepang tidak cukup efektif untuk memobilisasi rakyat, hingga akhirnya dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk badan baru yang disebut "Poesat Tenaga Rakyat (Poetra)" pada bulan Maret 1943. Empat orang terkemuka bangsa Indonesia diangkat menjadi pemimpin yakni : Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara ( Pemimpin dan pendiri taman siswa), dan K.h. Mas Mansoer ( Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah). Kemudian badan baru ini terkenal dengan sebutan "Empat Serangkai".

Pada tanggal 17 Juni 1943 pemerintah Jepang mengumumkan perubahan politik dengan mengundang "Empat Serangkai" dan para pemimpin Indonesia lainnya yang berpengaruh. Akhirnya Saiko Sikkan menetapkan tiga rencana pokok yaitu (1) pembentukan badan pertimbangan pemerintah pusat dan daerah (2) pengangkatan pejabat tinggi bangsa Indonesia (3) pengangkatan bangsa Indonesia menjadi penasihat badan pemerintahan militer.

Pada tanggal 10 November 1943, Kaisar Jepang Tenno Haika mengundang pemimpin pergerakan Indonesia ke Tokyo untuk diberi tanda jasa. Pemimpin gerakan yang datang adalah : Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Bagoes. Ketiganya datang selaku pemimpin dan juga anggota Tjuuoo Sangi-in ( Dewan Penasehat Pusat) yang dibentuk pada awal bulan September 1943 untuk mendukung aktivitas Poetra. Tokoh seperti Kiai Mas Mansoer, Ki Bagoes, Abikoesno, dan Hadratus Syaikh Hasyim Asj'ari yang dapat di sejajarkan dengan tokoh Bung Karno, Bung Hatta dan lainnya, menunjukkan bahwa umat Islam pada masa itu



memiliki posisi dan fungsi strategis didalam menjalankan roda kepemimpinan Indonesia. <sup>64</sup>

Tidak hanya itu saja, dalam menggalang masa dan memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang memperbolehkan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) terus beroperasi, yang kemudian pada akhirnya bubar dan di gantikan dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943, diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan wakilnya Wondoamisino dari PSII. Masyumi didirikan dengan tujuan untuk menaungi seluruh organisasi muslim seperti, Muhammadiyah, dan NU, tetapi juga tidak membatasi semua organisasi Islam bisa masuk asalkan telah diberi status hokum oleh pemerintah militer Jepang.

Pemerintah Jepang menciptakan organisasi Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) merupakan sebuah kemenangan politik Jepang terhadap Islam. Kebijakan ini jika dilihat secara dari luar menunjukkan bahwa Jepang memiliki kepedulian dan sikap pro terhadap Islam. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk kepentingannya agar memperoleh dukungan dari penduduk Indonesia untuk melawan sekutu dengan menjadikan organisasi-organisasi Islam sebagai alat untuk kepentingan bangsa Jepang. <sup>65</sup>

Pada akhir tahun 1944, Jepang memebrikan kesempatan kepada umat Islam untuk membentuk Laskar Hisbullah, yang merupakan kesatuan militer bagi pemuda-pemuda muslim. Lewat Hisbullah, para pemuda dilatih menjadi militer yang teratur. Hisbullah lahir dari lingkungan pesantren NU yang kemudian menjadi milik umat secara keseluruhan. Tidak hanya hisbullah, dibentuk juga barisan sabillah pasukan militer bagi ulama. Sabillah merupakan induk pengayom bagi hisbullah.

---

<sup>64</sup> Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). Hlm 34-36

<sup>65</sup> Miftahur Rohman, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang," *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 02, no. Kebijakan Pendidikan Islam (2018): 15-33.

Pemimpin-pemimpin umat yang selama masa pendudukan kolonial belanda tersisihkan, kemudian masa jepang muncul sangat dekat dan kontak langsung dengan badan pemerintahan tertinggi. Dalam urusan administari pemerintahan, Jepang memberikan peluang dengan mendirikan kantor Shumubu, kemudian untuk latihan fisik dan belajar memegang senjata modern di bentuknya hisbullah dan sabillah. Tidak lagi Jepang tentu saja memiliki maksud lain dari semua kebijakan yang dilakukan yaitu untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan menggunakan realisasi politik yang dikenal dengan “ Nippon” Islamic grassroots policy”. Politik mendekati umat Islam yang dilakukan Jepang karena sadar bahwa Ulama/Kyai memiliki pengaruh besar dikalangan rakyat yang mayoritas muslim.<sup>66</sup>

#### **4. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Pendidikan**

Konsep "Hakko Ichiu" (Kemakmuran bersama Asia Raya) dan semboyan "Asia untuk Asia," Jepang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pilar penting dalam ambisi besar mereka. Hal ini juga tercermin dalam upaya Jepang dalam mengelola sistem pendidikan di Indonesia, yang sangat terkait dengan tujuan mereka. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh Jepang pada masa itu sepenuhnya didasarkan pada motif untuk mendukung keunggulan militer mereka dalam Perang Pasifik. Seluruh struktur pendidikan yang sebelumnya diwarisi dari pemerintahan Belanda digantikan oleh sistem pendidikan yang fokus pada persiapan untuk perang di kawasan Pasifik.

Pada pendudukan Jepang terjadi perubahan signifikan dalam dunia pendidikan yang dimana awalnya sistem penggolongan bangsa maupun status sosial kemudian dihapus dengan terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa perbedaan status sosial. pendidikan mempunyai progresivitas yang lebih dinamis, namun progresivitas itu lebih ditekankan pada latihan fisik bukan mental disiplin. Pendidikan pada masa Jepang

---

<sup>66</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Pencaturan Islam Dan Politik*, Yanuar Ari (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

memiliki tujuan politis yang mana bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan anak-anak dididik untuk menunjang kepentingan mereka dalam perang melawan sekutu.<sup>67</sup>

1. Karakteristik pendidikan masa Jepang adalah :

- a) Penghapusan sistem "dualisme pendidikan" yang merupakan dua sistem pengajaran pada masa Belanda yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra, yang kemudian dihilangkan dan diganti dengan hanya satu sekolah rendah saja bagi seluruh lapisan masyarakat yang disebut sebagai "Kokumin Gakko" yakni sekolah rakyat enam tahun. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada yang diganti namanya menjadi sekolah pertama. Jenjang pendidikannya menjadi : sekolah rakyat enam tahun (termasuk sekolah pertama), sekolah menengah tiga tahun, sekolah menengah tinggi tiga tahun (SMA masa Jepang). Tujuan pendidikan untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (Romusha) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan Jepang. Siswa diharuskan untuk melakukan latihan fisik dan militer. Jepang juga membentuk barisan propaganda Jepang yang disebut "sendenbu" yang bertujuan untuk menyebarkan ideologi baru, ideologi yang menumbangkan ideologi Indonesia.
- b) Mata pelajaran dalam kurikulum yang diajarkan yaitu mata pelajaran umum, seperti : Bahasa Indonesia (Melayu), Sejarah Ilmu Bumi (Geografi), Matematika. Juga mata pelajaran lain, yaitu : Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang dan Kebudayaan Jepang. Disamping ini juga proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Proses pembelajaran diganti dengan kegiatan-kegiatan antara lain : mengumpulkan batu, mengumpulkan pasir untuk kepentingan perang, membersihkan bengkel-bengkel

---

<sup>67</sup> Cucu Sutianah, *Landasan Pendidikan* (Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2022).198

asrama militer, menanam ubi-umbian, sayur-sayuran dipekarangan sekolah untuk kepentingan perang, menanam pohon jarak untuk pelumas. Setiap paginya muris-muris wajib mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan dilatih kemiliteran<sup>68</sup>

- c) Pendidik dilatih untuk mempunyai semangat perang. Sebelum mengajar, pendidik harus mendapat pendidikan (pelatihan) umum dan khusus dalam rangka pengajaran ideologi dan semangat perang. Pelaksanaan pelatihan ini di Jakarta yang dilaksanakan selama tiga bulan. Para guru yang melaksanakan pelatihan ini wajib meneruskan materi kepada teman-temannya. Siswa diajari bahasa Jepang dan lagu-lagu *Gunrei* untuk membangkitkan kecintaan mereka terhadap Jepang.
- d) Pendidikan masa Jepang memiliki kuantitatif lebih buruk dibandingkan masa belanda yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah sekolah. Sekolah dasar yang awalnya berjumlah 21.500 menurun menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menurun menjadi 20, perguruan tinggi dari 4 menjadi tidak beroperasi sama sekali.
- e) Pemakaian Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan juga sebagai bahasa pengantar pada tiap jenis-jenis sekolah. Dengan mengenalkan budaya-budaya Jepang pada semua elemen pendidikan. Bahasa jepang dijadikan bahasa kedua.<sup>69</sup>
- f) Pendidikan guru dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
  - Sekolah guru (SG) selama 2 tahun atau disebut “Syoto Sihan Gakko”
  - sekolah guru menengah(SGM) 4 tahun yang disebut dengan “Guto sihan gakko”

---

<sup>68</sup> Syaharuddin & Heri Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia ( Era Prakolonialisme Nusantara Sampai Reformasi)* (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019).53

<sup>69</sup> Susanto.54

- sekolah guru tinggi 6 ( SGT) tahun yng disebut “koto sihan gakko”.
- g) Pendidikan Islam, Jepang memberikan kesempatan belajar terbuka bagi semua golongan penduduk di Indonesia, semua mendapat kesempatan yang sama. Dalam pendidikan islam ,jepang mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :
- Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang
  - Mendirikan madrasah dan pesantern didaerah daerah terpencil
  - Sekolah negeri dalam berbagai tingkatannya diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
  - Mengijinkan pembentukan Hisbullah, yang mengajar dasar seni kemiliteran bagi pemuda islam dibawah pimpinan K.H. Zainal Arifin
  - Mengijinkan sekolah tinggi Islam di Jakarta dibawah asuhan K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Bung Hatta.
  - Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran
  - Tempat-temapt ibadah didirikan
  - Anak-anak diperbolehkan belajar agama dan mengaji.
- h) Jepang sangat toleran terhadap pendidikan Islam, dan persamaan pendidikan penduduk asli setara dengan anak-anak penguasa. Jepang mengakui sejauh mana pengaruh dan peran Islam di Indonesia. Hal ini karena Jepang memiliki kebijakan tersendiri untuk mendekati umat Islam. Jepang sangat memperhatikan pendidikan Islam, termasuk program-program bagi umat Islam dan dukungan keuangan dari pemerintah Jepang. Lembaga pendidikan Islam memiliki kesempatan untuk memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam kurikulum dan mata pelajaran

mereka. Sekolah dan madrasah dapat secara efektif melakukan kegiatan belajar mengajar, sehingga meningkatkan mutu pendidikan.<sup>70</sup>

- i) Pemerintah Jepang memberikan dukungan keuangan kepada sekolah, pondok pesantren dan madrasah agar mereka dapat menyelenggarakan pendidikannya secara bebas sesuai dengan tujuan kurikulum, terutama melalui penyediaan buku teks dan dana yang ditunjuk dan dialokasikan untuk pengadaan buku dan literatur sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan.<sup>71</sup>
- j) Laki-laki wajib gundul
- k) Adanya latihan baris berbaris

## 2. Jenjang Pendidikan

- Sekolah dasar pada umumnya dikenal sebagai "sekolah umum" atau "sekolah nasional" dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Proses pendidikan di tingkat ini berlangsung selama 6 tahun.
- Jenjang sekolah menengah tingkat lanjut, terdapat beberapa pilihan, seperti sekolah lanjutan pertama (umum) atau SMP, yang juga dikenal sebagai Shoto Chu Gakko. Sekolah ini terbuka bagi semua orang yang memiliki ijazah sekolah rakyat. Selain itu, ada juga sekolah kejuruan menengah seperti sekolah pertukangan atau Kogyo Gakko, sekolah pertanian atau Nogyo Gakko, dan sekolah pelayaran. Durasi pendidikan di SMP adalah 3 tahun setelah menyelesaikan SD.
- Jenjang sekolah menengah tinggi, yang juga dapat diakses oleh semua kelompok, terdapat beberapa pilihan, yaitu:

---

<sup>70</sup> Jumaisa, *Sejarah Pendidikan* (Makassar: Cendikia Publisher, 2022). 108-118

<sup>71</sup> Hudaidah and M. Arman Putra Karwana, "Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang," *Danadyaksa Historica* 1, no. 2 (2021): 97–104, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/article/view/4243>.

Sekolah Menengah Tinggi (SMA) atau yang juga dikenal sebagai Koto Chu Gakko, Sekolah Teknik Menengah atau Kagyo Semmon Gakko dan juga Sekolah Pelayaran Tinggi.

- Hampir semua perguruan tinggi ditutup, yang masih ada ialah sekolah tinggi kedokteran atau Ika Dai Gakko di Jakarta, Sekolah Teknik Tinggi atau Kagyo Dai Gakko di Bandung, sekolah tinggi Pangreh Praja atau Kenkoku Gakuin (sebagai gantinya MOSVIA) di Jakarta dan sekolah tinggi kedokteran hewan di Bogor<sup>72</sup>

#### **E. DAMPAK PENJAJAHAN JEPANG**

Penjajahan Jepang yang awalnya disambut baik oleh masyarakat Indonesia, nyatanya menoreh luka yang paling dalam bagi bangsa ini. Hal ini terlihat dari kebijakan yang diterapkan, terlihat seperti menguntungkan bangsa Indonesia, namun nyatanya untuk memeras bangsa Indonesia untuk tujuan mereka sendiri. Dalam mempertahankan kekuasaannya, semua bisnis pemerintah dan swasta Belanda di Hindia menjadi milik Jepang. Sumber daya ekonomi penting seperti pertambangan, terutama minyak, listrik, telekomunikasi dan transportasi juga menjadi milik Jepang. Selain itu, perkebunan diawasi langsung, bahkan perdagangannya dimonopoli Jepang. Pengusaha Jepang juga langsung mengangani pabrik-pabrik

Dalam upaya memeras tenaga rakyat, praktik yang populer pada masa pendudukan Jepang adalah kerja paksa (romusha). Pemerasan kepemimpinan dan energi diambil untuk melindungi wilayah Jepang yang luas. Tugas romusha adalah menggali lubang pertahanan, membangun benteng, membangun lapangan kerja, dll. Karena kekurangan makanan, kerja keras, dan tempat terpencil, banyak orang meninggal karena kelaparan, penyakit, bahkan kecelakaan

---

<sup>72</sup> Syaharuddin and Heri Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia, Program Studi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*, vol. 53 (Lampung: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019).

Setelah kondisi perang memburuk dan kondisi buruh ( Romusha) di lapangan terdengar oleh rakyat, pemerasan tenaga yang mulnya bersifat sukarela akhirnya menjadi diwajibkan ( dipaksakan). Kepala desa wajib menyediakan tenaga, sehingga banyak petani yang di romushakan, akibatnya ekonomi rakyat semakin parah. Perekrutan romusha dilakukan oleh biro tenaga kerja atau di sebut dengan Romu Kyokai yang tugas utamanya ialah merekrut romusha dan mengirimkan romusha ke tempat romusha bekerja. Biro tenaga kerja dibentuk ini dari pusat hingga keresidenan ( desa). Peran dan tugas kepala desa masa ini untuk merekrut romusha.

Berdasarkan kesaksian dari romusha sebelumnya, proses rekrutmen mereka melibatkan berbagai metode, termasuk upaya persuasi, penipuan, dan dalam beberapa kasus, pemaksaan dan penculikan. Romusha tidak hanya dipaksa bekerja di daerah sekitar mereka, tetapi juga dipindahkan ke lokasi-lokasi di mana Jepang memerlukan tenaga kerja tambahan. Data yang tersedia menunjukkan bahwa banyak romusha yang bekerja di wilayah Jawa, terutama di wilayah Banten Selatan, di mana mereka dieksploitasi untuk kegiatan pertambangan batu bara dan pembangunan rel kereta api untuk meningkatkan produktivitas tambang. Selain tugas mereka di Jawa, romusha juga dikirim ke berbagai pulau di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Thailand, untuk terlibat dalam pembangunan benteng, konstruksi rel kereta api, serta eksplorasi minyak, semuanya bertujuan untuk mendukung upaya perang Jepang melawan Sekutu.<sup>73</sup>

Masa penjajahan Jepang mungkin telah memberikan dampak positif bagi negara, namun kajian ini membahas tentang kemiskinan dan penderitaan masyarakat Indonesia saat itu. Pada bulan Januari 1945, sebuah laporan resmi menggambarkan situasi di Jawa mengalami kekurangan gizi yang menyebabkan kesehatan penduduk sangat memburuk dan diperparah

---

<sup>73</sup> Titin Apriani Putri, M Syaiful, and Suparman Arif, "Propaganda Jepang Dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan Di Indonesia Tahun 1942-1945," *Pesagi* 6, no. 1 (2018): 4-5.



oleh kurangnya obat-obatan dan pakaian yang tidak memadai.<sup>74</sup> Kita juga bisa melihat kebrutalan orang Jepang dari tempat mereka tinggalkan. Misalnya, beberapa gua Jepang di Indonesia. Dikatakan bahwa sebagian besar gua Jepang di sini digunakan oleh mereka sebagai tempat penyiksaan dan penjara bagi penduduk asli yang dianggap bersalah. Tunawisma di kota-kota besar terus meningkat. Tidak jarang mereka kelaparan di jalan atau di bawah jembatan. Masyarakat menderita penyakit kudis, bahan untuk membuat baju sangat sulit ditemukan, bahkan orang menggunakan karung untuk membuat baju. Obat-obatan juga sangat sulit ditemukan. Penderitaan rakyat Indonesia semakin tak tertahankan.

Jepang mengadopsi kebijakan dalam bidang ekonomi yang sering disebut self help. Hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Hasil perekonomian Indonesia adalah modal untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Jepang yang berkuasa di Indonesia. Bagi Jepang, produk perkebunan tidak menjadi perhatian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masa perang. Akibatnya, hasil perkebunan Indonesia anjlok. Jepang memusatkan perhatiannya pada hasil pertanian utamanya padi, dan juga tanaman jarak sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai minyak pelumas mesin-mesin. Dipertanian ini, Jepang melakukan penebangan liar dan skala besar. Di Pulau Jawa, sekitar 500.000 hektar hutan telah ditebang secara ilegal. Penebangan liar dan berlebihan menggerogoti hutan, menyebabkan erosi dan banjir selama musim hujan. Penebangan liar juga memiliki dampak menipisnya sumber daya air. Jadi, meski lahan pertanian meluas, permintaan pangan tetap tidak terpenuhi. Untuk pemenuhan ekonomi perang di bidang pertanian Jepang mengeluarkan kebijakan antara lain:

- Padi berada di bawah kendali langsung pemerintah Jepang. produksi, pengumpulan dan distribusi beras serta penentuan harga. Dalam hal

---

<sup>74</sup> Rizal, "Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945)." Hlm 43

ini, Jepang telah membentuk sebuah badan bernama Shokuryo Konri Zimusyō (Kantor Administrasi Pangan) untuk menentukan harga beras, mengatur produksi dan panen.

- Penggilingan padi dilakukan dibawah pengawasan Jepang
- Keuntungan petani diberikan kepada pemerintah Jepang sebesar 40% dan 30% untuk persiapan pembelian bibit dan lumbung desa, sisanya 40% untuk petani.

Kebijakan pemantauan produksi perkebunan Jepang ditegakkan dengan ketat. Jepang hanya mengizinkan penanaman dua jenis tanaman, karet dan kina. Kedua jenis tumbuhan tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus berhenti tumbuh karena hanya diasosiasikan dengan kesenangan. Padahal, ketiga tanaman ini sangat mudah dijual di pasar dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat tidak menguntungkan rakyat. Menyebarkan sumber daya ekonomi demi perang. Demi menguasai hasil pertanian dan kekayaan rakyat, Jepang selalu menegaskan untuk kepentingan perang. Setiap penduduk harus menyerahkan hartanya kepada pemerintah Jepang. Rakyat harus menyerahkan barang berharga (emas dan berlian), hewan, makanan kepada pemerintah Jepang. Untuk mempercepat kegiatan usahanya, Jepang mendirikan Jawa Hokokai (Pelayanan Rakyat Jawa) dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian).<sup>75</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan petani menurun. Mereka tidak menikmati hasil kerja jerih payah mereka sebagai petani. Karena hasil pertanian mereka harus dijual dengan harga yang ditetapkan Jepang, sehingga hidup mereka menjadi semakin sulit.

Jepang mengontrol komunikasi antar pulau dan luar negeri asing, sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan luar pulau atau luar negeri. Dampak sosial lain yang dialami masyarakat Indonesia adalah ketika mereka disiksa, ditahan dan dipaksa bekerja oleh Jepang. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan Indonesia

---

<sup>75</sup> Dodot Eko, "Pendudukan Jepang Di Indonesia," <http://eprints.dinus.ac.id/>, 2020. 2

yang ditipu kemudian dijadikan wanita penghibur yang dipaksa memuaskan nafsu tentara Jepang. Masyarakat dipaksa untuk menghormati Kaisar Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari. Selain itu, masyarakat Indonesia juga diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Media Museumnusantara, "Pendudukan Jepang Di Indonesia : Latar Belakang, Tujuan, & Dampaknya," Museum Nusantara, 2022.

## **BAB IV**

### **PERLAWANAN PARA HUJAJ MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)**

#### **A. SEJARAH PERLAWANAN**

Pada abad ke-20, kesadaran nasional muncul. Pada periode ini, sejarah mencatat tumbuhnya kesadaran berbangsa dan perjuangan bangsa untuk kemerdekaan. Kebangkitan gerakan di Indonesia ditandai dengan pergeseran kesadaran politik bangsa. Munculnya gejolak pemikiran politik, semangat pergerakan, kesadaran dan bangkitnya kesadaran kebangsaan pada masyarakat muslim Indonesia dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menunaikan ibadah haji membawa ideologi semangat kebangsaan kepada umat Islam Indonesia.<sup>77</sup>

Haji dalam sejarah nusantara memiliki lanskap yang menjadi bagian penting dari perjuangan. Haji sebagai peristiwa keagamaan memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dengan peristiwa budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Ibadah haji juga muncul sebagai salah satu tema sentral wacana kolonial tentang Islam. Ulama yang kembali dari Mekkah, para haji, dianggap akan menimbulkan ancaman Islam terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Timur. VOC juga sependapat. tingkat pertumbuhan ziarah memiliki pengaruh besar pada lanskap politik dan agama saat itu. Hal ini karena tingkat pertumbuhan haji berpengaruh besar terhadap lanskap politik dan keagamaan pada masa itu.

Pada tanggal 8 Maret 1942, tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Bandung. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Propaganda Jepang pada awalnya diterima dengan hangat oleh komunitas Muslim karena keinginannya untuk membebaskan mereka dari penderitaan penjajahan. Namun, sedikit demi sedikit harapan

---

<sup>77</sup> Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016). 105-106

tersebut sirna. Jepang telah mengubah Islam menjadi alat untuk tujuan perang. Segala macam kekerasan, baik seksual, fisik maupun mental, kelaparan, dan penyakit yang kemudian menjadi pemicu besar munculnya perlawanan terhadap penjajahan Jepang.<sup>78</sup>

Sejalan dengan pemerintahan Jepang yang secara berangsur-angsur memantapkan politik penjajahannya di Indonesia. Pada prinsipnya kebijakan kolonial Jepang didasarkan pada model rencana untuk memperkuat minoritas dan melemahkan mayoritas. Dari segi jumlah, penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia merupakan kelompok minoritas sedangkan umat Islam Indonesia merupakan kelompok mayoritas yang dikuasai Jepang. Perlu dicatat bahwa populasi Muslim pada masa pendudukan Jepang di Indonesia diperkirakan sekitar 60.000.000. Dari segi jumlah, Islam sangat menentukan pendudukan Jepang di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan dakwah yang dilakukan Jepang ditujukan kepada umat Islam guna menimbulkan simpati terhadap cita-cita mendukung rakyat Indonesia. Lambat laun masyarakat menderita secara fisik karena kekurangan pangan dan sandang, disertai penderitaan mental akibat sikap dan tindakan aparat pemerintah militer Jepang. Sebagian dari mereka tidak menghormati adat dan tradisi, seperti sebagian umat Islam diperbolehkan melaksanakan salat Jumat, namun sebagian lainnya diperintahkan untuk menjaga jarak dan kaliki sehingga tidak boleh melaksanakan salat Jumat. Demikian pula dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menurut Jepang itu hanya mengurangi hari kerja<sup>79</sup>

Kebijakan-kebijakan Jepang yang sangat merugikan bangsa Indonesia memunculkan perlawanan. Dalam perlawanan inipun para hujaj didalamnya ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan indonesia. Perjuangan para pemimpin bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan tiga metode perlawanan, yakni :

---

<sup>78</sup> Ismail Jakub, *Sedjarah Islam Di Indonesia* (Jakarta: Widjya Djakarta, 1972). 71

<sup>79</sup> Nina Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah* (Jakarta: Lp3s, 2003).153

## **B. BENTUK-BENTUK PERLAWANAN PARA HUJAJ MASA PENDUDUKAN JEPANG**

### **1. Perlawanan Dengan Strategi Kooperasi**

Perlawanan terhadap strategi kooperatif atau strategi kerja sama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan. Pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan yang hanya mengakui organisasi yang mereka dirikan yang ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Para aktivis memanfaatkan organisasi-organisasi yang didirikan Jepang untuk mendorong generasi muda terus berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, konstruksi pembukaan UUD telah berhasil diselesaikan, yang diperlukan jika Indonesia ingin merdeka. Adapun perjuangan bangsa Indonesia dalam strategi kooperasi adalah dilakukan dalam organisasi-organisasi sebagai berikut; Putera ( Pusat Tenaga Rakyat), Jawa Hokokai ( Himpunan Kebaktian Jawa), Majelis Islam A'la Indonesia ( MIAI), dan Majelis Syuro Indonesia ( MASYUMI), Cuo Sangi In ( Badan Pertimbangan Pusat) , BPUPKI dan PPKI<sup>80</sup>

### **2. Perlawanan dengan strategi gerakan dibawah tanah ( Ilegal)**

Munculnya gerakan perlawanan bawah tanah atau ilegal ini disebabkan oleh tangan pemerintah Jepang yang terlalu kuat dalam menekan dan melarang kelompok oposisi. Gerakan nasionalis saat ini tidak dapat menantang kekuatan pemerintah Jepang. Dengan demikian, strategi gerakan rahasia disusun, diatur dengan hati-hati, dan dieksekusi secara rahasia. Mereka diam-diam menyembunyikan diri untuk menghimpun kekuatan rakyat, sekaligus menempa semangat solidaritas dan integritas dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun beberapa kelompok yang menjalankan Strategi dibawah tanah ini antara lain :

#### **➤ Kelompok Sutan Syahril**

Beliau adalah sosok yang kurang dikenal di pemerintahan Jepang. Dia tidak ingin bekerja dengan Jepang dan bahkan melawan fasisme. Kegiatan politiknya antara lain memberikan pelajaran politik kepada mahasiswa di Jakarta. Kemudian buka cabang; Cirebon, Garut, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Malang. Gerakan ilegal yang dipimpin kelompok Syahril itu bertujuan sebagai basis politik untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

---

<sup>80</sup> Moh. Suryana Anwar Kurnia, *Sejarah 3 Smp Kelas IX* (Jakarta: Yudyistira Ghalia Indonesia, 2007). Hlm 19

➤ **Kelompok Kaigun**

Kelompok Kaigun adalah perkumpulan pemuda Indonesia yang erat hubungannya dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut (Kaigun) Laksamana Maeda. Pada awal perjuangan, Grup Kaigun mendirikan asrama Indonesia merdeka di Jalan Kebon Sirih 80, Jakarta. Di asrama inilah anak-anak muda mendapatkan pelajaran sejarah, budaya, politik, hukum, dan pencak silat. Karakter terkenal dari grup Kaigun adalah; Bapak Ahmad Subarjo, Bapak A.A. Maramis, Dr. Samsi, Sudiro, Wikana, dr. Buntaran, M. Gatot dan E. Khairudin

➤ **Kelompok Sukarni**

Kelompok Sukarni adalah kelompok pemuda anti Jepang yang sering mendapat pelajaran politik dari instruktur, seperti; Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Sunario dan Ahmad Subardjo, Chaerul Saleh, Adam Malik, Pandu Kartawiguna dan Maruto Mitimiharja. Mereka tinggal di Asrama Generasi Baru di Jalan Menteng 31, Jakarta.

➤ **Kelompok Persatuan Mahasiswa**

Sebagian besar kelompok serikat mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran yang berkantor di Jalan Prapatan No. 10, Jakarta. Para siswa anti Jepang karena sebelumnya mereka selalu diharuskan mencukur rambut. Kelompok ini bekerja sama dengan kelompok Syahril secara ilegal. Tokoh-tokoh yang berperan dalam kelompok Himpunan Mahasiswa ini antara lain; Syarif Thayeb, Eri Sudewo, J. Kunto and Supeno.<sup>81</sup>

➤ **Kelompok Amir Syarifuddin**

Kelompok ini merupakan kelompok anak muda yang berpengetahuan sosialisme dan selalu menentang kebijakan pemerintah Jepang. Tokoh utama dalam kelompok ini adalah Amir

---

<sup>81</sup> Anwar Kurnia.20

Syarifuddin yang kemudian ditangkap oleh Jepang dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1943, dengan bantuan Seoekarna, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup..<sup>82</sup>

➤ **Kelompok para Santri dan Ulama**

Kelompok ini muncul akibat hal-hal di luar ajaran Islam, antara lain: upacara dengan kiblat di timur laut (Seikeirei), pendewaan Tenno Haika (Kaisar Jepang), upaya Jepang untuk melarang penggunaan aksara Arab dan menggantinya dengan kebiasaan berkerumun orang Jepang. tentara Jepang terhadap Islam seperti; Khomar minum, telanjang di kamar mandi, seks bebas, sabung ayam dan lainnya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Anwar Kurnia. 21

<sup>83</sup> Y. Djoko Raharjo Ratna Sukmayani, Thomas K. Umang, Sedono, Seno Kristianto, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3* (Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 31



### 3. **Perlawanan melalui senjata dan pemberontakan**

Perjuangan muncul akibat reaksi dari kewenangan pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Kebijakan- kebijakan terkait Romusha, perampasan padi, Kelaparan dimana-mana, pelecehan terhadap perempuan Indonesia, membungkukan badan menghadap matahari ( seikerei) yang menimbulkan pertentangan, terkhusus bagi masyarakat Islam Indonesia. Hal inilah yang kemduain memunculkan amarah hingga terjadinya perlawanan dalam bentuk pemberontakan. Perlawanan ini un terjadi dibeberapa daerah diantaranya :

#### 1. **Perlawanan Aceh Terhadap Tentara Jepang**

Perlawanan aceh terhadap tentara jepang salah satunya adalah perlawanan rakyat Cot Plieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dia adalah seorang ulama muda yang mengajar al-qura'an di kabupaten Cot Plieng Aceh. Kekejaman dan kezaliman pemerintah Jepang seperti kekejaman terhadap Romusha yang membuat masyarakat Cot Plieng kemudian melakukan perlawanan. Pada tanggal 10 November 1942 Jepang melakukan serangan Pertamanya ke Cot Plieng sebab Abdul Jalil menolak untuk berdamai. Perjuangan rakyat Aceh dalam menentang pemerintahan militer Jepang dilatarbelakangi oleh perilaku yang tidak bermoral seperti minum dan bermain wanita yang dilakukan pemerintah jepang. Serangan pertama Jepang gagal, yang kemudian kembali menyerang rakyat Cot Plieng dengan cara membakar masjid ketika sholat subuh. Akibat serangan ini banyak rakyat yang tewas, namun Abdul Jalil berhasil melarikan diri. Pertempuran ini kemudian berlanjut hingga tanggal 24 November 1942 dan memakan korban tewas sebanyak 120 orang dan 150 orang terluka. Sedangkan Jepang kehilangan 90 tentara. Pada tanggal 13 november 1942 Abdul Jalil gugur akibat ditembak tentara Jepang. Akibat hal ini, kebencian masyarakat Aceh terhadap Jepang semakin meluas.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Debi Robi Yanti Sigit Sudibyo, Humar Sidik, *Seri Buku Infografis : Pendudukan Jepang Di Indonesia* (Guepedia, 2021). 28

Sebelum itu, perlu diketahui peristiwa-peristiwa yang mengarah pada perlawanan tersebut. Salah satunya kedatangan warga Jepang yang disambut baik oleh Pusat Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan dimotori oleh sayap organisasi Jepang, Fujiwara F-Kikan. PUSA didirikan pada tanggal 5 Mei 1939 dengan tujuan utama mengembalikan Islam ke dasar masyarakat. Oleh karena itu PUSA dikaitkan dengan upaya untuk melemahkan ketidakpercayaan penjajah Belanda. Sedangkan Fujiwara F-Kikan merupakan organisasi yang dipimpin oleh Mayor Fujiwara Iwaichi. Secara resmi, itu adalah F-Kikan atau Organisasi F (Fujiwara). Mayor Fujiwara tidak lain adalah seorang siswa intelijen yang lulus dari Sekolah Intelijen Nakano. Itu disiapkan untuk operasi di wilayah Melayu dan Belanda di Hindia Timur. Sebelum bekerja dengan PUSA, F-Kikan bekerja dengan sayap nasionalis Melayu, Kesatuan Melayu Muda (KMM) melawan kekuasaan Inggris di Malaysia.<sup>85</sup>

Pada Agustus 1942, Tengku Abdul Jalil mulai mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi Jepang. Kejiwaan para santri yang diasuhnya dipersiapkan dengan menceritakan kisah perang sabil, kisah/dongeng yang diyakini masyarakat Aceh memiliki kekuatan untuk menggoyahkan semangat Jihad mencari syahid. Hal ini juga diketahui oleh orang Jepang. Jepang kemudian bertindak dengan memilih jalur diplomasi untuk meyakinkan Tengku Abdul Jalil agar mau menghentikan rencana tersebut. Tindakan tersebut tidak membuahkan hasil, Tengku Abdul Jalil tetap bertekad untuk melanjutkan wasiatnya. Langkah kedua yang diambil pemerintah Jepang adalah mengirimkan delegasi. Rombongan yang dikirim Jepang adalah masyarakat Aceh yang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok priyayi dan kelompok ulama. Namun kedua tindakan Jepang ini tidak menghasilkan apa-apa. Itu akhirnya menyebabkan serangan Jepang pada 10 November 1942.

---

<sup>85</sup> Almas Hammam Firdaus et al., "Perjuangan Perlawanan Rakyat Aceh Terhadap Pendudukan Jepang (1942-1945): Studi Kasus Perang Bayu Dan Perang Pandrah," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 4, no. 2 (2021): 106–10, <https://doi.org/10.24815/jr.v4i2.21907>.

Tidak ada informasi akurat terkait sudah atau tidaknya tengku Abdul Jalil berhaji pada masa itu, namun beliau mempunyai guru seorang hujaj yang bernama Haji Hasan Kreung Kale. Membuktikan bahwa perlawanan atas dasar pertentangan terhadap segala kegiatan yang dilarang didalam Islam merupakan ilmu yang ia dapat dari apa yang ia pelajari. Menunjukkan bahwa hujaj memiliki peran dalam perlawanan yang dilakukan tengku Abdul Jalil.

## **2. Perlawanan Petani Indramayu**

Di Indramayu perbatasan Jawa dan Sunda terjadi perlawanan yang hampir melumpuhkan secara total pemerintahan setempat mulai April hingga Agustus 1944. Indramayu merupakan daerah dengan tingkat religius yang tinggi. Dengan banyak pesantren dan sejumlah besar kalangan berada ( kaya) yang berhasil mengumpulkan harta dalam jumlah yang memadai sehingga mampu untuk menjalankan ibadah haji. Sebagaimana di banyak daerah di Jawa, kaum petani kecil membenci pemerintahan Jepang karena tindakan jepang dalam memeras masyarakat dengan meminta beras dalam jumlah yang banyak. Hingga perlawanan kecil-kecilan pun terjadi yang lazim dijumpai di seluruh pelosok jawa. Namun di Indramayu perlawanan ini berkembang menjadi pemberontakan terbuka. Para petani yang dipimpin oleh haji-haji yang merupakan tuan tanah dan patron yang terkemuka.<sup>86</sup>

Latarbelakang munculnya perlawanan adalah kehidupan masyarakat yang semakin menyusut, rakyat Indramayu kekurangan sandang dan pangan. Di sepanjang Jalan tampak pemandangan yang mengerikan, banyak tulang-tulang kerangka yang bergelimpangan, dan masyarakat hanya memakai pakaian dengan karung goni, sebagai pakaian sehari-hari. Selain hasil bumi sebanyak 200 gram untuk makan seorang sehari, dan 20 kg untuk bibit per hektar, semua hasil bumi harus diserahkan

---

<sup>86</sup> M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa Sejarah Islamisasi Di Jawa Dan Penentangannya Dari 1930 Sampai Sekarang* (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2013). 130

kepada Jepang. Hingga akhirnya terjadi perlawanan di beberapa desa, diantaranya :

### **1) Perlawanan di desa Koplongan**

Pada bulan Maret 1944, di desa Koplongan terjadi pemberontakan akibat kebijakan penyerahan beras Jepang. Bagi warga desa Koplongan, nasi adalah hidup mati. Diberi berarti mati, diambil juga berarti mati. Inilah yang memicu pemberontakan. Mendengar desas-desus pemberontakan, tentara Jepang yang ditempatkan di Cilegon segera memberangkatkan kompi truk melalui desa Kedungbunder, bersama dengan kendaraan polisi lengkap, menuju desa Kaplongan.

Penduduk desa sepertinya tahu apa yang dilakukan orang Jepang sehingga tidak ada yang tidur malam itu dan wanita serta anak-anak mereka dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Para pemuda dikerahkan untuk menggali jalan satu-satunya yang menghubungkan desa Kaplongan dengan desa Karangampel dan Kedokanbunder. Mereka menebang semua pohon besar dan meletakkannya di tengah jalan sebagai penghalang. Senjata yang digunakan adalah bambu runcing, parang, tombak dan keris yang masing-masing diberi jampi oleh Kyai Sulaiman. Kyai Sulaiman merupakan tokoh terkemuka yang dipandang memiliki jimat kekebalan. Pada tanggal 3 April 1944, Camat Karangampel bernama Majanidasastra datang ke desa Kaplongan untuk memanen padi dari H. Aksan yang tidak mau menuruti perintah kepala desa. Karena H. Aksan selalu menolak perintah penyerahan beras, pihak kecamatan Karangampel memerintahkan polisi untuk menangkapnya.

Sejak itu, pemberontakan besar-besaran telah terjadi. Kekecewaan masyarakat setempat atas penangkapan H. Aksan ini membuat marah penduduk desa, yang kemudian berbondong-bondong ke balai desa. Perkelahian antar warga pun terjadi,

banyak korban pihak kepolisian. Sementara itu, di antara warga Desa Kaplongan, empat orang tewas setelah ditembak mati aparat keamanan. mereka adalah: Abu,Hasan, Tobur, Abdul Kadir, Khozin. Pertempuran itu berlangsung selama dua jam. Pada akhirnya Jepang mundur untuk menghindari konfrontasi fisik yang kedua kalinya agar tidak ada lagi korban jiwa. Untuk menenangkan suasana, Jepang mendatangkan Kiai Abbas dari Pondok Pesantren Buntet Tjirebon dan Kiai Idris dari Karangampel dengan maksud menuntut negosiasi dengan rakyat. Masalah tak berhenti sampai di situ, Jepang mengirimkan intelijen ke desa Kaplongan untuk menyelidiki pelaku pemberontakan. Beberapa nama orang terkenal di desa Kaplongan telah masuk daftar hitam militer Jepang. Setelah keadaan menjadi sedikit lebih baik, tentara Jepang menculik tokoh-tokoh penting pemberontakan tanpa sepengetahuan penduduk setempat. Yang mana tokoh-tokohnya adalah Kiai Sidik, H. Ali, H. Nurjaman, H. Aksan, H. Zakaria, H. Abdul Gani, Sutawijaja, H. Maksum, Ki Pinah, H. Hanan, Ki Karsa, Kiai Sulaiman. Semuanya dieksekusi oleh tentara Jepang<sup>87</sup>

## **2) Kerusuhan di Desa Cidempet**

Pemberontakan yang terjadi di desa Kaplongan membakar semangat warga desa Cidempet. Latarbelakang terjadinya pellawanan akibat perampasan padi oleh tentara Jepang. Pada tanggal 6 Mei 1944 terjadilah pemberontakan petani di desa Cidempet yang kemudian merembet keseluruh desa di Indramayu. Adapun wilayah yang melakukan pemberontakan diantaranya :

- Kecamatan Lohbener, yang meliputi desa : Cidempet, Arahan Kidul, Arahan Lor, Pranggong, dan Sukasari

---

<sup>87</sup> Wahyu Iryana, "Protes Sosial Petani Indramayu Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)," *Tsaqofah & Tarikh* 1, No. 1 (2016): 1–90,

- Kecamatan Sindang, meliputi desa Penyindang Kulon, Lamaran tarung, Penyingkiran Kluon, Penyingkiran Kidul, Cangkring Centingi Wetan, Centingi Kulon
- Kecamatan Losarang, meliputi desa : Cemara
- Kecamatan Slijeg, yang meliputi desa : Tugu, Gadingan, dan Slijeg
- Kecamatan Kertasmaya, yang meliputi desa : Babadan Tenajar, Bolon, dan Jambe
- Kecamatan Anjatan, yang meliputi desa : Anjatan, Bugis, dan Salam Darma

Pemberontakan-pemberontakan inipun dipelopori oleh tokoh-tokoh antara lain;

- Haji Madrias, dari Desa Cidempet
- Haji Dulkarim, dari Desa panyindangan Kidul
- Sura dari Desa Sindang
- Karsina dari Desa Sliyeg
- Tasiah dari Desa Pranggong.

Mereka adalah pemimpin dari ratusan bahkan ribuan orang dari desa-desa di seluruh Indramayu. Yang terus membantu sebagai kelompok atas nama solidaritas dengan keyakinan Muslim. Kemarahan rakyat Indramayu membangkitkan semangat juang dan memberontak melawan Jepang. Pemberontakan desa Cidempet meluas sehingga masyarakat Indramayu di masing-masing desa bersatu untuk melawan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indramayu rela mengambil resiko apapun meski nyawa taruhannya. Setelah perlawanan dari desa Kaplongan dan Cidempet, kekacauan menyebar ke seluruh Indramayu.<sup>88</sup> Pelaku sejarah perlawanan menentang penjajahan Jepang umumnya terdiri dari ulama seperti; Kiai Sualaiman, Kiai Srengseng, Haji

---

<sup>88</sup> Fajriudun Mutaqqin, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Bandung: Humaniora, 2015). 95

Akhsan, Kiai Abdul Ghani (Kaplongan), Kiai Madrais (Cidempet), Kiai Muktar (Kertasmaya), Tasiah (Pranggong), Haji Dulkarim (Panyindangan Kidul), Sura (Sindang) dan Karsina (Slijeg).

### 3. Perlawanan di Singarparna, Tasikmalaya

Sebuah gerakan yang dipelopori oleh K.H. Zaenal Mustafa yang merupakan salah satu dari pemerontak pemuda muslim Muhamaddiyah. Pada bulan februari 1944 dibentuk pasukan tempur sukamanan yang dipimpin oleh Ajengan Najminudin. Jepang mulanya mengirim utusan untuk mengadakan perundingan. Utusan tersebut dilucuti kemudian ditahan oleh pengikut K.H Zaenal Mustafa dan menyampaikan permintaan agar pemerintah Jepang memerdekakan Jawa<sup>89</sup>. Jepang menganjak berunding lagi, namun ditolak oleh K.H Zaenal Mustafa. Akhirnya terjadi pertempuran di kampung Sukamanah pada tanggal 24 februari 1944. Latarbelakang terjadinya pemrontakan ini akibat Singaparna yang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang terkenal masyarakat yang religius dan patriotik.

Banyak kebijakan Jepang yang sangat kejam dan juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, kehidupan rakyat yang semakin menderita sehingga mendorong terjadinya perlawanan juga seikerei, yaitu membukuk kepada kaisar Jepang untuk mengungkapkan rasa hormat yang disebarkan oleh pemerintah Jepang membuat orang-orang Singaparna mengangkat senjata melawan Jepang. Kelompok K.H. Zaenal Mustofa melawan musuh dengan memperkuat keyakinan siswa dan bahkan mengajarkan keterampilan bela diri. Melihat hal ini adanya kekhawatiran Pemerintah Jepang dengan segera mengambil tindakan untuk melumpuhkan kekuasaan kelompok-kelompok K. H. Zainal Mustafa. Pertempuran ini dimulai pada hari Jum'at 1944. Karena tentara jepang lebih unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan yang lebih lengkap mereka berhasil mengalahkan pasukan K.H Zaenal Mustafa. Pasukan Jepang menangkap K.H Zaenal Mustafa dan gurunya Kyai Emair beserta 27 pengikutnya yang kemudian dikirim ke Jakarta dan dilakukan Eksekusi mati.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Sardiman, *Sejarah 2 SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Yudyistira, 2008).243

<sup>90</sup> Sigit Sudibyo, Humar Sidik, *Seri Buku Infografis : Pendudukan Jepang Di Indonesia*. 32



#### **4. Perlawanan Kalimantan**

Di Kalimantan, tepatnya di kawasan Pontianak, pemuda Muhammadiyah tergabung dalam kelompok relawan yang mulai berkomplot melawan pemerintah Jepang. Perlawanan dilakukan pada tanggal 8 Desember 1914. Tanggal ini dipilih untuk memperingati 2 tahun kemenangan Jepang atas Sekutu dalam Perang Pasifik tahun 1941. Untuk merencanakan gerakan perlawanan besar-besaran. Sebaliknya, para pemuda Muhammadiyah ini memutuskan untuk bekerja sama dengan Dr. Susilo di Banjarmasin. Namun, rencana itu tidak pernah dilaksanakan. Karena kenpeitai setempat sudah tahu itu. Susilo dan teman-temannya dari Banjarmasin kemudian diburu. Setelah ditangkap, jumlahnya menjadi 20.000. Semuanya dieksekusi mati.

Di Kalimantan Selatan, terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pang Suma, pemimpin suku Dayak yang berpengaruh. Perlawanan dilakukan secara gerilya, yang selanjutnya mengganggu operasi Jepang di Kalimantan. Penyebab perlawanan Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Kedatangan Jepang menyebabkan kekacauan ekonomi yang menyebabkan kelaparan yang meluas.

#### **5. Perlawanan PETA ( Pembela Tanah Air)**

Pada tanggal 3 Oktober 1943, Saiko Sikikan dari tentara pendudukan Jepang mengeluarkan Osamu Seirei No. 44 tentang pembentukan Tentara Relawan Indonesia (PETA). Pengumuman pembentukan PETA disambut hangat oleh anak muda Indonesia. Pelatihan PETA mempertemukan 37.000 orang di Jawa, 1.600 orang di Bali dan 20.000 orang di Sumatera.<sup>91</sup> Diantara perlawanan PETA di Indonesia antara lain:

##### **a.) Perlawana PETA di Blitar**

Perlawanan yang dipimpin oleh Sudaco Supriyadi, Sudaco Mulyadi, dan Dr. Ismail, dipicu oleh penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Jepang. Banyak Romusha meninggal akibat sikap pelatih militer yang angkuh dan hina terhadap tentara Indonesia, pajak yang tinggi bahkan penyitaan hasil

---

<sup>91</sup> Thwin M.C. Ricklefs, Bruce Lockhart, Albert Lau, Portio Reyes, Maitrii Aung, *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer* (Depok: Katalog Dalam Terbitan, 2013).496

pertanian. Perlakuan militer Jepang terhadap perempuan Indonesia menjadi alasan munculnya perlawanan. Pagi hari tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dan lainnya mulai bergerak. Pasukan PETA melancarkan serangan mortir ke Hotel Sakura, yang merupakan kediaman para perwira militer Jepang. Markas Kempetai juga ditembaki senapan mesin. Dalam aksi yang lain, salah seorang Bhudanco PETA merobek poster bertuliskan “Indonesia Akan Merdeka”, dan menggantinya dengan tulisan “Indonesia Sudah Merdeka!”. Setelah Jepang mengetahui gerakan tersebut, mereka segera mengirimkan pasukan, yang semuanya orang Jepang. Pemimpin militer Jepang kemudian memanggil semua anggota Peta yang melakukan penyerbuan untuk segera berhenti dan kembali ke unit utama mereka. Beberapa orang diantaranya mengikuti perintah Jepang, namun mereka yang kembali ke induk pasukannya Justru ditangkap, ditahan, dan siksa oleh polisi Jepang.<sup>92</sup>

Namun perlawanan ini gagal akibat muslihat tipu daya Jepang melalui Kolonel Katagiri (Komandan Pasukan Jepang), yang berpura-pura mengajak berunding yang kemudian Empat Perwira PETA dihukum mati dan tiga lainnya disiksa sampai mati. Sedangkan Sudanco Supriyadi berhasil melarikan diri. Perlawanan PETA di Blitar ini memang gagal namun membawa pengaruh besar terhadap semangat kemerdekaan dari bangsa asing.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Sigit Sudiby, Humar Sidik, *Seri Buku Infografis : Pendudukan Jepang Di Indonesia....*

<sup>93</sup> Mutaqqin, *Sejarah Pergerakan Nasional*. 97

**b.) Perlawanan PETA di Meureudu-Pidie Aceh (November 1944)**

Perlawanan ini dipimpin oleh Perwira Gyugun Teuku Hamid. Latar belakang perlawanan disebabkan sikap angkuh dan kejam pihak Jepang terhadap rakyat pada umumnya dan prajurit Indonesia pada khususnya.

**c.) Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap (April 1945)**

Perlawanan ini dipimpin oleh ketua kelompok (Bundanco) Kusaeri bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang direncanakan dimulai tanggal 21 April 1945 diketahui Jepang sehingga Kusaeri ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusaeri dijatuhi hukuman mati namun tidak terlaksana karena Jepang berada dibawah tekanan sekutu.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wikipedia, "Pendudukan Jepang Di Wilayah Hindia Belanda," Wikioedia.com, 2023.

## **6. Perlawanan Haji Darip**

Muhammad Arif atau yang lebih dikenal Haji Darip merupakan sosok yang sangat disegani di Klender, Bekasi, serta sekitarnya. Haji Darip dikenal sebagai seorang ulama dan mempunyai ilmu silat yang lihai. Keterlibatannya dalam dunia persilatan tidak perlu diragukan lagi. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Haji Darip menyulut semangat para pemuda di Klender dan sekitarnya. Mereka kemudian berkumpul pada Barisan Rakyat (Bara) yang dipimpin oleh Haji Darip. Saat itu, Haji Darip dijuluki Panglima Perang dari Klender. Haji Darip pun terlibat perjuangan merebut kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Diketahui, pasukan tentara Jepang mendarat di Banten pada 1 Maret 1942. Kemudian tentara Jepang memasuki Jakarta. Setelah beberapa bulan tentara Jepang mendarat di Jakarta, keadaan rakyat menjadi sulit. Masyarakat di Jakarta mulai kesulitan mendapatkan bahan pokok. Melihat situasi ini, Haji Darip memimpin masyarakat Klender mengumpulkan para jagoan untuk melakukan perlawanan. Kemudian Haji Darip memerintahkan pasukannya untuk menyerbu dan mengusir tentara Jepang di Cipinang Cempedak, Pangkalan Jati, Pondok Gede, hingga Kali Cipinang. Setelah Jepang menyerah, Belanda serta tentara sekutu berusaha menjajah Indonesia kembali. Haji Darip dan pasukan yang tergabung dalam BARA bersiap mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti yang diamanatkan ketika rapat akbar di Klender oleh Soekarno.<sup>95</sup>

## **7. Perjuangan Laskar Hizbullah**

Awal mula dibentuknya Laskar Hizbullah pada tanggal 13 September 1943, pada saat pertemuan sepuluh ulama. yakni : KH Mas Mansyur, KH Adnan, Abdul Karim Amrullah, KH Mansur, KH Mochtar , KH Chalid, KH Abdul Madjid, KH Jacub, KH Djunaedi dan KH Sodri. Mereka mengajukan permohonan kepada pihak Jepang untuk membentuk sebuah pasukan dengan tujuan menghadapi serangan dari Sekutu. Namun, Jepang tidak menyetujui permintaan tersebut. Hingga setahun kemudian, setelah menyadari besarnya peran ulama, pelajar, dan juga pemuda

---

<sup>95</sup> Tika Widya Utami, "Profil Haji Darip, Jawara Legendaris Betawi Asal Klender Yang Ditakuti Penjajah Jepang Dan Belanda," metro.sindownews.com, 2023.

muslim. Pada tanggal 4 Desember 1944 Laskar Hizbullah diresmikan oleh pihak Jepang.

Laskar Hizbullah awal mulanya dibentuk dengan tujuan untuk mendidik para pemuda Islam dalam kemiliteran. Juga punya tujuan lain yaitu mempertahankan agama. Dibanding dengan badan perjuangan lainnya, laskar hizbullah memiliki anggota yang cukup banyak. Sebab, di tiap –tiap daerah bahkan tiap-tiap pesantren membuat satuan-satuan Laskar Hizbullah.

Laskar Hizbullah memiliki bentuk perlawanan dan perjuangan yang berbeda-beda, baik dari segi dasar perjuangan maupun motif yang melatarbelakangi perjuangan tersebut. Laskar Hizbullah mengolaborasikan antara nasionalisme dan Islamisme dalam sebuah model perjuangan. Artinya, Laskar Hizbullah tidak hanya menempatkan nasionalisme sebagai satu-satunya landasan perjuangannya, tetapi juga menggunakan nilai-nilai Islamisme.<sup>96</sup>

Tempat pelatihan bagi anggota Hizbullah dilakukan di Cibarus, Bogor, pada masa itu tercatat diikuti 500 orang pemuda muslim dari Jawa dan Madura. Di antara delegasi pemuda muslim tersebut, terdapat beberapa kyai muda dari pondok pesantren seperti : K.H. Mustofa Kamil (Banten), K.H. Mawardi (Solo), K.H. Zarkasi (Ponorogo), K.H. Mursyid (Pacitan), K.H. Syahid (Kediri), K.H. Abdul Halim (Majalengka), K.H. Thohir Basuki (Surakarta), K.H. Roji'un (Jakarta), K.H. Munasir Ali (Mojokerto), K.H. Abdullah, K.H. Wahab Wahab (Jombang), K.H. Hasyim Latif (Surabaya), K.H. Zainudin Sulthan Fajar (Jember), K.H. Abdullah Abbas (Cirebon), dan lain-lain.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Heriyanto Heriyanto, "Resolusi Jihad Nu 1945 : Peran Ulama Dan Santri Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Nkri," *Ilmu Sejarah - SI* 2, no. 5 (2017): 756–75,

<sup>97</sup> Verelladevanka Adryamarthanino, "Tentara Hizbullah Indonesia : Pembentukan, Tokoh, Pemberontakan," KOMPAS.com, 2022, Kamis, 02 Maret 2023.

Adapun perjuangan-perjuangan yang dilakukan Laskar Hizbullah antara lain;

### **1.) Karesidenan Kedu dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1944-1947**

Kedu merupakan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Kawasan tempat tinggal Kedu terbagi menjadi dua, yaitu Kedu Utara dan Kedu Selatan. Kedu Utara terdiri dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk Kedu Selatan meliputi Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

Adapun tokoh-tokoh ulama karesidenan Kedu antara lain : KH. Nasuha dan KH. Isom dari Kebumen, KH. Hasbullah dan Kiai Muhammad Ali dari Wonosobo, KH. Nawawi, KH. Mandhur, dan kiai Ali dari Parakan Temanggung, KH. Raden Alwi, KH. Abdullah Fatoni, dan Abdulwahab Kodir dari Magelang, KH. Mukri, kiai Marodi, kiai Damanhuri, Sayyid Muhammad, KH. Jamil, KH. Nawiwi, H. Muchtar, kiai Raden Iskandar, kiai Ahmad Bunya min, KH. Ahmad Syathib. Para ulama inilah yang kemudian mengeluarkan fatwa jihad yang dirunding selama satu hari satu malam dengan melakukan pengkajian dan penilaian yang merata melalui musyawarah. Pada akhir rapat menghasilkan keputusan Fatwa Jihad Ulama Kedu, sebagai berikut:

- 1. Segenap warga NU muslim laki-laki dan perempuan wajib berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan niat Jihad fi Sabilillah bi-nizhom (terorganisasi).*
- 2. Pimpinan Konsul NU dan Laskar Hizbullah Kedu memiliki tanggung jawab dalam mengurus umat dengan memusatkan segenap ikhtiar lahir batin dan tawakal 'alallah dalam perjuangan*

3. *Pimpinan “Majelis Syuro Muslimin Indonesia” daerah Kedu, akan dibebani tanggung jawab atas terselenggaranya kekompakan Laskar Hizbullah seluruh daerah*
4. *Kedu sebagai alat perjuangan bersenjata secara terorganisasi*

Fatwa ini ini diharapkan untuk kemudian menciptakan kesadaran bagi semua rakyat untuk menolak penjajah. Fatwa Jihad ini berdampak pada lahirnya gerakan sosial disetiap lapisan masyarakat. Sehingga menimbulkan perlawanan. Perlawanan Laskar Hizbullah Kedu diantaranya :

**a. Peristiwa Tiga Hari di Magelang**

Sejak 5 Oktober 1945, penduduk Magelang dan barisan kelaskaran mulai bersiap untuk mengepung markas Jepang di Magelang. Mereka ditempatkan di pos jaga penting. Saifudin Zuhri bersama prajurit Hizbullah mengambil posisi di jalan raya pasar Magelang yang dilindungi Gunung Tidar. Dan untuk Laskar Hizbullah Magelang yang dibawah pimpinan Haji Said mengambil posisi di Masjid Jamik Magelang. Pasukan lainnya mengepung Kedobutai (kekuatan utama). Militer Jepanglah yang menguasai daerah sekitar stasiun dan jalan raya Poncol. Mendengar situasi di Magelang terlalu genting, tentara Hizbullah dari daerah kediaman Kedu terus berbondong-bondong ke Magelang. Pejuang Hizbullah dan jajaran kiai, pimpinan pesantren di wilayah Kebumen dan Purworejo, langsung berangkat ke Magelang untuk bergabung dengan pejuang Hizbullah lainnya.

Pada 12 Oktober 1945, diadakannya perundingan antara pemerintah, militer, para pemimpin perjuangan, dan

badan-badan militer, termasuk Laskar Hizbullah. Perundingan menghasilkan keputusan untuk Jepang melakukan penyerahan senjata-senjata kepada rakyat Indonesia. Setelah perundingan, rakyat yang sudah emosi terhadap Jepang melakukan tindakan anarkis. Pada tanggal 13 Oktober 1945, penduduk Kedu di Magelang mulai melucuti senjata tentara Jepang. Semua rakyat Kedu berkumpul untuk mengepung markas Jepang di Magelang. Jepang berusaha mempertahankan diri dengan enggan menyerahkan senjata kepada rakyat Magelang. Melihat bentrok yang tak terhentikan kemudian diadakan perundingan antara kedua pihak. Namun sampai akhir perundingan tidak mendapat titik temu. Akhirnya pada tanggal 14 Oktober 1945, pertempuranpun terjadi. Serangan rakyat pertama ditunjukkan kepada penjagaan tentara Jepang. Yang kemudian dilanjutkan pada beberapa gedung-gedung yang dikuasai oleh Nippon. Rakyat Magelang secara serentak melakukan tawuran massal dengan tentara Jepang sebab pertempuran ini tanpa koordinasi yang jelas. Rakyat Magelang dan badan-badan kelaskaran termasuk Hizbullah-pun hanya memakai senjata seadanya seperti bambu runcing, pedang, badik, clurit, tombak dan panah.<sup>98</sup>

#### **b. Lima Hari di Semarang**

Sejak pecahnya perang pada tanggal 15 Oktober 1945 di Semarang, hal ini ternyata mengundang pasukan dari luar daerah. Tentara Laskar Hizbullah yang baru saja menyelesaikan pelucutan senjata pada 12, 14, dan

---

<sup>98</sup> Lukman Hidayat & Ufi Saraswati, "Bentuk Perjuangan Laskar Hizbullah Karesidenan Kedu Dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1944-1945," *Journal Of Indonesian History* 9, No. 2 (2020): 149–53.



15 Oktober langsung bergabung ke front Semarang. Laskar Hizbullah Kedu yang dipimpin oleh Saifudin Zuhri membawa kompi pasukan terpilih. Barisan Sabilillah Kedu sebagai pendamping dan penasehat Laskar Hizbullah mengirimkan 10 orang ulama. Kiai-kiai dipimpin langsung oleh pemimpin besar Barisan Sabililla yakni KH. Mandhur Temanggung. Yang diutus adalah kiai yang disebut-sebut memiliki kelebihan, yakni ahli gerakan ruh dan pendekar silat. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kekuatan internal dan moral Laskar Hizbullah.

Pertempuran tidak seimbang ini memakan banyak korban dikalangan penduduk. Tercatat sekitar 1.500 rakyat gugur sebagai syahid dalam perang tersebut, sementara korban dari pihak Jepang hanya mencapai ratusan. Berakhirnya “Pertempuran Lima Hari”, Laskar Hizbullah Kedu meninggalkan font Jatingaleh dan mengambil Ungaran sebagai Markas Komando.

### **c. Perang Sabil Ambarawa**

Tokoh Masyumi dan pendiri Nahlatul Ulama, KH. Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan ulama dari Jawa dan Madura, termasuk tentara Hizbullah. Dari pertemuan tersebut muncul kesepakatan yang dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Pertemuan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari respon para ulama daerah yang tercermin dalam ketetapan para ulama dan militer Kedu Hizbullah tentang jihad membela tanah air. Pada akhir September, Majelis Konsuler NU dan Ulama se-Kedu bersama Laskar Hizbullah mengeluarkan resolusi tentang Jihad. Hal ini kemudian mendapat respon positif dari seluruh Ulama di daerah lain, bahkan di seluruh Jawa dan Madura. Hasil keputusan Saifudin Zuhri ini telah disampaikan

kepada KH. Wahid Hasyim. Ini kemudian berdampak pada rencana pemukiman Ulama yang lebih besar.<sup>99</sup>

Menjelang pengejaran ke Ambarawa, tokoh-tokoh besar menuju kota Parakan terlebih dahulu untuk menjalin komunikasi. Di antara tokoh-tokoh yang berkumpul antara lain pimpinan Masyumi KH. Wahid Hasyim, pimpinan Laskar Hizbullah Kedu Saifuddin Zuhri, pimpinan Barisan Sabilillah Kedu KH. Mandhur, Pimpinan Pusat Pasukan Hizbullah Zainul Arifin, Pimpinan Front Pemberontak Indonesia, dan Panglima TKR Divisi V/Banyumas Sudirman serta pasukan TKR dari beberapa daerah dan TNI lainnya. Mereka berbondong-bondong ke Parakan dengan menaiki truk, kereta api dan ada juga yang berjalan kaki. Mereka yang menaiki KA tersebut berasal dari organisasi asosiasi dari Cirebon, Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Surabaya, Solo, dan Yogyakarta. Sedangkan yang biasa menumpang truk hasil jaranan Jepang adalah dari Laskar Hizbullah. Dan beberapa yang memutuskan untuk jalan kaki datang dari para pendekar di sekitar Kedu, karena jaraknya cukup terjangkau.

Hari-hari pengejaran dan pengepungan di Pertempuran Ambarawa tak terelakkan. Mulai pada tanggal 26 November-29 November 1945, jumlah hari pertempuran dihitung 4 hari 4 malam. Banyak anak muda yang tidak paham bahwa pertempuran ini sudah berlangsung sejak Secang Magelang. Dalam pengetahuan mereka terkait pertempuran ini hnay berhubungan dengan pertempuran yang terjadi di Semarang. Jalannya Pertempuran Ambarawa yang dimulai pada pagi hari tanggal 15 November 1945 semakin sengit. Garis depan diperluas di kedua sisi. Tentara Gurkha keluar dari

---

<sup>99</sup> Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*. (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2013). 317-318

persembunyiannya dan membakar rumah-rumah penduduk. Tak sedikit rumah warga Tionghoa yang dibakar tentara Gurkha. Selain itu serangan udara juga mendominasi pihak Gurkha atau Sekutu selama 4 hari menyerang posisi Republik. Siang hari sebelumnya datang lagi penyerangan sekutu dari arah Semarang, bala bantuan sekutu membawa tank dan truk ke Banyubiru. Partisipasi para napi ( narapidana) dari LP Ambarawa turut menghiiasi perjuangan Republik ini. Sekitar 200 orang dibebaskan dari penjara Ambarawa untuk mendapatkan izin menggunakan senjata dan bergabung dengan TKR. Orang-orang narapidana dari Bedono juga meramaikannya. Pada 26 November 1945, serangan pejuang Republik semakin intensif . Peluru artileri diarahkan ke gedung-gedung markas Sekutu. Sebelas tembakan dilepaskan, termasuk sasaran yang meruntuhkan bagian atas katedral, yang saat itu menjadi basis pertahanannya. Saat itu kondisi Sekutu sedang berfoya-foya dengan wanita. Serangan ini merupakan balasan dari hari sebelumnya yakni 10 pesawat tempur Sekutu yang telah menjatuhkan torpedonya ke area persawahan warga. Sementara itu Sekutu semakin menambah pasukannya, dari 6 pesawat tempur ia menyuplai amunisi berupa bahan-bahan makanan dan senjata yang tidak sedikit. Dua jam pertempuran pada 26 November 1945, hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada pertahanan Republik. Namun 2 tentara tewas dan 6 luka berat.

Pada tanggal 27 November 1945 para pejuang membantu. Sepuluh kyai dari Kebumen ( Banyubiru) menyerbu ke jurusan Ambarawa. Mereka merasa tidak cukup jika hanya mendoakan saja , dan juga merasa memiliki bertanggung jawab atas tegakknya kemerdekaan. Para kyai Kebumen tersebut memutuskan terjun ke medan pertempuran dengan ratusan

pengikutnya yang setia. Sebelum penyerangan massal di kota Ambarawa, tercatat sebanyak 31 alim ulama dari Ambarawa dan sekitarnya bergabung dengan prajurit lain di medan perang. Mereka adalah : KH. Hasyim (Reksosari Suruh), KH. Wahab (Reksosari Suruh), KH. Dahlan (Reksosari Suruh), KH. Zainal Makarim (Reksosari Suruh) KH. Iskak Dasuki (Suruh), KH. Mansur (Ploso Suruh), KH. Abu Darrin (Plumbon), KH. Djufri (Tingkir Lor Salatiga), KH. Musyaffak (Susukan), KH. Ghozali (Nobo Bener), Kyai Dahlan (Cabean Salatiga), Kyai Ashari (Bener), KH. Qomar (Pabelan), KH. Daqok (Pulutan Salatiga), KH. Ahmad (Bringin), KH. Sholeh (Pakis Bringin), KH. Daqwan (Jambu), KH. Abdullah (Pingit Bedono), KH. Hambali (Ambarawa), KH. Sofwan (Doplang Ambarawa), KH. Chudlori (Jambu), KH. Abu Amar (Cabean Salatiga), KH. Masyhuri (Kebumen Banyubiru), KH. Abdul Jalan (Bedono), Kyai Masrur (Kupang Kidul Ambarawa), KH. Baghowi (Nglembu Banyubiru), Kyai Adnan (Ambarawa), Kyai Hamam (Ambarawa), Kyai Efendi (Grogol Tuntang), Kyai Syukur (Ungaran) dan KH. Djuwaidi Tenganan.

Pertempuran yang berlangsung hampir 20 hari dari akhir November hingga pertengahan Desember 1945 sangat sengit. Medan perang telah menjadi tempat penderitaan karena banyak kerusakan dan kehancuran dapat dilihat dari dinding bangunan yang berlubang, rumah yang roboh, pohon tumbang, bau bubuk mesiu tercium dimana-mana. Juga diperparah dengan bau busuk yang menyengat kemana-mana,

bau tersebut berasal dari mayat-mayat yang masih dibiarkan begitu saja.<sup>100</sup>

## **2.) Laskar Hizbullah Karesidenan Surabaya Dalam Peristiwa Pertempuran 10 November 1945 Di Surabaya**

Pada 10 November 1945, pasukan Hizbullah yang bertugas jaga sejak pukul 03.00 tetap berada di posisi sekitar Jalan Jembatan Merah menuju Jalan Gresik. Pasukan Hizbullah mendatangkan 7 kompi dari markas jalan Kepanjen. Menurut perhitungan Hizbullah yang memperkirakan bahwa Inggris di Tanjung Perak akan bergerak ke selatan mulai pukul 6 pagi. Pasukan Inggris mulai menyerang bagian utara Surabaya, menembakkan senjata dari kapal perang mereka, yang disusul oleh bombardemen dari atas pesawat. Ledakan dari senjata itu sangat dahsyat dan berlangsung sekitar tiga jam. Sedangkan pasukan Hizbullah bersama TKR dan lainnya hanya bertahan dengan musuh menggunakan tank dan kendaraan lapis baja yang bergerak lebih cepat.

Infanteri ke-9 India yang memimpin penyerangan dari arah barat Sungai Semampir mendapat perlawanan sengit dari pasukan Hizbullah yang bercampur dengan pasukan TKR, para pejuang Surabaya ditembak dari tempat persembunyian dengan senjata gas kecil. Dalam pertempuran ini, Inggris terus melakukan pengeboman terus menerus untuk menghancurkan pasukan Hizbullah dan mengembalikan wilayah Surabaya Utara ke tangan Inggris. Mengalahkan pasukan Hizbullah tidaklah mudah, karena mereka terus berusaha menyerang pasukan

---

<sup>100</sup> Ahmad Hidayatullah and Miftahul Khoiri, "Pergerakan Ulama Dan Santri Dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan Di Ambarawa 1945," *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam* 2, no. 1 (2022): 55–84, <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i1.11977>.

Inggris meski dalam keadaan darurat dan tetap bertahan di daerah Kebon Rojo, sekitar kantor Pos besar. Saat itu pasukan Hizbullah dari Surabaya Utara yang awalnya dikepung di Botoputih dan Pegirian mundur ke Rungkut bersama pasukan Hizbullah dari Timur melalui Rengkah, Pacarkeling, dan Panjangjiwo. Markas pertahanan Hizbullah terletak di Jalan Kepanjen Road. Namun keunggulan masih berpihak pada Hizbullah karena basis ini telah dibebaskan. Semua pasukan maju ke depan di pangkalan, hanya tim medis yang melakukan pengiriman obat. Beberapa dari mereka terluka, 2 meninggal.<sup>101</sup>

Jika melihat perlawanan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di atas, berbagai bentuk perlawanan mulai dari Perlawanan dengan strategi kooperasi yang merupakan perlawanan dengan strategi kerja sama yang muncul akibat Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan, perlawanan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh dengan memanfaatkan organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang. Perlawanan dengan Strategi Gerakan dibawah Tanah ( Ilegal) yang dilakukan oleh beberapa kelompok secara diam-diam dan sembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat, juga menanamkan semangat persatuan dan kesatuan perjuangan kemerdekaan. Hingga perlawanan dalam bentuk pemberontakan.

Dari perlawanan yang terjadi menunjukkan bahwa Kiprah umat Islam dalam memerdekakan Indonesia cukup besar , terutama bagi mereka yang sudah berhaji dalam membangun jiwa nasionalis dalam merebut kemerdekaan. Bahkan *Douwes Dakker* mengatakan “*jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejaranya sehingga*

---

<sup>101</sup> Rifqil Fuadi, “Laskar Hizbullah Karesidenan Surabaya Dalam Peristiwa Pertempuran Sekitar 10 November 1945 Di Surabaya,” *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014): 571–85, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/29/article/view/9188>.

*mencapai kemerdekaan*” ulama- ulama Nusantara yang berhaji pada abad ke-19 dilandasi dengan identitas kebangsaan dan anti penjajahan. Perjalanan ibadah haji selain merupakan ibadah dalam arti sempit, telah mempunyai beberapa fungsi penting lainnya bagi umat Islam Indonesia. Hajilah yang mempersatukan umat Islam Indonesia dengan seluruh umat Islam dunia, hajilah yang merupakan saluran komunikasi dan informasi yang terpenting. Makkah, selain kiblat, juga merupakan jendela untuk melihat dunia luar dan sumber pemurnian dan pembaharuan agama. Ibadah haji memberi dampak yang cukup penting bagi jamaah haji Indonesia karena selain belajar ilmu agama dari Timur Tengah juga menambah ilmu tentang perpolitikan untuk mengusir penjajah dari tanah airnya. Hal inilah yang kemudian diaplikasi dengan banyaknya ulama yang kembali dari tanah suci membangun Pesantren. Yang pada akhirnya melahirkan orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi.

### C. KLASIFIKASI TOKOH-TOKOH HAJI

Adapun Klasifikasi tokoh-tokoh haji yang ikut andil dalam perlawanan yang terjadi, baik perlawanan secara Kooperatif, perlawanan dengan strategi dibawah tanah ( Illegal), maupun dengan dengan Strategi pemberontakan. Bukan hanya itu , Tokoh-tokoh ini juga memiliki peran penting dalam aspek lain yang menunjang kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang , diantaranya :

No	Nama Tokoh	Peran
1	K.H Hasyim Asy'ari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada 1899, K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan Pesantren Tebuireng yang awalnya santrinya hanya berjumlah 8 orang lalu tiga bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang.</li> <li>- Pendiri Nahdlatul Ulama</li> <li>- KH Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan</li> </ul>

		<p>pasukan Belanda dan sekutu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikut serta dalam pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Suroboyo, pada tanggal 10 November 1945.</li> <li>- Kontribusi besar K.H. Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yaitu menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar Negara Indonesia yang baru lahir. KH Hasyim Asy'ari, memberikan petunjuk kepada para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar Negara Indonesia, yang pada akhirnya menyepakati penghapusan tujuh kata pada Piagam Jakarta.<sup>102</sup></li> </ul>
2).	K.H.Wahid hasyim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 1944 mendirikan sebuah Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang saat itu pengasuh sekaligus pimpinannya dipegang oleh K.H. A. Kahar Moezakkir</li> <li>- Memimpin dalam gerakan reformasi dibidang pendidikan pada waktu itu, dengan menggabungkan pola pendidikan pesantren Melakukan gerakan pembaruan dalam bidag pendidikan pada masanya. Yakni dengan memadukan model pendidikan pesantren yang fokus pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasik diubah dengan sistem bimbingan belajar.Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda</li> </ul>

<sup>102</sup> Moh. Syafii, "Biografi KH Hasyim Asy'ari: Asal, Silsilah, Pemikiran, Hingga Perjuangan," Tempo.co.id, 2021.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada usia 25 tahun, Wahid bergabung dengan Majelis Umat Islam A'la Indonesia (MIAI), sebuah federasi ormas dan partai Islam saat itu. Setahun kemudian, Wahid menjadi ketua MIAI.</li> <li>- Tahun 1945 dalam usia 23 tahun menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Wahid Hasyim dengan refleksi yang tak terhitung banyaknya tentang agama, negara, pendidikan, politik, masyarakat, NU dan pesantren telah menjadi lapisan sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun</li> <li>- Penggagas sila "Ketuhanan Yang Maha Esa"</li> <li>- Pada 24 Oktober 1943, ia diangkat menjadi ketua Partai Majelis Umat Islam Indonesia Syuro (Masyumi) menggantikan MIAI. Sebagai pemimpin Masyumi, ia memelopori pembentukan Front Hizbullah untuk mendukung perjuangan kemerdekaan umat Islam.<sup>103</sup></li> </ul>
--	--	---

---

<sup>103</sup> Taufik Abdullah, *Mentri-Mentri Agama RI Biografi Sosial-Politik* (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998).83-113

3)	K.H. Agus Salim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendirikan Hollands Inlandse School (HIS). Keistimewaan sekolah ini adalah menanamkan pendidikan kebangsaan dengan tujuan agar anak tidak merasa minder.</li> <li>- Menjadi anggota Volksraad pada tahun 1924, dengan alasan bahwa dewan ini merupakan tempat menyampaikan kehendak rakyat serta nasihat hukum dan demokrasi untuk menyampaikan tuntutan kepada penjajah Belanda.</li> <li>- Tahun 1927 mewakili Indonesia di Mekkah pada World Islamic Congress.</li> <li>- Anggota Panitia Sembilan Orang Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan menyusun UUD 1945</li> <li>- Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947</li> <li>- Pada periode 1946 - 1950, beliau bak bintang terang di kancah politik Indonesia, sehingga sering dijuluki "Orang Tua Hebat" (The Grand Old Man).<sup>104</sup></li> </ul>
4).	K.H. Ahmad Sanusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiri Pesantren Syamsul Ulum, Sukabumi.</li> <li>- Mendirikan organisasi sosial keagamaan "Al-Ittihadijatul Islamijjah" pada tahun 1931 di Batavia Cetrum</li> </ul>

---

<sup>104</sup> MPB. Manus et al., *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993). 65-68

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru pada program Alim Ulama tahun 1943, kemudian tahun berikutnya menjadi dewan penasehat Bogor. rumah besar</li> <li>- Akhir tahun 1944 menjadi wakil residen atau Fuko Shucokan di tingkat daerah</li> <li>- Berperan dalam pembentukan PETA di kawasan pemukiman Bogor dan Sukabumi.</li> <li>-Anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945. Dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI</li> </ul>
5).	K.H. Masjkoer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 1923 di Singosari Masjkoer membuka sekolah madrasah yang diberi nama Misbachoel Wathon (Pelita TanahAir)</li> <li>- Pada masa pendudukan Jepang Pada masa ini, Masjkoer diangkat menjadi anggota Syuu Sangi-Kai, semacam dewan daerah yang mewakili rakyat.</li> <li>-Anggota Badan Pembantu Prajurit (BPP) untuk daerahnya.</li> <li>-Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.</li> <li>- Pendiri Pembela Tanah Air (Peta) - kemudian menjadi bagian dari Tentara Rakyat dan TNI - di seluruh Jawa</li> <li>- Pemimpin barisan Sabilillah pada pertempuran 10 November 1945</li> <li>- Anggota PPKI (1944)<sup>106</sup></li> </ul>

<sup>105</sup> Sulasman, "Kyai Haji Ahmad Sanusi," *Jurnal Sejarah Lontar* 5, no. 2 (2008): 35–45, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/view/2398>.

<sup>106</sup> Manus et al., *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. 84-89

6).	K. H. Noer Alie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 1937 mendirikan organisasi persatuan pelajar Betawi Mendirikan pesantren diujung Malang Bekasi pada tahun 1940</li> <li>- Pada masa perjuangan kemerdekaan, KH Noer Ali mempersiapkan murid-muridnya dengan mengikutsertakan mereka dalam kursus latihan kemiliteran yang didirikan oleh Jepang. Sebagai seorang ulama, Noer Ali tak puas berdiam diri. Ia menjadi "singa" di medan perang. KH Noer Ali memimpin tentara rakyat untuk berebut kekuasaan</li> <li>-Pernah menjadi Komandan Batalin Tentara Hizbullah Bekasi.<sup>107</sup></li> </ul>
7).	K. H. Moedzakkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergabung dalam partai Islam Indonesia (PII)</li> <li>- Pada tahun 1938 aktif di Muhammadiyah dan mengajar di muhalimin muhammadiyah Yogyakarta.</li> <li>- Menjadi ketua delegasi muslim Indonesia ke Tokyo pada tahun 1939</li> <li>- Menjadi anggota Majelis Rakyat Indonesia (MRI) dan merangkap sebagai pegawai militer Jepang di Yogyakarta khususnya bagian ekonomi tahun 1942-1943</li> <li>- Tahun 1943-1945 bekerja sebagai pegawai markas besar militer Jepang bagian siaran luar negeri di Jakarta.</li> <li>- Anggota BPUPKI</li> </ul>

---

<sup>107</sup> Verelladevanka Adryamarthanino, "Kiai Haji Noer Alie : Kiprah Dan Perjuangan," KOMPAS.com, 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salah satu pendiri Sekolah Tinggi Islam ( STI), pada akhir pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia ( UII)<sup>108</sup></li> </ul>
8).	Haji Teuku Mohammad Hasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergabung dengan Organisasi Islam Muhammadiyah sebagai konsul di bawah R.O. Armadinata. Muhammadiyah saat ini telah berhasil mendirikan perkumpulan perempuan yaitu Aisyiyah, Hizbul Wathan, dan lembaga pendidikan setingkat Hollandsch-Inlandsche School atau HIS. Perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah juga mendirikan cabang di beberapa kota lain di Aceh. Tercatat pada akhir pemerintahan Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di Aceh sebanyak 8 (delapan).</li> <li>- Menggagas berdirinya Atjehsche Studiefonds (Dana Pelajar Aceh) untuk membantu anak-anak Aceh yang pintar tapi tidak bisa sekolah.</li> <li>- Menjadi pengurus sebuah organisasi pendidikan bernama Perkumpulan Usaha Kemajuan Anak (PUSAKA).</li> <li>- Sebagai ketua Koperasi Pertanian Pegawai Negeri Medan, ia kemudian menjadi Penasihat dan Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Medan dan Kepala Dinas Tinzukyoku (Kantor Penegakan Gunaibu) Medan. Periode 1942-1945</li> </ul>

---

<sup>108</sup> Manus et al., *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. 45-47

		- Pada tanggal 7 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai ketua. <sup>109</sup>
9).	K.H. Tubagus Ahmad Chatib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam upaya memajukan agama dan umat, ia menggagas pendirian Majelis Ulama, Perusahaan Alim Ulama (PAU).</li> <li>- Mendirikan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Maulana Yusuf yang di kemudian berganti nama menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.</li> <li>- Menangani administrasi dan pemerintahan sipil di Banten, tahun 1945</li> <li>- Pada zaman Jepang, ia bergabung dengan Pasukan Bela Diri Indonesia (PETA).<sup>110</sup></li> </ul>
10).	KH. Syam'un	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membina dan memimpin pesantren Citangkil pada tahun 1916-1923 yang kemudian angkatan pertama melahirkan 15 Kiai yang membantu KH. Syam'un dalam meneruskan perjuangannya.</li> <li>- Pada tanggal 5 Mei 1925, ia mengubah sistem pesantren menjadi madrasah. Yang diberi nama "Madrasah Al-Khairiyah"</li> <li>- Bergabung sebagai anggota Pembela Tanah Air (PETA. Dalam PETA, KH. Syam'un berposisi sebagai Dai Dan Tyo yang</li> </ul>

<sup>109</sup> Ahmad Nur Rosikin, "17 Agustus - Seri Pahlawan Nasional: Teuku Muhammad Hasan," *Tribun News*, 2019.

<sup>110</sup> Mufti Ali, *KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966) Jalan Hidup Dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten* (Serang, Banten: Yayasan Bhakti Banten, 2020).

		<p>membawahi seluruh Dai dan PETA di wilayah Serang.</p> <p>-Pimpinan Brigade I Tirtayasa Badan Keamanan Rakyat (BKR) berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi Divisi TNI Siliwangi. Anggota BKR di Banten antara lain mantan anggota PETA, Heiho, Hizbullah, Sabilillah, API dan bentuk partisipasi lainnya.<sup>111</sup></p>
11).	Kyai H. Abdul Halim	<p>- Pada tahun 1916, beliau mendirikan organisasi Islam bernama Persyarikatan Ulam, kemudian pada tahun 1937 cabang organisasi ini menyebar ke seluruh Indonesia.</p> <p>- Bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), kemudian berganti nama menjadi Masyumi</p> <p>- Ketika pendudukan Jepang dimulai, beberapa partai dan organisasi politik dibubarkan, termasuk Ikatan Ulama. Namun, Abdul Halim terus berusaha menghidupkan kembali organisasinya. Usahnya berhasil pada tahun 1944, namun namanya diubah menjadi Perikatan Oemat Islam (POI).</p> <p>-Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Cuo Sangi In (Dewan Perwakilan).</p> <p>- Pada Mei 1945, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).</p>

<sup>111</sup> Nasaruddin Umar, *Rethinking Pesantren* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014). 99-108

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di BPUPKI, Abdul Halim adalah anggota Panitia Bela Negara</li> <li>- Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)<sup>112</sup></li> </ul>
12).	K.H. Mas Mansur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tanggal 9 maret 1943 Mas Mansur bersama Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantara yang dijuluki 4 serangkai (Si'in) oleh Sukarjo Wiryopranoto menduduki posisi kunci utama gerakan PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat (Jawaminshu soryoku kesshu undo) yang diresmikan Gunseikan di Lapangan Ikada, Jakarta</li> <li>- Pada tanggal 5 September 1943, Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi) mendirikan Chuo Sangi-in, yaitu Dewan Pertimbangan Agung yang diketuai oleh Bung Karno. Mas</li> </ul>

---

<sup>112</sup> *Ensiklopedia Pahlawan Indonesia Dari Masa Ke Masa* (PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=OqV7A3brtCcC>. 244-245



	<p>Mansur adalah anggota dari Chuo Sangi-in yang beranggotakan 24 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mas Mansur dan Bung Hatta menangani masalah umum dalam negeri di pusat.</li> <li>- Sampai tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran Surabaya. Peperangan ini pecah karena masyarakat Surabaya mengabaikan ultimatum Mayjen M.C. Mansergh yang akan menyerang Surabaya dari berbagai arah jika semua pemimpin Belanda tidak mau menyerah. Seminggu kemudian, Inggris menguasai wilayah utara Surabaya, tempat Mas Mansur bemarkas. Meski tubuhnya lemah dan banyak luka tembak menembus dinding rumah, Mas Mansur tetap tenang. Memang saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk berjuang, namun Mas Mansur tumbuh di belakang layar. Dia tidak langsung maju ke depan. Namun, banyak anak muda yang menyelip untuk berkonsultasi dan meminta nasihatnya.</li> <li>- Aktif di SI, kemudian melatih Taswirul Afkar dan Madrasah Nahdhatul Wathan. Di kedua lembaga tersebut, ia berperan besar dalam menyebarkan benih-benih nasionalisme di kalangan pemuda muslim dan mahasiswanya, yang nantinya akan melanjutkan perjuangan untuk mencapai cita-citanya. kemerdekaan.</li> <li>- Bekerja di cabang Muhammadiyah. Sebagai ketua Muhammadiyah cabang Surabaya, beliau mendirikan beberapa sub organisasi, seperti</li> </ul>
--	--

		<p>organisasi kepemudaan Hisbul Wathan tahun 1921, yang bergerak di bidang perpustakaan, koperasi, olah raga. , musik dan drum band, Organisasi Wanita Aisyah, dan Organisasi Wanita Aisyah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatukan tahapan perjuangan umat Islam Indonesia, setidaknya terlihat dengan terbentuknya MIAMI</li> <li>- Ikut serta dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah anggota BPUPKI.<sup>113</sup></li> </ul>
13).	K .H Abdul Wahab Hasbullah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendirikan kelompok diskusi bernama Tashwirul Afkar di Surabaya pada tahun 1941.</li> <li>- Tahun 1924, pemuda pendukung KH Abdul Wahab Hasbullah mendirikan Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya GP Ansor.</li> <li>- KH. Abdul Wahab Hasbulloh adalah bapak NU. Selain itu, ia juga menjadi komandan pasukan mujahidin (Hizbullah) dalam perang melawan penjajahan Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro.<sup>114</sup></li> </ul>
14).	K.H. Abdul Fatah Hasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ki Fatah Hasan sebagai murid senior Ki Syam'un yang dianggap memiliki kearifan dan visi yang besar dalam berbagai persoalan, diutus mewakili masyarakat Banten untuk menjadi anggota. BPUPKI sebagai komisi untuk membangun ekonomi dan keuangan negara.</li> </ul>

<sup>113</sup> Darul Aqsha, *Kiai Haji Mas Mansur (1986-1946) Perjuangan Dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005). 73-92

<sup>114</sup> Verelladevanka Adryamarthanino, "KH Abdul Wahab Hasbullah: Peran Dan Perjuangannya," KOMPAS.com, 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- K.H. Abdul Fatah Hasan aktif berpartisipasi dalam organisasi Serikat Mahasiswa Indonesia yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, khususnya persatuan Indonesia. K.H. Abdul Fatah Hasan juga aktif menulis untuk Ikhwan al-Muslimin. Tulisan-tulisannya di buku harian itu menunjukkan semangat kemerdekaan dan kebebasan. Direkomendasikan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia, Perhimpunan Indonesia, agar para anggotanya menyuarakan kemerdekaan di seluruh dunia.</li> <li>- Aktif sebagai guru di al-Khairiyah</li> <li>- Menjabat anggota Dewan Kabupaten Serang tahun 1940-1942</li> <li>- Tahun 1942 sampai 1945 menjadi anggota Syuu sangi kai atau Badan Karesidenan Banten.<sup>115</sup></li> </ul>

Tabel tokoh-tokoh di atas, menunjukkan bahwa Berbagai gerakan pembaharuan banyak dimotori oleh para ulama haji yang telah pulang ke tanah air. Gerakan pembaharuan yang dimunculkan oleh sebagian ulama haji ini melahirkan hubungan kuat antara haji dengan politik pada masa itu. Bagi umat Islam, haji adalah ekspresi persatuan dan kesetaraan semua orang beriman dan persaudaraan mereka di dunia ini dan di akhirat. Haji memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk melakukan perenungan mendalam dan kritis terhadap diri masing-masing, orientasi

---

<sup>115</sup> Mufti Ali and Farhan Al-Fuadi, *Abdul Fatah Hasan ( 1912-1948) Anggota BPUPKI Asal Banten Yang Di Buang Belanda Di Laut Timor* (Banten: Bhakti Banten Press, 2019). 100-106

hidup, dan kondisi sosial politik di Tanah Air mereka, serta kondisi global umat Islam secara keseluruhan. Haji selalu memiliki potensi sebagai politik. Peran tokoh-tokoh ini merupakan bentuk kebangkitan Islam yang mana merasa terpanggil hatinya, dan ketika mereka kembali ke tanah asalnya mereka melakukan pembaharuan-pembaharuan atas dasar doktrin yang mereka dapatkan ketika berhaji. Yang kemudian melakukan pembaruan-pembaruan di daerahnya masing-masing. Haji menjadi konferensi terbesar dunia karena setiap muslim dari berbagai negara saling bertukar pikiran dengan yang lainnya sehingga tidak menutup kemungkinan politik berperan di dalam haji.

Haji sebagai media untuk menularkan budaya serta keilmuan yang berasal dari Timur Tengah. Hal terpenting adalah menularkan keilmuan, keilmuan menjadi alat untuk menularkan apa yang didapatkan dari Timur Tengah, keilmuan yang didapatkan kemudian dikembangkan sampai pada akhirnya melahirkan gerakan perlawanan terhadap Kolonial. Para haji yang menimba ilmu di sana, tentunya sekaligus mendapatkan doktrin-doktrin yakni benih-benih nasionalisme sehingga menjadikan para haji sebagai penggerak perlawanan terhadap Jepang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik bahwa berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam terlebih khusus para haji yang ikut adil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yaitu : Perlawanan dengan Strategi Kooperasi, Perlawanan dengan Strategi dibawah Tanah ( Ilegal), dan Perlawanan melalui Senjata dan Pemberontakan

Perlawanan dengan Strategi Kooperasi, dilakukan oleh tokoh-tokoh perjuangan dengan memanfaatkan organisasi - organisasi yang dibentuk Jepang untuk menarik kaum muda untuk terus berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi ini antara lain : Putera ( pusat tenaga rakyat), Jawa Hokikai ( Himpunan kebaktian jawa), Majelis Islam A'la Indonesia ( MIAI), Majelis Syuro Indonesia ( MASYUMI), Cuo Sangi In ( badan pertimbangan pusat), BPUPKI dan PPKI.

Perlawanan dengan Strategi dibawah Tanah ( Ilegal). Perlawanan ini dilakukan secara rahasia dan terorganisi, yang dilakukan secara diam- diam dan tersembunyi untuk menghimpun kekuatan rakyat, juga menanam persatuan dan kesatuan perjuangan kemerdekaan. Diantaranya ; perlawanan kelompok Sutan Syahril, Kelompok Kaigun, Kelompok Sukarni, Kelompok Persatuan Mahasiswa, Kelompok Amir Syarifuddin, dan juga Kelompok para Santri dan Ulama.

Perlawanan melalui Senjata dan Pemberontakan. Perlawanan ini terjadi di beberapa daerah yang timbul akibat kemarahan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan Jepang, diantaranya : Perlawanan Aceh terhadap Jepang yang dipimpin oleh seorang ulama bernama tengku Abdul Jalil., Perlawanan Indramayu yang dipimpin oleh para haji yang terjadi di beberapa desa diantaranya : Desa koplongan, yang dipimpin oleh H. Aksan, Desa Cidempet yang dipimpin oleh Haji Madrias, Desa Panyindang Kidul dipimpin oleh Haji Dulkarim, Desa Sindang yang

dipimpin oleh Sura, desa Sliyeng yang dipimpin oleh Karsina, Desa Pranggong yang dipimpin oleh Tasiah, perlawanan Singaparna yang dipimpin oleh K. H. Zaenal Mustafa, perlawanan Kalimantan yang dipimpin oleh pemuda-pemuda Muhammadiyah, perlawanan PETA (Pembela Tanah Air). Perlawanan PETA terjadi di beberapa tempat diantaranya : Perlawanan PETA di Blitar ( 29 februari 1945) yang dipimpin oleh Sudaco Supriyadi, Sudaco Mulyadi, dan Dr. Ismail, Perlawanan PETA di Meureudu- Pidie Aceh ( November 1944) yang dipimpin oleh perwira Gyugun Tengku Hamid, Perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap ( April 1946) yang dipimpin oleh regu (Bundanco), Kusaeri dan rekan-rekannya, perlawanan Haji Darip dan juga Perjuangan Laskar Hizbullah, diantaranya : Keresidenan Kedu dalam perang kemerdekaan Tahun 1944-1947 , Keresidenan Surabaya dalam peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya

Perlawanan yang terjadi pada masa pendudukan Jepang banyak dimotori oleh umat Islam terlebih khusus tokoh-tokoh yang sudah berhaji. Hal ini menunjukkan bahwa haji merupakan media untuk menularkan budaya serta keilmuan yang berasal dari Timur Tengah. Hal terpenting adalah menularkan keilmuan, keilmuan yang kemudian menjadi alat untuk menularkan apa yang didapatkan dari Timur Tengah, dikembangkan sampai pada akhirnya melahirkan gerakan perlawanan terhadap Jepang. Para haji yang menimba ilmu di sana, tentunya sekaligus mendapatkan doktrin-doktrin yakni benih-benih nasionalisme sehingga menjadikan para haji sebagai penggerak perlawanan terhadap Jepang .

Haji merupakan transmigrasi keilmuan, budaya, dan doktrin. Hal ini memberikan dampak bagi perlawanan umat Islam terhadap Kolonial Jepang. Tokoh-tokoh hujaj ikut adil dalam berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan dan juga berperan penting dalam menyusung kemerdekaan RI. Menunjukkan bahwa Haji merupakan suatu ritual yang mampu menumbuhkan sikap manusia berfikir tentang politik dan sosial

sehingga haji kemudian menjadi konvensi sosial politik terbesar dan sangat spektakuler yang pernah terjadi di dunia. Berjuta orang datang dari berbagai penjuru dunia, yang mencerminkan beragam etnis, bahasa, budaya, adat dan beragam bangsa berinteraksi satu sama lain dalam koridor ajaran Islam. Haji menjadi konferensi terbesar dunia karena setiap muslim dari berbagai negara saling bertukar pikiran dengan yang lainnya sehingga menunjukkan bahwa Haji berperan penting dalam politik.

## **B. SARAN**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti memberikan saran kepada mahasiswa bahwa Indonesia memiliki sejarah yang kuat dan kaya. Maka perlu untuk dikaji ulang dan teliti lagi guna memberikan sumbangsi informasi maupun ilmu mengenai sejarah Indonesia, terlebih terkait haji dan politiknya sedari dini dengan memanfaatkan situs-situs seperti google book, google scholar, dan juga web site sejarah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Cet. IV. Ombak, 2015.
- Abdullah, Taufik. *Mentri-Mentri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998.
- Ali, Mufti. *KH. TB. Achmad Chatib (1890-1966) Jalan Hidup Dan Jejak Langkah Perjuangan Sang Residen Banten*. Serang, Banten: Yayasan Bhakti Banten, 2020
- Ali, Mufti, and Farhan Al-Fuadi. *Abdul Fatah Hasan (1912-1948) Anggota BPUPKI Asal Banten Yang Di Buang Belanda Di Laut Timor*. Banten: Bhakti Banten Press, 2019.
- Anwar Kurnia, Moh. Suryana. *Sejarah 3 Smp Kelas IX*. Jakarta: Yudyistira Ghalia Indonesia, 2007.
- Aqsha, Darul. *Kiai Haji Mas Mansur (1986-1946) Perjuangan Dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Boediono. *Ekonomi Indoensia Dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Ensiklopedia Pahlawan Indonesia Dari Masa Ke Masa*. PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.  
<https://books.google.co.id/books?id=OqV7A3brtCcC>.
- F., Amelia. *Pendudukan Jepang Di Indonesia*. Alprin, 2020.
- Ghofur, M. Abdul. *Haji Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal



- Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, 2012.
- Hamzah, Kyota. *Haji : Ibadah Yang Mengubah Sejarah Nusantara*. Adnan Rizk. Jakarta: PT. Noosphere Digdaya Mulia, 2022.
- Harjono, Anwar. *Perjalanan Politik Bangsa*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Hasbullah, Moeflich. *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara*. Depok: Kencana, 2017.
- . *Islam Dan Transformasi Masyarakat Nusantara*. Depok: Kencana, 2017.
- Huda, Khoirul. *Buku Ajar Metode Penulisan Sejarah*. Madiun Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, n.d.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Jakub, Ismail. *Sedjarah Islam Di Indonesia*. Jakarta: Widjya Djakarta, 1972
- Jumaisa. *Sejarah Pendidikan*. Makassar: Cendikia Publisher, 2022.
- Lubis, Nina. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*. Jakarta: Lp3s, 2003.
- M.C. Ricklefs, Bruce Lockhart, Albert Lau, Portio Reyes, Maitrii Aung, Thwin. *Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah Sampai Kontemporer*. Depok: Katalog Dalam Terbitan, 2013.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Pencaturan Islam Dan Politik*. Yanuar Ari. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Manus, MPB., Zulfikar Ghazali, Susanto Zuhdi, Sumardi, Wiwi Kuswiah, P. Savyo Haryono, Triana Wulandari, and Julinar Said. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah

Nasional, 1993

Mutaqqin, Fajriudun. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung: Humaniora, 2015.

Notosusanto, Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Nugroho No. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1984.

Putuhena, M. Saleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Fathorrahm. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007.

Ratna Sukmayani, Thomas K. Umang, Sedono, Seno Kristianto, Y. Djoko Raharjo. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

RI, kementerian Agama. *Fiqih Haji Komprehensif*. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umroh, 2019

Ricklefs, M.C. *Mengislamkan Jawa Sejarah Islamisasi Di Jawa Dan Penentangannya Dari 1930 Sampai Sekarang*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013.

Sardiman. *Sejarah 2 SMA Kelas XI Program Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Yudyistira, 2008.

Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Sigit Sudiby, Humar Sidik, Debi Robi Yanti. *Seri Buku Infografis : Pendudukan Jepang Di Indonesia*. Guepedia, 2021.

Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Sitepu, P. Anthonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sudirman, Adi. *Sejarah Lengkap Indonesia (Dari Era Klasik Hingga Kini)*. Rusdianto. Yogyakarta: DIVA Press, 2014

Sumargono. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Klaten, Jawa Tengah: Lakeisha,

2019.

Susanto, Syaharuddin & Heri. *Sejarah Pendidikan Indonesia ( Era Prakolonialisme Nusantara Sampai Reformasi)*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019.

Sutianah, Cucu. *Landasan Pendidikan*. Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2022.

Syaharuddin, and Heri Susanto. *Sejarah Pendidikan Indonesia. Program Studi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Vol. 53. Lampung: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019.

Umar, Nasaruddin. *Rethinking Pesantren*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.

Yasin, Arham Bin Ahmad. *Mushaf Ash-Shabib Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Agus Wadi. Depok: Hilal Media, n.d.

Zuhri, Saifuddin. *Berangkat Dari Pesantren*. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2013

### **Artikel Jurnal**

Amaliatulwalidain. "Sistem Pemerintahan Desa Dalam Tinjauan Sejarah Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 2, no. 1 (2017): 25–30. Sinta 1.

Arif, Syamsuddin. "Haji Dan Politik." *Kasyaf* 5, no. 4 (2022): 6–7. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36643.12326>.

Arifin. "Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Prodi Ppkn Fkip Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.” *Skripsi*, 2018.

Budiarjo, Miriam, Nuri Soeseno, and Rosa Evaquarta. “Ilmu Politik: Ruang Lingkup Dan Konsep.” *Modul* 42, no. 12 (2014): 1–61. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP4212-M1.pdf>.

Fadli, Muhammad Rijal, And Dyah Kumalasari. “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan,” 2019, 189–205.

Firda, Jamaluddin Hos, dan Ambo Upe. “Makna Sosial Haji Pada SukubugiS (Studi Di Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana).” *Neo Societal* 4, no. 2 (2019): 1–13.

Firdaus, Almas Hammam, Aziizi Aziizi, Wardhana Wardhana, and Halimah Halimah. “Perjuangan Perlawanan Rakyat Aceh Terhadap Pendudukan Jepang (1942-1945): Studi Kasus Perang Bayu Dan Perang Pandrah.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 4, no. 2 (2021): 106–10.

Fuadi, Rifqil. “Laskar Hizbullah Karesidenan Surabaya Dalam Peristiwa Pertempuran Sekitar 10 November 1945 Di Surabaya.” *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014): 571–85..

Hatman. “Haji Dalam Berbagai Perspektif (Fiqih, Normatif-Filosofis, Dan Sosial).” *Academi. Edu*, 2020, 1–11.

Heriyanto, Heriyanto. “Resolusi Jihad Nu 1945 : Peran Ulama Dan Santri Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Nkri.” *Ilmu Sejarah - SI* 2, no. 5 (2017): 756–75. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilmusejarah/article/view/9452>.

Hidayatullah, Ahmad, and Miftahul Khoiri. “Pergerakan Ulama Dan Santri Dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan Di Ambarawa 1945.” *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam* 2, no. 1 (2022): 55–84.

- Hudaidah, and M. Arman Putra Karwana. "Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang." *Danadyaksa Historica* 1, no. 2 (2021): 97–104. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JDH/article/view/4243>.
- Idayatiningsih, Rini. "Perlawanan Terhadap Dominasi Kekuasaan Dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari (Analisis Wacana Kritis)." *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 1, no. 2 (2017): 42–62.
- Iryana, Wahyu. "Protes Sosial Petani Indramayu Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)." *Tsaqofah & Tarikh* 1, no. 1 (2016): 1–90.
- Ishak, Muhammad. "Sistem Penjajahan Jepang Di Indonesia." *Jurnal INOVASI* 9, no. 1 (2012): 1–12.
- Jannah, Rina Farihatul. "Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945 - 2000m." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Khusna, Azalia Mutammimatul. "Hakekat Ritual Ibadah Haji Dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff." *An-Nas* 2, no. 1 (2018): 132–45. <https://doi.org/10.36840/an-nas.v2i1.93>.
- Mu'min, Ma'mun. "Pergumulan Tarekat Dan Politik (Peranan Kyai Haji Muhammad Shiddiq Dalam Tarekat Dan Politik Di Kudus)." *Fikrah* 2, no. 1 (2014): 153–86.
- Muslim, Muhammad Irfai. "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan." *Jurnal Manajmen Dakwah* 6, no. 1 (2020): 51–66.
- Nuri, Muhammad. "Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (2014).
- Prastyana, Agus. "Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun ( Studi Kasus :Upaya

- Mempertahankan Lapak Dalam Rangka Untuk Hidup).” *Disertasi*, 2018, 127.
- Putri, Titin Apriani, M Syaiful, and Suparman Arif. “Propaganda Jepang Dalam Melancarkan Kebijakan Pendudukan Di Indonesia Tahun 1942-1945.” *Pesagi* 6, no. 1 (2018): 4–5.
- Rizal, Alvin Noor Sahab. “Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945).” *Indo-Islamika* Volume 4, (2014): 179–89.
- Rohman, Miftahur. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang.” *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 02, no. Kebijakan Pendidikan Islam (2018): 15–33.
- Rohmatulloh, Dawam Multazamy. “Perjalanan Haji Indonesia Di Masa Kolonial.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 9, no. 02 (2017): 115–27. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v9i02.359>.
- osyid, Moh. “Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial Dan Problematika Calon Haji Ilegal.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2018): 241. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.241-259>.
- Royani, Ahmad. “Pesantren Dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.” *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (2018): 121.
- Sadzali, Asyhadi Mufsi. “Kelas Haji Kelas Sosial Sejarah Haji Dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau Dari Kajian Kritis Kapitalisme.” *Tsaqofah & Tarikh* 3, no. no.1 (2018).
- Sahajuddin, Sahajuddin. “Propaganda Dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang Di Enrekang (1942-1945).” *Walasuji : Jurnal Sejarah Dan Budaya* 10, no. 2 (2019): 185–201. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v10i2.10>.
- Saraswati, Lukman Hidayat & Ufi. “Bentuk Perjuangan Laskar Hizbullah

- Karesidenan Kedu Dalam Perang Kemerdekaan Tahun 1944-1946”  
*Journal of Indonesian History* 9, no. 2 (2020): 149–53.
- Sholichah, Inti Ulfi. “Implikasi Perubahan Mekanisme Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Ekonomi Islam.” *Madani Syari’ah* 3, no. 2 (2020): 161–78.
- Sofansyah, Dio Yulian, and Sri Mastuti Purwaningsih. “Dibalik Sandiwara Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).” *Avatara* 1, no. 2 (2013): 44–52.
- Sukmana, Wulan Juliani. “Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah).” *Seri Publikasi Pembelajaran* 1, no. 2 (2021): 1–4.
- Sulasman. “Kyai Haji Ahmad Sanusi.” *Jurnal Sejarah Lontar* 5, no. 2 (2008): 35–45.
- Suryana, Riyadi. “Politik Hijrah Kartosuwiryo; Menuju Negara Islam Indonesia.” *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 83–95.
- Uswatun Hasanah, Aan Budianto. “Melawan Dominasi Kolonial; Implikasi Terhadap Kebijakan Haji.” *Jurnal Candi* 21, no. 2 (2021): 82–98.
- Wibowo, E Y. “Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam Di Indonesia (Tahun 1900-1945).” *Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 16, no. 1 (2016): 34–52.
- Yasmis. “Jepang Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.” *Jurnal Sejarah Lontar* 4, no. 2 (2007): 25–26.
- Zainal. “Dakwah Jama ’ Ah Haji Nusantara.” *Al-Munir* III, no. 5 (2012): 71–108.
- Zubaedi. “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji Yang Modern).” *Manhaj* 4, no. 3 (2016): 274–82.

## Web Site

- Adryamarthanino, Verelladevanka. "KH Abdul Wahab Hasbullah: Peran Dan Perjuangannya." KOMPAS.com, 2021.
- . "Kiai Haji Noer Alie : Kiprah Dan Perjuangan." KOMPAS.com, 2021.
- . "Tentara Hizbullah Indonesia : Pembentukan, Tokoh, Pemberontakan." KOMPAS.com, 2022. Kamis, 02 Maret 2023.
- Agama, Kementrian. "Haji Dalam Angka : Jumlah Jemaah Haji Dalam Seabad Lebih." haji.kemenag.go.id, 2015.
- Agung, Prasetyo. "Sejarah Haji Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." Ceknricek.com, 2019.
- Eko, Dodot. "Pendudukan Jepang Di Indonesia." <http://eprints.dinus.ac.id/>, 2020.
- Hendrik. "Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep ,Contoh Politik Ini!" Granmedia Blog. Accessed October 25, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/>.
- <https://www.kbbi.web.id/>. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online," n.d.
- Museumnusantara, Media. "Pendudukan Jepang Di Indonesia : Latar Belakang, Tujuan, & Dampaknya." Museum Nusantara, 2022.
- Parinduri, Alhidayath. "Sejarah Jepang Masuk Ke Indonesia: Kapan, Tujuan, & Kronologi." tirto.id, 2022. <https://tirto.id/sejarah-jepang-masuk-ke-indonesia-kapan-tujuan-kronologi-goLR>.
- Rosikin, Ahmad Nur. "17 Agustus - Seri Pahlawan Nasional: Teuku Muhammad Hasan." Tribun News, 2019.
- Sofyan\_99, And. "Sejarah Nusantara." *Lisensi*, n.d.



Syafii, Moh. “Biografi KH Hasyim Asy’ari: Asal, Silsilah, Pemikiran, Hingga Perjuangan.” Tempo.co.id, 2021.

Ungkris, P2K. “Sejarah Nusantara ( 1942-1945).” p2k.ungkris.ac.id. Accessed December 24, 2022. [https://p2k.ungkris.ac.id/id3/3065-2962/Masa-Pendudukan-Jepang\\_29577\\_p2k-ungkris.html](https://p2k.ungkris.ac.id/id3/3065-2962/Masa-Pendudukan-Jepang_29577_p2k-ungkris.html).

Utami, Tika Widya. “Profil Haji Darip, Jawara Legendaris Betawi Asal Klender Yang Ditakuti Penjajah Jepang Dan Belanda.” metro.sindownews.com, 2023.

Wikipedia. “Pendudukan Jepang Di Wilayah Hindia Belanda.” Wikioedia.com, 2023.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. BIODATA

Nama : Fitrah  
NIM : 1901056017  
Program studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Tempat Lahir : Merombok  
Tanggal Lahir : 10 September 2001  
Alamat : Merombok, RT/RW 006/003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur  
Nama Bapak Kandung : Musataram  
Nama Ibu Kandung : Sumiati

### B. Jenjang Pendidikan Formal

SD : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman Merombok  
SMP/MTS : Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar-Rahman Merombok  
SMA/MAN : Madrasah Aliyah Negeri Manggarai Barat

### Pengalaman Organisasi

Lpm Misii : 2019- Sekarang